Memelihara Harmoni Dari Bawah :

PERAN KELOMPOK KEAGAMAAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Editor :
Bashori A. Hakim

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Tahun 2014

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

MEMELIHARA HARMONI DARI BAWAH
PERAN KELOMPOK KEAGAMAAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Editor:
Bashori A. Hakim

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
TAHUN 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

memelihara harmoni dari bawah peran kelompok keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama/ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta: 2014

ISBN 978-602-8739-25-2

Hak Cipta pada Penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan Pertama, Oktober 2014

MEMELIHARA HARMONI DARI BAWAH : PERAN KELOMPOK KEAGAMAAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Editor : Bashori A. Hakim

Desain Cover dan Layout : H. Zabidi

Penerbit:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Jl. M. H. Thamrin No.6 Jakarta 10340
Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421
http://puslitbang1.kemenag.go.id

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya terwujud penerbitan, **Buku Hasil Penelitian Kehidupan Keagamaan** pada tahun 2014. Penerbitan buku ini merupakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 ini ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) naskah buku yang diterbitkan. Buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinamika Agama Lokal di Indonesia.
2. Jaringan Kerja Penginjilan dan Dampak Pemahaman Misi Kekristenan Terhadap Oikumenis dan Kemajemukan di Indonesia.
3. Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia.
4. Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam.
5. Efektivitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Terhadap Jamaah Haji.
6. Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
7. Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan.
8. Resolusi Konflik Keagamaan di Berbagai Daerah.
9. Penyiaran Agama dalam Mengawal Kerukunan di Indonesia.
10. Memelihara Harmoni dari Bawah: Peran Kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Kami berharap penerbitan naskah buku hasil penelitian yang banyak menyampaikan informasi dan fakta ini dapat

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keagamaan dalam dinamika sosial keagamaan yang sangat dinamis di Indonesia. Buku hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi berbagai lembaga atau institusi, terkait informasi kehidupan keagamaan di Indonesia.

Untuk itu, dengan selesainya penerbitan naskah buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan arahan dan sekaiigus memberi-kan kata sambutan pada masing-masing buku yang diterbitkan.
2. Para pakar dan akademisi yang dengan serius telah mencermati dan memberikan prolog dan epilog pada masing-masing buku yang diterbitkan.
3. Para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, baik sebagai penulis maupun editor yang telah menyelaraskan laporan hasil penelitian menjadi naskah buku, yang menjadi enak dibaca.
4. Kepada tim pelaksana kegiatan dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya penerbitan naskah buku ini.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Apabila dalam penerbitan buku ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik substansi maupun teknis kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap masukan serta saran untuk penyempurnaan dan perbaikan buku-buku yang kami terbitkan dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2014
Kepala

KEMENTERIAN AGAMA RI ★ Badan Litbang dan Diklat ★ REPUBLIK INDONESIA

Muharam Marzuki, Ph.D
NIP. 19630204 199403 1 002

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kelompok sosial mempunyai peran dalam aspek kehidupan sosial bagi anggota kelompoknya. Demikian pula kelompok keagamaan mempunyai peran penting bagi para anggota kelompoknya dalam kehidupan keagamaan, termasuk peran untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang rukun, baik di kalangan internal kelompoknya maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Kelompok-kelompok sosial di atas, pada umumnya membentuk organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga nirlaba lainnya (LNL). Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) termasuk organisasi keagamaan atau Ormas keagamaan, LSM dan LNL tersebut di tingkat pusat dan di daerah mencapai ribuan. Berdasarkan data dari Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dipaparkan Direktur Jenderal Kesbangpol dalam pengantar Buku *"Direktori Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba Lainnya Tahun 2010"*, disebutkan jumlah organisasi yang pernah mendaftarkan keberadaannya di Kemendagri sejak tahun 1995 s/d tahun 2010 tercatat ada 8.632 organisasi kemasyarakatan. Jumlah tersebut tidak termasuk organisasi kemasyarakatan yang hanya terdaftar di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, yang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nya hanya 724 Ormas termasuk LSM dan LNL (A. Tanribali L, Ditjen Kesbangpol Kemendagri, 2010: ii-iii).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Data di atas secara ilustratif memberikan gambaran bahwa demikian banyak Ormas termasuk Ormas keagamaan di Indonesia, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Ditjen Kesbangpol Kemendagri. Ormas keagamaan maupun kelompok keagamaan di berbagai daerah yang jumlahnya tidak sedikit itu, merupakan aset yang sangat berharga dan berfungsi memberikan kontribusi ikut serta memelihara kerukunan umat beragama. Namun kebanyakan belum diketahui kontribusi perannya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Di antara kelompok atau ormas keagamaan tersebut dimungkinkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya pemeliharaan kerukunan, namun tidak menutup kemungkinan adanya kelompok atau ormas keagamaan yang tidak memberikan kontribusi bahkan justru menimbulkan konflik di kalangan umat beragama.

Sementara itu eksistensi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat memiliki kedudukan dan peran sangat sentral dalam berbagai hal, termasuk dalam upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi yang rukun di kalangan umat beragama di lingkungan masing-masing. Secara sosiologis, keberadaan kelompok sosial termasuk kelompok keagamaan dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya (Kamanto Sunarto, 1993:87). Dengan demikian maka keikutsertaan dan peran aktif kelompok keagamaan dalam mewujudkan kondisi yang rukun di kalangan masyarakat sangat dibutuhkan. Namun, sejauh ini kontribusinya terhadap upaya peningkatan kerukunan umat beragama di lingkungan masing-masing di berbagai daerah belum

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

yang mengungkap tentang peran. berbagai kelompok keagamaan di berbagai daerah dengan demikian penting untuk diketahui dalam upaya peningkatan partisipasinya terhadap pembinaan kerukunan umat beragama dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Kami menyambut baik atas penerbitan buku berjudul: *Memelihara Harmoni Dari Bawah: Peran Kelompok Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama* yang berisi hasil penelitian para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang kontribusi kelompok keagamaan dari berbagai agama di berbagai daerah ini. Dengan diterbitkan dan disebarluaskannya buku ini diharapkan gambaran dinamika peran kelompok keagamaan dari berbagai agama dapat tersosialisasikan kepada masyarakat luas.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2014

Kepala Badan,

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D

NIP. 19600416 198903 1 005

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROLOG

Segala tindakan yang terwujud dalam kenyataan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat tampak menjadi sesuatu yang stabil karena mempunyai pola yang berulang setiap hari. Pola tersebut disertai dengan aturan-aturan adat agar tindakan tersebut bermakna dan berfungsi serta ditaati oleh anggota masyarakat.[1] Aturan atau norma-norma adat yang berkembang serta pengetahuan dan nilai yang terkandung dalam kebiasaan bertindak yang diwujudkan anggota masyarakat bersumber dari kebudayaan yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam rangka memfungsikan diri sebagai anggota masyarakat. Inilah yang selanjutnya membentuk persepsi atau cara pandang satu kelompok terhadap kelompok masyarakat yang lain. Kerukunan umat beragama pada dasarnya terbentuk melalui sejumlah persepsi. Memahami kerukunan sosial atau sebaliknya tidak rukun, tidak memadai apabila hanya mengandalkan pendekatan struktural karena persoalan kerukunan adalah persoalan persepsi antara satu orang terhadap orang lain atau juga dalam lingkup yang lebih luas antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang selanjutnya membentuk budaya. Persepsi berasal dari peta kognitif yang kemudian menghasilkan stereotip terhadap kelompok lainnya. Atas dasar itu, konsep budaya terbentuk melalui berbagai tahap pengujian sejarah yang disebut gugusan empiris. Sebuah pengalaman tentulah ia merupakan hasil pergumulan pemikiran yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dr. Ibrahim Elfiky, seorang

---

[1] Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Social Mapping, Metode Pemetaan Sosial,* Bandung, Rekayasa Sains, 2008, hal. 2.

Maestro Motivator Muslim Dunia, mencatat begitu banyak unsur dari kekuatan pikiran dan salah atunya adalah pikiran melahirkan *mindset*. Sebuah *mindset* adalah ungkapan sesuatu yang ia hubungkan dengan tempat dan waktu yang kemudian diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi sehingga benar-benar terjadi dan bisa ditunggu setiap waktu yang sama.[2]

Masyarakat pada dasarnya mengakui bahwa mereka harus hidup dalam ikatan solidaritas. Pada masyarakat perdesaan, solidaritas terbangun bukan melalui stratifikasi maupun diferensiasi sosial akan tetapi muncul atas kesadaran keguyuban yang disebut solidaritas mekanik sementara pada masyarakat kota semangat kesetiakawanan itu disebut dengan solidaritas organik. Atas dasar itulah menurut Ulf Hannerz (1987) dalam setiap masyarakat terbentuk yang disebut *ecumene culture* yaitu sebagai kawasan interaksi, interpenetrasi dan pertukaran kultural yang berlangsung secara terus menerus. [3] Apabila tema kerukunan yang menjadi pusat perhatian kita maka makna dari kerukunan itu sesungguhnya telah berkembang menuju *ecumene culture* sebagaimana yang dimaksud oleh Ulf Hannerz itu.

Secara sosiologis, masyarakat dilukiskan mengalami tahapan perkembangan transisi sosiologis yaitu primitif, agrokultural, tradisional, transisi, moderen dan posmoderen.[4]

---

[2] Dr. Ibrahm Elfiky, *Terapi Berpikir Positif*, Jakarta, Zaman, 2009, hal. 20.

[3] Piőtr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta, Prenada, 2008, alih bahasa Alimandan, hal. 109

[4] Prof. Dr. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta, Prenada Group, 2006, hal.92.

Dalam pandangan umum, masyarakat yang berada pada tahapan perubahan sosial sampai pada level ketiga yaitu tradisional, masyarakatnya relatif hidup dalam suasana rukun. Hal ini sebagai akibat cara berpikir masyarakat yang masih kuat ikatan semangat spiritual. Hal ini adalah akibat dari peranan pemuka agama maupun budaya sebagai *primus inter pares* sehingga terbentuk ikatan yang demikian kuat antara pemimpin dengan umat yang dilukiskan dengan *patron-client relationship*. Sehingga dengan mudah manakala muncul benih-benih konflik dalam masyarakat segera dapat dinetralisir dan masyarakat dapat hidup rukun kembali. Namun setelah masyarakat mulai menapak tahapan perkembangan berikutnya yaitu transisi sampai posmoderen, maka terjadi format baru dalam hubungan sosial. Sekalipun muncul tipologi pemimpin baru yang menjadi tokoh masyarakat seperti kelompok profesional, pedagang, politisi namun nilai dari ikatan itu tidak lagi bernilai sakral akan tetapi lebih didominasi pertimbangan rasional, pragmatis dan hubungan sesaat.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dengan perubahan peta sosial tersebut maka pola hubungan antara satu kelompok masyarakat dengan lainnya menjadi semakin menjauh dari kesadaran akan kebersamaan. Akibat dari semakin meningkatnya kompetisi dalam masyarakat maka hubungan seseorang dengan orang lain lebih ditentukan oleh pertimbangan terhadap aset kasat mata *(tangible assets)* dibanding dengan aset tidak kasat mata *(intangible assets)*. Contohnya, melemahnya semangat gotong royong, kegiatan menjaga keamanan tempat tinggal dan kalaupun mereka menyetujui kegiatan ronda kampung namun lebih banyak diupahkan kepada orang lain yang membutuhkan materi.

Demikianlah kerenggangan demi kerenggangan terbentuk dikalangan masyarakat. Sehingga begitu ada fakor pemicu *(trigger)* maka dengan mudah emosi masyarakat tersulut dan akhirnya konflik tidak dapat dihindarkan. Apalagi konflik itu bersinggungan dengan faktor nilai yang dipandang sakral yaitu agama dan etnisitas. Pertimbangan dalam kerangka penilaian tersebut didasari oleh adanya ketidaksetaraan sosial baik yang melalui program yang dirancang oleh institusi pemerintahan maupun yang secara alamiah seperti tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat.

Setiap konflik sosial pada dasarnya melalui lima tahapan perkembangan yaitu; (1) adanya potensi konflik yang sudah lama mengendap dalam alam bawah sadar yang kemudian terungkap ke permukaan; (2) akar konflik itu sesungguhnya pada mulanya tidak berlatar agama akan tetapi karena faktor kemasyarakatan atau budaya berkorelasi dengan faktor agama maka kemudian terjadi pemekaran isu konflik yang merambah emosi keagamaan. Dalam kaitan itu, ditambah lagi adanya rasa keterancaman salah atu pihak sehingga membangun "benteng" pertahanan; (3) dengan terjadinya pemekaran konflik yang bersinggungan dengan agama maka persoalannya tidak lagi menjadi wilayah dari nilai relativitas akan tetapi meningkat menjadi sebuah nilai absolut yaitu kebenaran ajaran agama. Sekalipun kemungkinan orangnya tidak terlalu tepat disebut agamawan karena pengamalan ajaran agama yang masih sangat terbatas pada waktu dan ruang tertentu saja. Pada saat itulah konflik mulai terorganisir sebagai manifestasi dari solidaritas organik pada masyarakat yang telah mengalami tahapan transisi; (4) setelah terjadi pelembagaan, konflik

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

kemudian berkembang akibat dari adanya kreasi sebagian orang untuk melakukan penakaran terhadap konflik guna mengukur tingkat kedalaman emosi massa; dan (5) apabila hal tersebut tidak diantisipasi maka konflik meningkat pada level kelima yaitu ledakan konflik. Demikianlah sekelumit kerangka teoritis yang dikemukakan ketika pembaca mulai menelaah laporan penelitian yang diedit oleh Drs. H.Bashori A Hakim, M. Si. Ini.

Penelitian ini memilih judul *Memelihara Harmoni Dari Bawah, Peran Kelompok Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.* Pekerjaan penelitian ini dimaksudkan, *pertama,* mengidentifikasi kelompok-kelompok keagamaan yang diteliti. *Kedua,* mendata kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait pemeliharaan keerukunan umat beragama, dan *ketiga,* meneliti faktor pendukung dan penghambat terwujudnya kerukunan. Sementara lokasi penelitian adalah Kupang Provinsi NTT, Pangkal Pinang Babel, Badung Bali, Tangerang Banten, Bandar Lampung Lampung, Minahasa Utara Sulawesi Utara, Bandung Jawa Barat dan Bantul di Yogyakarta. Delapan lokasi penelitian tersebut terdiri dari berbagai ciri yang berbeda. Di antara kesimpulan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya peranan instansi Kementerian Agama setempat melakukan pendataan identitas semua kelompok keagamaan guna melihat peranan mereka dalam mendukung program kerukunan beragama. Berikutnya, peranan kelompok keagamaan masih terbatas karena belum mampu ikut secara proaktif melakukan penanganan konfik keagamaan. Menurut Elizabeth K Nottingham, meskipun agama mempunyai peranan di dalam masyarakat sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

namun ia juga mempunyai fungsi yang lain. Keberagamaan juga dapat menjadi kekuatan yang memecah belah, mencerai beraikan bahkan menghancurkan sebuah masyarakat.[5] Khususnya pada saat terjadi perubahan besar di bidang soial dan ekonomi.

Sebagaimana disinggung di muka, peranan kelompok keagamaan dalam melakukan pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama bersumber dari norma adat sebagai landasan budaya terbentuknya sebuah persepsi. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yang perlu diajukan kepada masing-masing kelompok agama adalah apa yang menjadi latar belakang pendirian atau pembentukan kelompok keagamaan tersebut. Karena tampaknya mereka masih diliputi perasaan bingun apakah hanya bergerak di lingkungan internal atau merambah keluar lingkungan kelompoknya. Oleh karena itu pemahaman tentang visi pembentukan sebuah kelompok merupakan sebuah keniscayaan sehingga akan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca baik tujuan maupun target pembentukan sebuah kelompok keagamaan. Kemungkinan bisa saja bahwa pada mulanya tujuan itu masih bersifat eksklusif yaitu hanya untuk kelompok agama tertentu saja.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Akan tetapi seiring dengan terjadinya perubahan waktu maka kelompok keagamaan mengembangkan pandangannya kepada spektrum yang lebih luas yaitu untuk membangun kerukunan. Oleh karena itu, salah satu persoalan yang perlu diperoleh jawabannya oleh peneliti tentang apakah kelompok penggiat kerukunan atau

---

[5] Elizabth K Nottingham, *Agama Dan Masyarakat,* Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996, hal. 42.

Pemerintah Derah telah melakukan monitoring dan evaluasi tentang efektifitas gerakan kerukunan yang digagas oleh kelompok keagamaan tersebut. Selanjutnya, persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah penjelasan tentang pemahaman kelompok keagamaan tersebut terhadap kerukunan. Karena pemahaman yang kurang jelas tentang kerukunan akan mengakibatkan terjadinya kekaburan misi dari kelompok keagamaan tersebut.

Selain dari itu, seiring dengan adanya pesan ajaran dari hampir semua agama untuk mengembangkan semangat misi atau penyebaran kelompok penganut maka setiap agama memiliki gerakan untuk penyiaran agama. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana upaya implementasi konsep penyiaran itu agar tidak menyimpang dari semangat pemeliharaan kerukunan.

Kekuatan dari penelitan ini adalah cakupannya yang demikian luas meliputi 8 daerah kabupaten/kota dan dengan demikian mencakup 8 provinsi. Luasnya cakupan daerah tentu saja diharapkan akan membahas keunikan permasalahan pada setiap daerah sehingga demikian relativ dapat memberikan informasi keragaman serta keunikan masing-masing daerah di Indonesia. Kekuatan lainnya adalah mengandaikan adanya empat persoalan penelitian. Sebagaimana diketahui suatu penelitian artinya ingin mengetahui adanya jarak yang memisahkan antara keadaan yang ideal sebagai suatu keharusan *(das sollen)* dengan kenyataannya *(das sein)*. Kondisi ideal sebagai suatu keharusaan adalah dengan asumsi bahwa terdapat keajegan dalam hukum alam sehingga setiap proses sosial akan menuju kepada keteraturan. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi adalah realitas jarak yang semakin lebar dengan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

kemestian. Pertanyaan dalam penelitian adalah sebagai berikut (1) bagaimana profil keagamaan yang menjadi sasaran/fokus kajian (2) apa saja program yang mereka lakukan untuk tercapainya tujuan (3) apa hambatan yang mereka hadapi dalam upaya pemeliharaan kerukunan, dan (4) bagaimana pandangan tokoh agama lain serta aparat pemerintah daerah serta instansi lain tentang peranan kelompok keagamaan yang menjadi obyek penelitian. Kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi bahan bagi Kementerian Agama terkait kebijakan penyusunan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kekuatan lain dari penelitian ini adalah untuk memperkuat posisi Pusatlitbang Kehidupan Keagamaan sebagai wahana penelitian serta pengembangan bagi masa kehidupan beragama di Indonesia.

Hambatan yang sering dihadapi oleh tuntutan agar setiap peneliti tidak lekas merasa puas *(curiosity)* sehingga memadakan secara deskriptif temuan di kancah penelitian. Seharusnya setiap peneliti terus didorong oleh rasa ingin tahu dan berambisi untuk memperoleh informasi yang terdalam dengan melakukan analisa tebal *(thick analysis)* terhadap data lapangan. Oleh karena itu, setiap penelitian kualitatif maka analisisnya telah dimulai sejak berangkat ke kancah penelitian. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumber data berada pada situasi yang wajar *(natural setting)* tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen. Demikian juga tidak diarah-arahkan kepada jawaban yang diinginkan pewawancara.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

2. Laporannya sangat deskriptif.
3. Mengutamakan proses dan produk.
4. Peneliti sebagai instrumen penelitian *(key instrument).*
5. Mencari makna dipandang dari pikiran dan perasaan responden.
6. Mementingkan data langsung (tangan pertama) oleh sebab itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi.
7. Menggunakan triangulasi yaitu memeriksakan kebenaran data yang diperoleh kepada pihak lain.
8. Menonjolkan rincian yang kontekstual yaitu menguraikan sesuatu secara rinci tidak terkotak-kotak.
9. Subyek yang diteliti dianggap berkedudukan yang sama dengan peneliti, seorang peneliti bahkan belajar kepada respondennya.

   Mengutamakan perspektif *emic* yaitu pendapat responden daripada pendapat sendiri *(etic).*
10. Mengadakan verifikasi melalui kasus yang bertentangan.
11. Sampel dipilih secara purposif.
12. Mengadakan *audit trail* yaitu memeriksa data mentah, analisis dan kesimpulan kepada pihak lain biasanya pembimbng.
13. Partisipasi peneliti tidak mengganggu *natural setting.*
14. Analisi data dilakukan sejak awal sampai penelitian berakhir.[6]

---

[6] Dr. Husaini Usman, M. Pd dan Purnomo Setiady Akbar, M. Pd, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hal. 90.

15. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kepada para peneliti yang terjun ke lapangan apakah ciri penelitian kualitatif itu telah dipersiapkan ketika turun ke kancah penelitian. Apabila belum, maka tentulah bisa dicari cara yang lain yaitu kesediaan Tim Editor mengorbankan waktu-waktu istirahatnya untuk menggali berbagai hal dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sekedar untuk menyegarkan ingatan para peneliti tentang benang merah yang membedakan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif adalah sebagai berikut:

Perbandingan Karakteristik Metode Kualitatif dan Kuantitatif[7]

No.	Metode Kuantitatif	Metode Kualitatif
1.	**A. Desain:** a. specifik b. ditentukan secara mantap sejak awal c. menjadi pegangan langkah demi langkah	**A. Desain:** a. umum b. fleksibel c. berkembang dan muncul dalam proses peneltian
2.	**B. Tujuan:** a. menunjukkan hubungan antar variabel b. menguji teori c. mencari generalisasi yang mempunyai nilai	**B. Tujuan** a. menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif b. menggambarkan realitas yang kompleks c. memperoleh

[7]Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung, CV Alfabeta, 2009, hal. hal. 11

	prediktif	pemahaman makna d. menemukan teori
3.	**C. Teknik Penelitian:** a. eksperimen, survey b. kuesioner c. observasi dan wawancara terstruktur	**C. Teknik Penelitian** a. *participant observation* b. *in depth interview* c. dokumentasi d. triangulasi
4	**D. Instrumen Penelitian** a. test, angket, wawancara terstruktur b. instrumen yang telah terstandard	**D. Instrumen Penelitian** a. peneliti sebagai instrumen *(human instrument)* b. buku catatan, tape recorder, camera, handycam dan lain sebagainya
5.	**E. Data** a. kuantitatif b. hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen	**E. Data** a. deskriptif b. dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain lain-lain

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Pekerjaan yang tidak kalah beratnya adalah melakukan analisis terhadap temuan data penelitian karena merupakan pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari

metode sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Sehingga bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.[8]

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dalam empat tahapan yaitu (1) analisis domain yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti dalam hal ini 8 daerah lokasi penelitian di berbagai provinsi. Hal ini diperoleh melalui *grand tour* dan *mini tour question*. (2) analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti yang dapat diurai lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi (3) pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Dan ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi (4) analisis tema budaya *(discovering cultural themes)* adalah merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada.

Setelah dilakukan analisis tema budaya maka pada akhirnya dapat tersusun konstruksi bangunan situasi sosial/obyek penelitian yang sebelumnya masih remang-remang dan setelah dilakukan penelitian menjadi lebih terang dan jelas. Penelitian tentang Peran Kelompok Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama pada akhirnya diharapkan akan dapat menjawab melalui analisis tema budaya *(discovering cultural themes)*

---

[8] *Ibid.*, hal. 88.

tentang kerangka berpikir lahirnya berbagai kelompok keagamaan sehingga diharapkan memiliki daya tahan yang tinggi di tengah arus perubahan sosial yang melahirkan modernitas.

Terakhir

Penelitian ini dapat digolongkan riset kebijakan karena bertujuan untuk mengevaluasi relevansi dan efektivitas sebuah kebijakan tentang Peranan Kelompok Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Dalam berbagai fakta sosial banyak ditemukan berbagai kasus tentang pemahaman yang kurang sama di kalangan kelompok-kelompok agama sehingga pemahaman serta sikap mereka dari waktu ke waktu terhadap peningkatan kualitas kerukunan kurang mengalami peningkatan. Selayaknya, buku laporan penelitian ini tidak hanya sekedar bagian dari kumpulan laporan-laporan penelitian yang lalu akan tetapi dapat diedarkan ke bidang unit-unit teknis terkait di Kementerian Agama termasuk Kementerian Dalam Negeri agar masing-masing unit teknis dapat mengambil bagian dalam upaya merumuskan rancang bangun kelanjutan program pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2014

Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis
Guru Besar Jurusan Perbandingan Agama
Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PRAKATA EDITOR

Kelompok keagamaan mempunyai peran sentral bagi para anggotanya dalam kehidupan keagamaan, termasuk peran untuk menciptakan dan memelihara kerukunan baik di dalam internal kelompoknya maupun antar kelompok di kalangan umat beragama. Dilihat dari segi levelnya, kelompok keagamaan dimaksud ada yang tingkat nasional dan tingkat lokal. Kelompok keagamaan tingkat lokal ini, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar jumlahnya relatif besar dan tersebar di berbagai daerah, merupakan aset yang sangat berharga dalam memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama. Namun sejauh ini belum banyak diketahui secara pasti kontribusi perannya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah masing-masing.

Fokus penelitian ini adalah tentang peran kelompok keagamaan lokal dalam upaya memelihara kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Secara rinci, yang dikaji dalam penelitian ini meliputi beberapa hal berikut: p*ertama,* identifikasi kelompok keagamaan yang diteliti; *kedua,* kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama, termasuk keikutsertaan dalam penanganan konflik keagamaan yang terjadi di daerahnya; *ketiga,* faktor pendukung maupun penghambat dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Adapun tujuan penelitian yaitu: *pertama,* untuk mengetahui identitas kelompok keagamaan yang diteliti; *kedua,* untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan *ketiga,* untuk

mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Penelitian dilakukan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan dengan dengan mengikutsertakan Peneliti dari unsur perguruan tinggi,. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian meliputi delapan kabupaten/kota di provinsi yang berbeda, yakni: (1) Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan fokus kajian Kelompok Keagamaan Orang Muda Katolik (OMK) Paroki Santa Maria Assumpta Kota Kupang; (2) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan fokus kajian Kelompok Keagamaan Buddha Citra Maitreya dan Kumala Bodhi; (3) Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan fokus kajian Kelompok Keagamaan Desa Adat Angantiga; (4) Kota Tangerang Provinsi Banten dengan fokus kajian Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio; (5) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan fokus kajian Perkumpulan Rukun Kematian (Rukem); (6) Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan fokus kajian Kelompok Keagamaan Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA); (7) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan fokus kajian Forum Silaturrahim Organisasi Islam (FSOI); dan (8) Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus kajian Takmir dan Jamaah Masjid al-Muhtadin Plumbon.

Beberapa kesimpulan pokok yang dipandang penting dari penelitian di berbagai daerah di atas adalah:

Pertama, di antara kelompok keagamaan yang dijadikan focus kajian ada yang telah berdiri jauh sejak

sebelum kemerdekaan RI seperti Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio, bahkan ada yang diperkirakan sejak pra sejarah yakni Perkumpulan Desa Adat Angantiga di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Keberadaannya pada umumnya berdasarkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti kelompok keagamaan OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Kupang dan Rukem di Bandar Lampung, ada pula yang dibentuk atas inisiatif pemerintah daerah seperti BKSAUA di Minahasa Utara, bahkan ada yang dibentuk sebagai reaksi atas kondisi negatif yang ada di lingkungan mereka.

Kedua, kelompok-kelompok keagamaan tersebut pada umumnya berperan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui berbagai bidang antara lain: bidang pendidikan, seni-budaya, sosial/kemanusiaan, keagamaan dan keamanan, namun masih terbatas dan lebih bersifat pasif. Ada yang berperan secara aktif misalnya memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait penanganan kerukunan dan ikutserta menangani kasus konflik yang timbul seperti dilakukan oleh BKSAUA di Minahasa Utara.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Ketiga, di antara faktor pendukung kelompok keagamaan dalam upaya pemeliharaan kerukunan adalah: eksisnya budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti tradisi saling berkunjung, gotong-royong, toleransi beragama dan respon positif dari unsur pemerintah daerah dan tokoh agama terkait. Adapun faktor penghambat-nya bervariasi sesuai kondisi daerah/lingkungan masing-masing kelompok keagamaan, antara lain: adanya kompetisi ekonomi dikaitkan dengan isu SARA seperti yang dialami Kelompok Buddha Citra Maitreya dan Kumala Badhi di Kota Pangkalpinang.

Selain itu tingkat pendidikan rendah, ekonomi lemah dan pengaruh budaya luar seperti yang dirasakan oleh kelompok Desa Adat Angantiga di Badung-Bali, serta kurangnya kaderisasi sebagaimana dialami OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Kupang.

Dari beberapa kesimpulan pokok yang diangkat dari penelitian di berbagai daerah di atas, direkomendasikan beberapa hal berikut:

Pertama, untuk mengetahui karakteristik kelompok keagamaan dalam upaya pembinaan maka pimpinan Kantor Kementerian Agama perlu melakukan pendataan identitas semua kelompok keagamaan yang ada di wilayah kerjanya, sekaligus untuk melengkapi data kelompok keagamaan yang belum terdaftar.

Kedua, mengingat peran kelompok keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama masih terbatas dan pada umumnya belum secara proaktif ikut serta dalam penanganan konflik keagamaan, maka pimpinan Kantor Kementerian Agama bekerjasama dengan instansi terkait diharapkan melakukan pembinaan secara berkala kepada kelompok keagamaan yang ada di wilayahnya dan meng-ikutsertakan dalam menangani konflik keagamaan yang terjadi.

Ketiga, untuk mengatasi hambatan dalam pemelihara-an kerukunan umat beragama diharapkan pimpinan Kantor Kementerian Agama bersinergi dengan pemda dan instansi terkait melakukan penanganan misalnya dengan cara meningkatkan efektivitas faktor-faktor pendukung kerukun-an yang ada dalam masyarakat.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Tentu saja rekomendasi di atas secara kasus-perkasus perlu didisesuaikan dengan kondisi di daerah yang relatif serupa atau hampir sama kriterianya.

Meskipun sebagai kajian awal, hasil-hasil penelitian mengenai peran kelompok keagamaan terhadap kerukunan di berbagai daerah yang diterbitkan dalam buku berjudul: "Memelihara Harmoni dari Bawah: Peran Kelompok Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama" ini kiranya dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pengembangan informasi dan kajian lebih mendalam tentang kasus serupa pada masa mendatang.

Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2014
Editor,

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

H. Bashori A. Hakim
NIP. 19500509 197803 1 002

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN iii

SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI v

PROLOG ix

PRAKATA EDITOR xxiii

DAFTAR ISI xxix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 3

C. Tujuan 4

D. Kegunaan 4

E. Metode 5

F. Lokasi Penelitian 8

G. Operasionalisasi Konsep 9

H. Kerangka Pemikiran 11

I. Waktu, Tim Pelaksana dan Biaya Penelitian 13

II. PERAN ORANG MUDA KATOLIK (OMK) PAROKI SANTA MARIA ASSUMPTA KOTA BARU, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN II DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Bashori A. Hakim 17

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

III. PERAN ALIRAN BUDDHA CITRA MAITREYA DAN KUMALA BODHI DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA PANGKAL-PINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

M. Yusuf Asry 39

IV. PERAN DESA ADAT ANGANTIGA DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PETANG, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

Ibnu Hasan Muchtar & Haris Burhani 65

V. PERAN PERKUMPULAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL "BOEN TEK BIO" DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA TANGERANG

Ahsanul Khalikin 101

VI. PERAN RUKUN KEMATIAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KEL SURABAYA DAN BUKIT KEMILING PERMAI KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG

Haidlor Ali Ahmad 135

VII. PERAN BKSAUA/FKUB DAN KELOMPOK KEAGAMAAN LOKAL DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

BERAGAMA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA
Akmal Salim Ruhana 163

IX. PERAN FORUM SILATURRAHIM ORMAS ISLAM (FSOI) DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
Mursyid Ali 187

X. PERAN KELOMPOK MUSLIM MASJID AL-MUHTADIN PLUMBON DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA
Rita Pranawati 207

EPILOG 239

LAMPIRAN-LAMPIRAN 245

INDEKS 251

BIODATA EDITOR 257

IKHLAS BERAMAL
PUSLITBANG LEKTUR KEAGAMAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerukunan umat beragama adalah merupakan pilar penting dari kerukunan nasional. Sedangkan kerukunan nasional dapat tercipta apabila hubungan antar kelompok masyarakat terjalin secara harmonis. Oleh karena itu maka perlu upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi yang rukun di kalangan umat beragama secara terus-menerus, baik oleh pemerintah maupun berbagai komunitas dan kelompok dalam masyarakat termasuk kelompok keagamaan. Upaya demikian sangat diperlukan karena kelompok-kelompok sosial -termasuk kelompok dan ormas keagamaan- dalam masyarakat memiliki kedudukan dan peran yang sangat sentral dalam mewujudkan kondisi di atas. Secara sosiologis, keberadaan kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya (Kamanto Sunarto, 1993:87).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kelompok sosial mempunyai peran dalam aspek kehidupan sosial bagi anggota kelompoknya. Demikian pula kelompok keagamaan mempunyai peran penting bagi para anggota kelompoknya dalam kehidupan keagamaan, termasuk peran untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang rukun, baik di kalangan internal kelompoknya maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Kelompok-kelompok sosial di atas, pada umumnya membentuk organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga nirlaba lainnya

(LNL). Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) –termasuk organisasi keagamaan atau Ormas keagamaan, LSM dan LNL tersebut di tingkat pusat dan di daerah mencapai ribuan. Berdasarkan data dari Ditjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dipaparkan Direktur Jenderal Kesbangpol dalam pengantar Buku *"Direktori Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba Lainnya Tahun 2010"*, disebutkan jumlah organisasi yang pernah mendaftarkan keberadaannya di Kemendagri sejak tahun 1995 s/d tahun 2010 tercatat ada 8.632 organisasi kemasyarakatan. Jumlah tersebut tidak termasuk organisasi kemasyarakatan yang hanya terdaftar di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, yang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nya hanya 724 Ormas termasuk LSM dan LNL (A. Tanribali L, Ditjen Kesbangpol Kemendagri, 2010: ii-iii).

Data di atas secara illustratif dapat memberikan gambaran, demikian banyak Ormas –termasuk Ormas keagamaan-di Indonesia, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Ditjen Kesbangpol Kemendagri. Selain Ormas, terdapat pula kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tidak terdaftar. Keberadaan dan terbentuknya di antaranya merupakan upaya penggalangan kekuatan untuk menangkal unsur dari luar yang tidak dikehendaki oleh kelompok tersebut. Kelompok ini cenderung lebih berupa gerakan sosial (*social movement*). Kelompok yang memanivestasikan diri dalam bentuk gerakan sosial ini dimungkinkan terdapat di hampir setiap daerah. Sebagai gerakan sosial, kelompok ini pada mulanya cenderung tidak bersinggungan dengan upaya pemeliharaan kerukunan. Namun karena anggotanya terdiri atas unsur-unsur umat beragama, maka bukan tidak mungkin dalam perkembangan-

nya peduli terhadap persoalan keagamaan, termasuk dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kelompok demikian jika memang terdapat di lokasi penelitian, dapat menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Ormas keagamaan maupun kelompok keagamaan di berbagai daerah yang jumlahnya tidak sedikit di atas, merupakan aset yang sangat berharga dalam berfungsi memberikan kontribusi ikut serta memelihara kerukunan umat beragama. Namun kebanyakan belum diketahui secara realita di lapangan kontribusi perannya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Di antara kelompok/Ormas keagamaan tersebut dimungkinkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya pemeliharaan kerukunan, namun tidak menutup kemungkinan adanya kelompok/Ormas keagamaan yang tidak memberikan kontribusi bahkan justru menimbulkan konflik di kalangan umat beragama. Keadaan demikian memotivasi Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan penelitian untuk mengetahui kontribusi peran kelompok atau Ormas keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di berbagai daerah.

B. Permasalahan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah "bagaimana peran kelompok keagamaan di berbagai daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama". Secara rinci, penelitian ini akan mengungkap beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana profil kelompok keagamaan yang menjadi sasaran/fokus kajian (meliputi: latar belakang dibentuknya kelompok keagamaan, kapan berdiri dan siapa pendirinya,

tujuan dibentuk, kepengurusan dan keanggotaan, latarbelakang pendidikannya, serta pandangan para pimpinan kelompok keagamaan di atas tentang kerukunan);
2. Apa saja program kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan, serta bagaimana realisasinya (khususnya kegiatan terkait pemeliharaan kerukunan);
3. Apa saja hambatan yang dialami dalam upaya pemeliharaan kerukunan dan bagaimana cara mengatasinya;
4. Bagaimana pandangan para tokoh agama, kelompok keagamaan lain dan Pemda setempat serta instansi terkait tentang peran kelompok keagamaan yang dikaji terhadap upaya pemeliharaan kerukunan.

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap:

1. Profil kelompok keagamaan yang dikaji;
2. Program kegiatan dan realisasinya, terutama program kegiatan terkait kerukunan;
3. Hambatan-hambatan yang dirasakan dan cara mengatasinya;
4. Pandangan para tokoh agama, kelompok keagamaan lain dan Pemda setempat tentang peran kelompok keagamaan yang dikaji terhadap upaya pemeliharaan kerukunan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

D. Kegunaan

Hasil penelitian ini berguna bagi Pimpinan Kementerian Agama sebagai bahan untuk menyusun kebijakan terkait peningkatan pemeliharaan kerukunan umat beragama, khususnya penyusunan revisi RUU Ormas

pengganti UU Keormasan. Selain itu juga sebagai bahan – yang *based on research*- bagi Ditjen-Ditjen Bimas terkait dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan Ormas keagamaan.

E. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Bentuk penelitiannya yaitu studi kasus. Karena studi kasus (*case study*) maka dalam pengumpulan data lebih mengutamakan keutuhan data (*wholeness*) obyek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi (J. Vredenbregt, 1983:38). Dalam konteks penelitian ini, obyek yang diteliti adalah peran kelompok keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan. Sedangkan subyek penelitian atau unit analisisnya yaitu kelompok keagamaan yang dijadikan sasaran penelitian (lihat Suharsimi Arikunto, 2002:121-122).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta pengamatan atau observasi.

Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan, terdiri atas unsur pimpinan/pengurus kelompok keagamaan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat Pemda setempat dan instansi terkait. Sekalipun dalam metode kualitatif peneliti merupakan instrument penelitian, namun sebagai panduan bagi para peneliti disusun pokok-pokok wawancara berupa pedoman wawancara yang harus dikembangkan sendiri oleh peneliti di lapangan sesuai permasalahan yang dikaji. Dengan demikian peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan jenis wawancara berencana (*standardized interview*) karena menggunakan pedoman wawancara yang telah direncanakan sebelumnya (Koentjaraningrat, 1983:138). Pengembangan pertanyaan wawancara oleh peneliti di

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

lapangan dimaksudkan untuk memperdalam informasi yang diperlukan dan pada dasarnya masih mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah dan terbitan lain serta dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun pengamatan/observasi dilakukan terhadap obyek-obyek yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengamatan/observasi yang dilakukan dapat berupa observasi formal maupun informal atau observasi partisipasi (J. Vredenbregt, 1983:72), sejauh hal itu dapat dilakukan. Dalam melakukan observasi partisipasi yang biasa disebut "pengamatan terlibat", untuk menghindari kemungkinan penampilan yang tidak sebenarnya/imitatif atau menimbulkan perubahan perilaku obyek/kegiatan yang diamati – sehubungan kehadiran peneliti- maka peneliti harus berusaha memperoleh kepercayaan penuh dari orang-orang yan menjadi sasaran penelitian. Demikian Koentjaraningrat (1983:119-120) dengan menyitir pendapat Whyte (1951).

Untuk memperoleh data yang akurat, pada menjelang akhir pengumpulan data lapangan para peneliti mengadakan *Focus Group Discussion* (*FGD*) dengan sejumlah narasumber/ informan yang terdiri atas unsur-unsur informan.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi/penafsiran. Ada tiga macam tujuan penafsiran data menurut Schaltzman dan Strauss (1973) -dalam kaitannya dengan penulisan hasil penelitian- sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong (2002), yaitu: deskripsi semata-mata, deskripsi analitik dan penyusunan teori substantif. Sesuai tujuan penelitian ini maka interpretasi/penafsiran data dilakukan untuk tujuan deskripsi analitik, mengembangkan kategori-

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang muncul dari data untuk memperoleh deskripsi atau pengertian baru (Lexy J. Moleong, 2002:197-198). Hasil interpretasi/penafsiran ini kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan hasil penelitian.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, draf laporan hasil penelitian yang telah disusun oleh para peneliti sesuai daerah penelitian masing-masing dibahas dalam forum Pra Seminar, kemudian seminar yang di antara para pesertanya terdiri atas unsur terkait dari luar Badan Litbang dan Diklat. Saran-saran dari para peserta seminar dijadikan oleh para peneliti yang bersangkutan sebagai bahan untuk memperbaiki draf laporan hasil Penelitian sehingga tersusun Laporan Hasil Penelitian.

Sebelum kegiatan penelitian lapangan dilakukan, diadakan Penjajagan Lapangan di delapan lokasi penelitian oleh masing-masing peneliti yang bersangkutan, untuk memastikan dan menentukan kelompok keagamaan yang akan diteliti sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait tentang rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Adapun kriteria kelompok keagamaan yang dijadikan fokus kajian yaitu:

(1) Terlihat marak/menonjol dalam aktivitas keagamaan dibanding dengan kelompok lain dalam agama yang sama;
(2) Berada di lingkungan masyarakat yang relatif heterogen dari segi agama.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di delapan kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda. Kabupaten/kota yang dijadikan lokus penelitian, diproyeksikan mewakili satu komunitas agama tertentu. Adapun pemilihan provinsi berikut kabupaten/kota sebagai lokus penelitian, selain didasarkan atas tingkat heterogenitas masyarakat dari segi agama, juga atas pertimbangan tingkat keharmonisan hubungan atau kerukunan umat beragama di provinsi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan penelitian ini dengan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu penelitian tentang Pemetaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia yang mengungkapkan "indeks kerukunan umat beragama" di berbagai provinsi di Indonesia. Kabupaten/kota dalam suatu wilayah provinsi dipilih, di samping didasarkan atas pertimbangan heterogenitas penduduk dari segi agama (relatif heterogen), ditengarai adanya kelompok umat beragama tertentuk yang mayoritas, yang selanjutnya dijadikan komunitas sasaran kajian.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Berdasarkan pertimbangan kriteria di atas, maka kedelapan provinsi dan kabupaten/kota berikut komunitas umat beragama yang dikaji adalah: (1) Kota Bandar Lampung- Prov. Lampung (Islam); (2) Kota Bandung Prov. Jawa Barat (Islam); (3) Kab. Bantul Prov. DIY (Islam); (4) Kab. Flores Timur- Prov. NTT (Katolik); (5) Kab. Badung- Prov. Bali (Hindu); (6) Kab. Singkawang- Prov. Kalimantan Barat (Khonghucu); (7) Kota Pangkal Pinang- Prov. Bangka Belitung (Buddha); dan (8) Kab. Manokwari- Prov. Papua Barat (Kristen).

G. Operasionalisasi Konsep

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dan menyamakan persepsi, ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan secara operasional. Beberapa istilah dimaksud berikut penjelasannya yaitu:

1. Peran (*role*): peran (*role*) berkaitan erat dengan status. Peran *(role)* atau peranan adalah merupakan dinamika dari status. Sedangkan status adalah merupakan kedudukan obyektif seseorang yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang tersebut. Kedua unsur -yaitu hak dan kewajiban- tersebut tidak ada artinya jika tidak dipergunakan/diperankan. Demikian Laurence Ross, H. (1963) dalam bukunya *"Perspectives on the Social Order"* sebagaimana dikutip Astrid S. Susanto (1983) dalam "Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial". Dengan demikian maka untuk mengetahui peran (*role*) suatu kelompok keagamaan dapat ditelusuri melalui realisasi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kelompok keagamaan yang bersangkutan, yang diperoleh secara melekat dengan statusnya.
2. Kelompok Keagamaan: para sosiolog beragam dalam mendefinisikan "kelompok" (*group*), antara lain:
   (a) Setiap kumpulan manusia secara fisik. Sebagian besar ahli sosiologi menyebutkan, kumpulan demikian adalah sekedar kolektivitas, tak memiliki ikatan kebersamaan, kecuali jarak fisik yang dekat;
   (b) Sejumlah orang yang memiliki persamaan ciri-ciri tertentu. Menurut devinisi ini, para orang tua, anak-anak, kaum pria, kaum wanita, para orang kaya, dsb. dapat disebut sebagai kelompok;

(c) Sejumlah orang yang memiliki pola interaksi yang terorganisasi dan terjadi secara berulang-ulang. Batasan ini tak termasuk pertemuan yang terjadi secara kebetulan dan bersifat sementara seperti kelompok antri di depan loket karcis;

(d) Setiap kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama mengenai keanggotaan dan saling berinteraksi. Devinisi ini lebih banyak dipergunakan para pengamat sosiologi dibanding dengan tiga devinisi sebelumnya.

(Paul B. Horton, Chester L. Hunt, Alih Bhs.: Aminuddin Ram, Tita Sobari, 1999:214-215).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan "kelompok keagamaan" dalam konteks penelitian ini yaitu: kumpulan orang-orang seagama yang memiliki kesadaran bersama untuk mencapai tujuan bersama di bidang keagamaan, para anggotanya terorganisasi dan saling melakukan interaksi serta ada rasa kebersamaan. Sebagai kumpulan orang-orang seagama, kelompok keagamaan biasanya tidak memiliki herarkhi kepemimpinan secara struktural dari pimpinan daerah hingga pimpinan pusat. Di antara kelompok keagamaan ada yang berupa gerakan sosial (*social movement*) di bidang keagamaan. Kelompok keagamaan seperti ini dalam konteks penelitian ini dapat menjadi fokus kajian.

3. Ormas Keagamaan: adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011:37). Organisasi –termasuk organisasi keagamaan-

biasanya memiliki hirarkhi kepemimpinan secara struktural dari pimpinan daerah sampai dengan pimpinan pusat.

4. Sekalipun antara konsep "kelompok keagamaan" dan "Ormas keagamaan" –berdasarkan definisi di atas ada perbedaan prinsipil- namun dalam konteks penelitian ini, "kelompok keagamaan" yang dimaksud dalam judul penelitian ini termasuk pula "Ormas" keagamaan.
5. Kerukunan umat beragama: adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011:36).
6. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang *pelayanan, pengaturan,* dan *pemberdayaan* umat beragama (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011:36). Dalam penelitian ini, keterlibatan pemeliharaan kerukunan kelompok keagamaan mengacu kepada tiga bidang di atas.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

H. Kerangka Pemikiran

Keberadaan suatu peran *(role)* sangat dipengaruhi oleh keberadaan status. Dengan kata lain, besar-kecilnya peran kelompok keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, sangat dipengaruhi oleh status yang dimiliki oleh kelompok keagamaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui status suatu kelompok keagamaan, dapat dilihat dari hak dan

kewajiban yang dimiliki kelompok keagamaan tersebut, yang tercermin dalam tujuan bersama yang telah disepakati oleh para anggotanya.

Bentuk-bentuk peran yang dimiliki lembaga keagamaan di atas –dengan demikian- sangat dipengaruhi oleh status masing-masing lembaga keagamaan. Status yang dimiliki oleh kelompok keagamaan di atas, biasanya dielaborasi berupa Program-program kegiatan. Realisasi program-program kegiatan itu akan dikaji dilapangan, meliputi antara lain: ada tidaknya kegiatan terkait upaya pemeliharaan kerukunan, jika ada di bidang apa saja (misalnya: bidang pelayanan, regulasi/peraturan, atau pemberdayaan umat beragama), kelompok/masyarakat sasaran program kegiatan, signifikansi realisasi program kegiatan terhadap pemeliharaan kerukunan, hambatan-hambatan yang dialami baik internal maupun eksternal, serta faktor pendukung upaya pemeliharaan kerukunan yang dilakukan kelompok keagamaan.

Dengan demikian maka peran kelompok keagamaan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat diketahui.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Profil kelompok keagamaan diungkap, untuk mengetahui kondisi internal kelompok keagamaan obyek penelitian, karena akan mempengaruhi kualitas dan bentuk partisipasi pemeliharaan kerukunan yang dilakukan. Sedangkan pandangan kelompok keagamaan lain maupun tokoh masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemeliharaan kerukunan yang dilakukan oleh kelompok keagamaan yang dikaji, hal itu dilakukan antara lain untuk memperolehi data yang akurat, selain dilakukan melalui FGD.

I. Waktu, Tim Pelaksana dan Biaya Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan alokasi waktu selama 6 bulan, mulai Bulan Maret s/d Agustus 2013.

Penelitian dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang ditunjuk melalui SK Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Adapun biaya kegiatan penelitiannya menggunakan anggaran DIPA Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2013.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. Keduabelas, Edisi Revisi v.

Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011, Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan.

Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia, Cet. v, Edisi yang Disempurnakan.

Moleong, Lexy, J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ketujuhbelas.

Sunarto, Kamanto, 1993, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Susanto, Astrid, S., 1983, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Penerbit Binacipta, Cet. Keempat, Edisi Baru.

Tanribali, L., A., 2010, *Direktori Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba Lainnya*, Jakarta, Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Vredenbregt, J., 1983, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PERAN ORANG MUDA KATOLIK (OMK) PAROKI SANTA MARIA ASSUMPTA KOTA BARU JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II, DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Oleh: H. Bashori A. Hakim

A. Gambaran Umum Kota Kupang

1. Letak Kota Kupang dan Pembagian Wilayah

Kota Kupang terletak di bagian Tenggara wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Batas-batas wilayahnya, sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang, sebelah Timur, Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Luas wilayahnya 165,34 km2, secara administratif terbagi menjadi 6 kecamatan, 51 kelurahan, 419 Rukun Warga (RW) dan 1.286 Rukun Tetangga (RT). Keenam kecamatan dimaksud adalah: Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo, Kota Raja, Kelapa Lima dan Kecamatan Kota Lama. Kecamatan Alak memiliki wilayah paling luas, yakni 70,40 km2, kemudian Kecamatan Maulafa 55,67 km2. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kota Lama yakni 3,05 km2 dan Kecamatan Kota Raja dengan luas wilayah 6,19 km2.

Dari 51 kelurahan di atas, 12 kelurahan terdapat di Kecamatan Alak. Dengan jumlah kelurahan tersebut maka Kecamatan Alak terbagai dalam wilayah kelurahan paling banyak, kemudian menyusul Kecamatan Kota Lama yang terbagi menjadi 10 kelurahan dan Kecamatan Maulafa terbagi menjadi 9 kelurahan. Kecamatan Kelapa Lima memiliki kelurahan paling sedikit, yakni hanya terbagi

menjadi 5 kelurahan (Diolah dari Data BPS Kota Kupang, 2012:30-31,50).

2. Jumlah Penduduk dan Persebarannya

Jumlah penduduk Kota Kupang –berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2011- mencapai 349.344 jiwa, terdiri atas laki-laki 179.323 jiwa dan perempuan 170.021 jiwa. Persebaran penduduk di setiap kecamatan cenderung hampir merata, sekalipun ada konsentrasi-konsentrasi sebaran di kecamatan- kecamatan tertentu seperti di Kecamatan Oebobo yang jumlah penduduknya paling banyak yakni mencapai 82.718 jiwa dan Kecamatan Maulafa dengan jumlah penduduk 68.630 jiwa. Sementara itu Kecamatan Kota Lama berpenduduk paling sedikit yakni 31.349 jiwa. Sekalipun Kecamatan Oebobo berpenduduk paling banyak namun tidak serta-merta mengindikasikan penduduknya paling padat, karena hal itu terkait dengan luas wilayah masing-masing kecamatan. Kecamatan Kota Lama yang luas wilayahnya hanya mencapai 3,05 km2 dan berpenduduk paling sedikit dibanding dengan kecamatan lain, ternyata tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi yakni 10.089 jiwa per km2. Sedangkan Kecamatan Oebobo yang berpenduduk paling banyak, tingkat kepadatan penduduknya hanya mencapai 5.516 jiwa per km2

Adapun pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan cenderung hampir sama yakni 3,8 % dan hanya Kecamatan Maulafa yang mencapai 4,2 % (Diolah dari Data BPS Kota Kupang, 2012:49-51).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

3. Kehidupan Ekonomi dan Pendidikan

Kehidupan ekonomi penduduk Kota Kupang ditandai oleh pekerjaan dan matapencaharian mereka yang beragam. Di antara mereka ada yang bekerja di sektor: pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan pariwisata, perindustrian, pemerintahan/pegawai negeri, usaha dan jasa. Dari sektor pertanian dihasilkan antara lain: padi, jagung, kedelai, kacang tanah/hijau dan ubi kayu/jalar. Dari sektor perkebunan dihasilkan antara lain kelapa dan tembakau. Dari sektor peternakan antara lain: ternak sapi, kerbau, kambing, babi dan ayam.

Di bidang pendidikan, kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap pendidikan ditengarai antara lain oleh keberadaan berbagai jenis sekolah terutama sekolah swasta di setiap jenjang pendidikan, mulai Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi. Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdapat tidak kurang dari 17 sekolah swasta. Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdapat 18 Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta dan 13 Sekolah Menengah Kejuruan Swasta. Untuk tingkat perguruan tinggi terdapat setidaknya 18 Perguruan Tinggi Swasta dengan berbagai fakultas dan jurusan. Lembaga-lembaga pendidikan di atas tersebar di berbagai kecamatan di Kota Kupang (Disarikan dari Data BPS Kota Kupang, 2012:126-139).

4. Kehidupan Keagamaan

Mencermati sepintas tentang awal keberadaan agama-agama di Provinsi NTT, menurut Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada Acara Dialog dalam Kongres II FKUB-NTT tanggal 2-4 Mei 2011 di Kupang, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka NTT sudah menjadi daerah

pengembangan misi Katolik dan zending Kristen sedangkan Islam dan Hindu masuk setelah masa kemerdekaan. Alur persebarannya, Islam masuk dari Bima, Makassar dan Ternate sedangkan Katolik dan Kristen dari Batavia (Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dalam Bernas, Edisi Tahun II, No. 7, Januari-Maret, 2012:34-35). Dengan demikian maka agama yang dipeluk penduduk Kota Kupang – sebagaimana penduduk di kota-kota lain di Indonesia- relatif beragam. Keenam agama yang mendapat pelayanan dari pemerintah – dalam hal ini Kementerian Agama RI- terdapat di Kota Kupang, dengan varian jumlah yang beragam pula. Hanya saja keberadaan umat Khonghucu belum terdata sebagaimana agama lain sehingga jumlah pemeluknya belum diketahui secara pasti.

Dilihat dari segi jumlah, agama Kristen menempati posisi mayoritas, yakni 216.768 jiwa. Posisi mayoritas kedua yaitu agama Katolik dengan jumlah 76.119 jiwa, kemudian agama Islam menempati posisi ketiga dengan jumlah 49.999 jiwa . Selebihnya terdiri atas umat Hindu dan Buddha. Posisi jumlah mayoritas di tingkat Kota Kupang tersebut tidak serta-merta mayoritas pula di setiap kecamatan. Di Kecamatan Kelapa Lima misalnya, jumlah umat Kristen tidak mayoritas dan yang jumlahnya mayoritas adalah umat Katolik. Di Kecamatan Alak dan Kecamatan Kota Lama jumlah umat Islam lebih banyak dibanding dengan umat Katolik (Diolah dari Data BPS Kota Kupang, 2012:197).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Adapun jumlah pemeluk masing-masing agama di tiap kecamatan secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kota Kupang
Tahun 2011 *)

Agama	Kecamatan						
	Alak	Maulafa	Oebobo	Kota Raja	Kelapa Lima	Kota Lama	Kota Kupa
1	2	3	4	5	6	7	8
Islam	9950	6133	11109	6219	9304	7284	49999
Katolik	4608	17673	17631	14541	15066	6600	76119
Kristen	38066	43106	64139	15789	6411	49257	216768
Hindu	740	1326	1773	1149	226	1193	6407
Buddha	21	10	14	6	-	-	51
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	53385	68248	94666	37704	31007	64334	349344

*) Data BPS Kota Kupang, 2012:197.

Kehidupan keagamaan penduduk diwarnai oleh kegiatan keagamaan masing-masing umat beragama. Masing-masing umat beragama menjadikan rumah ibadat mereka sebagai sentra kegiatan keagamaan. Perbandingan jumlah rumah ibadat masing-masing agama cenderung berbanding lurus dengan jumlah umat masing-masing agama. Artinya, jumlah rumah ibadat umat Kristen jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah rumah ibadat umat Katolik maupun umat Islam dan umat Hindu, karena jumlah umat Kristen lebih banyak dibanding dengan jumlah umat ketiga agama tersebut. Sementara itu umat Buddha belum memiliki rumah ibadat di Kota Kupang lantaran jumlah mereka relatif terbatas. Untuk melaksanakan peribadatan di vihara, mereka bergabung dengan umat Buddha lain yang terdapat viharanya di luar Kota Kupang.

Berdasarkan data BPS Kota Kupang Tahun 2012, rumah ibadat umat Kristen, Katolik dan umat Islam terdapat di tiap kecamatan, sedangkan rumah ibadat umat Hindu hanya terdapat di 4 kecamatan. Di 2 kecamatan lainnya yakni Kecamatan Kota Raja dan Kelapa Lima tidak terdapat rumah ibadat umat Hindu sekalipun di 2 kecamatan tersebut terdapat umat Hindu relatif banyak, terlebih di Kecamatan Kota Raja yang jumlah umatnya mencapai 1.149 jiwa. Hal ini menunjukkan belum meratanya pengadaan rumah ibadat di Kota Kupang.

Jumlah rumah ibadat masing-masing agama di tiap kecamatan secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Banyaknya Rumah Ibadat
Menurut Kecamatan di Kota Kupang
Tahun 2012 **)

Agama	Kecamatan						
	Alak	Maulafa	Oebobo	Kota Raja	Kelapa Lima	Kota Lama	Kota Kupan
1	2	3	4	5	6	7	8
Islam	18	6	4	7	7	7	49
Kristen	46	50	33	19	24	11	183
Katolik	4	10	2	2	7	2	27
Hindu	2	2	1	-	-	1	6
Buddha	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah	70	68	40	28	38	21	265

**) Data BPS Kota Kupang, 2012:198.

Data rumah ibadat dari BPS di atas berbeda dengan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB dalam tahun yang sama. Menurut data Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi NTB, jumlah rumah ibadat umat Kristen di Kota Kupang jauh lebih banyak dibanding dengan data BPS, yakni mencapai 232 gereja. Demikian pula data rumah ibadat umat Islam dan Katolik terdapat selisih jumlah namun tidak terlalu signifikan. Jumlah rumah ibadat umat Katolik di Kota Kupang berjumlah 25 gereja, sedangkan jumlah rumah ibadat umat Islam sebanyak 50 masjid (Kantor Kanwil Kemenag Prov. NTT., 2012) Perbedaan data jumlah rumah ibadat beberapa agama di atas mengindikasikan kekurang-cermatan di antara kedua instansi tersebut dalam melakukan pendataan rumah ibadat.

Untuk kelangsungan peribadatan dan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para pemeluknya, keberadaan para pimpinan agama dan rohaniawan masing-masing agama merupakan suatu keniscayaan. Bahkan eksistensi suatu agama dalam kehidupan umat beragama sangat dipengaruhi oleh peran para pimpinan agama/ rohaniawan masing-masing agama. Untuk menjadi pimpinan agama atau seorang rohaniawan, panguasaan dan keluasan pengetahuan agama merupakan kriteria yang harus dimiliki. Oleh karena itu maka tidak banyak yang menjadi pimpinan agama/rohaniawan suatu agama.

Dalam kaitannya dengan pimpinan agama/ rohaniawan di atas, masing-masing agama di Kota Kupang memiliki pimpinan agama/rohaniawan yang tersebar di setiap kecamatan, kecuali agama Hindu dan Budha. Rohaniawan Hindu terdapat di 4 kecamatan sedangkan umat Buddha belum memiliki tenaga rohaniawan.

Jumlah pimpinan agama/rohaniawan masing-masing agama di setiap kecamatan dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Banyaknya Pimpinan Agama/Rohaniawan Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2012

Agama	Kecamatan						
	Alak	Maulafa	Oebobo	Kota Raja	Kelapa Lima	Kota Lama	Kota Kupang
1	2	3	4	5	6	7	8
Islam	13	4	4	8	2	6	3
Kristen	53	49	42	18	19	7	188
Katolik	1	8	3	2	4	1	1
Hindu	1	3	1	-	6	-	1
Buddha	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	68	64	50	28	31	14	255

***) Data BPS Kota Kupang, 2012:199

Meskipun agama yang dipeluk penduduk Kota Kupang beragam dengan jumlah yang cukup berfariasi, tetapi kerukunan antarumat beragamanya terlihat harmonis. Hal ini disebabkan antara lain adanya kepedulian Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun Kota Kupang - termasuk Kantor Kementerian Agama Kota Kupang- terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sebagai contoh, Kantor Kementerian Agama Kota Kupang dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, salah satu misinya adalah "Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beagama". Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT dalam upaya membangun kerukunan masyarakat NTT yang multikultural dan multireligius mempunyai visi "Masyarakat Beragama yang Sungguh BERNAS: Beriman, Cerdas, Rukun dan Sejahtera". Untuk mewujudkan masyarakat demikian,

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT berupaya membuka ruang bagi lembaga-lembaga agama untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas kerukunan antarumat beragama (Bernas, Edisi 01 Tahun II, No. 7, Januari-Maret 2012:36).

Selain upaya-upaya yang dicanangkan Pemerintah Daerah di atas, peran masing-masing komunitas agama dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Kupang tidak dapat diabaikan. Terdapatnya kelompok-kelompok keagamaan yang memiliki program-program kerukunan sebagaimana yang terdapat dalam komunitas agama Katolik, mengindikasikan adanya peran kelompok-kelompok keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Kupang.

Meskipun kondisi kerukunan antarumat beragama di Kota Kupang terlihat kondusif berkat antara lain kepedulian Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama maupun umat beragama melalui kelompok-kelompok keagamaan, namun bukan berarti di Kota Kupang terbebas dari kasus konflik yang melibatkan umat beragama. Konflik yang terjadi pada dasarnya disebabkan oleh faktor non agama. Karena itu maka Gubernur NTT mengharapkan FKUB-NTT membantu Pemerintah agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh oknum- oknum tertentu yang ingin mengganggu keharmonisan kerukunan umat beragam di NTT (Guberbur NTT Frans Lebu Raya, 2012:35). Adapun konflik sosial bernuansa agama yang pernah terjadi di Kota Kupang antara lain: pada tahun 1998 pernah timbul kerusuhan sehubungan adanya isu dari luar akan adanya pembakaran rumah ibadat baik masjid maupun gereja, namun hal itu tidak terbukti. Kasus kerusuhan itu yang

disebut para tokoh agama sebagai imbas dari kasus kerusuhan Ambon; sekitar tahun 1990-an terjadi kasus yang dianggap oleh sementara kalangan tokoh Katolik sebagai penodaan agama, dikenal sebagai kasus Hostia Kudus. Kasus penodaan Hostia Kudus yang serupa berulang terjadi pada tahun 2011, namun segera dapat diatasi oleh pemerintah setempat bersama para tokoh agama terkait secara internal. Selain itu pernah pula ada kasus pembangunan masjid di Batakte pada tahun 2011 yang lalu.

B. Orang Muda Katolik (OMK) Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, jl. Perintis Kemerdekaan II, Kota Kupang dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

1. Identifikasi

Kelompok keagamaan OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kota Kupang telah ada sejak sekitar tahun 2000 –an, yang pada awal berdirinya bernama Muda-Mudi Katolik (MUDIKA). Di Kota Kupang terdapat 7 Paroki, salahsatunya adalah Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru. Sebagaimana telah diutarakan, pada awal keberadaannya, kelompok keagamaan Katolik ini bernama Muda-Mudi Katolik (MUDIKA). Namun dalam perkembangan selanjutnya setelah dilakukan evaluasi oleh para pengurus dan para tokoh agama Katolik terkait, nama tersebut dianggap tidak aspiratif dan tidak tepat karena hanya menampung golongan muda-mudi dari kalangan umat Katolik, terutama yang aktif saja. Pada hal kelompok keagamaan tersebut diharapkan dapat pula menampung orang-orang Katolik yang berjiwa muda serta orang-orang Katolik yang kurang aktif, sekalipun umur mereka sudah

tidak lagi tergolong muda. Kemudian, atas saran dan rekomendasi dari KWI di Jakarta ketika itu, ide dan gagasan tersebut dinilai bagus, namun konsekuensinya nama MUDIKA diganti dengan Orang Muda Katolik (OMK). Pergantian nama kelompok keagamaan itu terjadi pada sekitar tahun 2007. Kini nama OMK secara regional telah ada di setiap keuskupan di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara.

Ketika OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru masih bernama MUDIKA, di antara kegiatan yang dilakukan adalah olah raga berupa bola volley yang diadakan di lokasi dekat Gereja Santa Maria Assumpta, sehingga sementara kalangan umat Katolik yang mengikuti kegiatan misa di gereja tersebut merasa terganggu sehubungan adanya kegiatan olah raga tersebut. Karena dinilai mengganggu dan mengurangi kehidmatan kegiatan peribadatan di Gereja Santa Maria Assumpta maka kegiatan olahraga di atas kurang mendapat dukungan dari para Pastur di gereja tersebut. Akibatnya kegiatan olahraga terhenti beberapa tahun. Kemudian, baru pada tahun 2007 setelah memperoleh dukungan kembali dari para Pastur maka mulailah OMK Paroki Santa Maria Assumpta mengadakan aktifitas olahraga kembali.

Adapun latar belakang didirikannya kelompok keagamaan Katolik di atas, didasari oleh pemikiran antara lain bahwa para muda-mudi Katolik merupakan tulang punggung gereja untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di gereja, sekaligus selaku ujung tombak gereja. Menyadari hal itu maka para generasi muda Katolik perlu dikordinasikan dalam suatu wadah , sekaligus untuk mempermudah koordinasi dan konsolidasi serta untuk mempererat hubungan persaudaraan, menjalin cinta kasih

dengan sesama anak muda Katolik dari gereja lain dalam satu paroki.

Kepengurusan OMK ketika masih bernama MUDIKA, terdiri atas: ketua, wakil ketua, sekretaris, seksi liturgi, seksi minat dan bakat, serta seksi usaha/dana. Figur-figur yang pernah menjadi pengurus saat itu kemudian dinilai sebagai para perintis awal keberadaan OMK di atas.

Anggota pengurus OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru terdiri atas perwakilan dari 14 OMK Wilayah yang ada di Paroki. Masing-masing OMK Wilayah terdiri atas beberapa OMK Kelompok Umat Basis (KUB). Di Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru terdapat 64 OMK Kelompok Umat Basis (KUB).

Adapun jumlah anggota yang tergabung dalam OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru mencapai 535 anggota aktif. Apabila ditambah dengan anggota tidak aktif maka mencapai lebih dari 1.000 anggota.

Untuk memperlancar realisasi program kerja yang telah dicanangkan, OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru memiliki jaringan kerja, baik dari kalangan internal maupun dengan kalangan eksternal. Jaringan kerja dari kalangan internal antara lain: OMK Wilayah, OMK se Keuskupan Agung Kupang, dan jemaat Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru secara individual. Sedangkan jaringan kerja secara eksternal antara lain: instansi pemerintah Kota Kupang, unsur anggota DPRD Kota Kupang, LSM seperti Yayasan Purnama Kasih, lembaga perbankan seperti: Bank Sinar Mas Kupang, serta Koperasi Kredit (Kopdit) Assumpta.

2. Program Kegiatan Terkait Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Di antara program kegiatan terkait pemeliharaan

kerukunan umat beragama di Kota Kupang yang dilakukan oleh OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru yakni:

(a) Diskusi berkala yang dilaksanakan oleh kelompok diskusi "Dari Katong untuk Katong". Di antara materi diskusi yangdiangkat misalnya: tentang pergaulan bebas, sex bebas, narkoba dan isu Sara;

(b) Diskusi dengan thema "Bahaya isu Sara" dilakukan pada tahun 2004 dalam rangka menyongsong Pemilu 2004 ketika itu. Diskusi dilaksanakan dengan mengundang kalangan internal anggota OMK;

(c) Pentas Seni Pemuda Lintas Agama, diadakan pada awal tahun 2006. Dalam kegiatan diskusi ini pihak OMK Paroki Santa Maria Assumpta bertindak selaku fasilitator, yang menginisiasi. Sedangkan kepanitiaannya terdiri atas perwakilan dari semua unsur Pemuda Lintas Agama. Peserta diskusi terdiri atas perwakilan dari semua unsur Pemuda Lintas Agama se wilayah daratan Timor Tengah Selatan (TTS), dilaksanakan selama tiga hari, dengan rincian dua hari acara seminar dan sehari acara pentas seni. Di antara materi diskusi yang diusung yaitu tentang kerukunan umat beragama;

(d) Pentas seni Anak-anak Lintas Agama, iselenggarakan pada tahun 2007. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat tertanam rasa persaudaraan para generasi muda bangsa sejak dini. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan;

(e) Ikut berpartisipasi menjadi panitia Natal Bersama Pemuda Kristen pada tahun
2010, diselenggarakan di Gereja Santa Maria Assumpta Kota Kupang;

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

(f) Ikut serta dalam pertemuan yang diselengarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, dengan agenda rapat untuk mencari solusi penyelesaian kasus pembangunan masjid di Batakte, Kota Kupang pada tahun
2011;

(g) Menyelenggarakan Assumpta Cup, dengan mengadakan pertandingan futsal yang diikuti oleh klub-klub futsal pemuda lintas agama. Kegiatan yang rencananya akan diadakan secara rutin tiap tahun ini diselenggarakan pertama kali pada tahun 2012 di Kota Kupang;

(h) Kerjasama dengan Pemuda Anshor Kota Kupang di bidang keamanan dan perparkiran pada waktu Perayaan Paskah. Kegiatan ini mulai diadakan sejak tahun 2012. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan di kalangan para pemuda lintas agama di Kota Kupang.

3. Hambatan dan dukungan dalam upaya pemeliharaan kerukunan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, pada dasarnya OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru tidak merasakan adanya hambatan yang berarti. Hanya saja dirasakan kurang adanya koordinasi antar ormas maupun kelompok lintas agama, yang mengakibatkan kurang lancarnya komunikasi. Selain itu dirasakan kurang kaderisasi pengurus OMK Paroki Santa Maria Assumpta secara berkesinambungan sehingga dirasakan program-program kegiatan yang pada tahun sebelumnya terlaksana dengan baik, pada tahun berikutnya terasa kurang lancar. Kurang dipahaminya dunia muda-mudi oleh sementara para orang tua, juga dirasakan sebagai faktor penghambat di

antara program-program OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru.

Sedangkan di antara faktor pendukungnya adalah: budaya masyarakat Kupang yang memandang perbedaan agama bukanlah hal yang dipermasalahkan, adanya respon positip dari kalangan pemuda dari agama lain terhadap program-program yang diselenggarakan OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang, serta adanya kepedulian secara proaktif dari unsur pemda dan instansi terkait di Kota Kupang terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang.

C. ANALISIS

Dilihat dari segi latar belakang keberadaan kelompok OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang, kelompok keagamaan ini terbentuk sebagai upaya dalam mengakomodir dan merespon keinginan para orang tua Katolik berjiwa muda yang ingin ikut serta berperan aktif bersama kaum muda Katolik dalam kegiatan keagamaan. Atas pertimbangan keinginan dari para orang tua Katolik yang berjiwa muda itu maka perkumpulan anak-anak muda Katolik di Kupang yang semula bernama kelompok Muda-Mudi Katolik (MUDIKA) yang ada sejak tahun 2000, berganti nama menjadi Orang Muda Katolik (OMK) Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang.

Mencermati sejarah dan proses timbulnya OMK Kota Kupang di atas maka keberadaannya secara alami, berdasarkan aspirasi dari umat Katolik Kota Kupang secara bottom up. Karena terbentuknya berdasarkan aspirasi dari bawah maka keberadaan OMK Paroki Santa Maria Assumpta hingga saat penelitian ini dilakukan tetap eksis. Para anggota

pengurusnya yang terdiri atas perwakilan dari 14 OMK Wilayah yang ada di Paroki, menjadikan OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang semakin eksis dalam mengaktualisasikan dan merealisasikan program-programnya dalam berbagai kegiatan keagamaan, terlebih kegiatan dalam upaya pemeliharaan kerukun an umat beragama.

Bergantinya nama kelompok keagamaan yakni dari MUDIKA menjadi OMK sehubungan keikutsertaan para orang tua Katolik yang berjiwa muda bergabung dalam kelompok keagamaan ini, menimbulkan terjadinya pergeseran orientasi program keagamaan yang dilakukan. Dalam kaitan ini tidak salah jika dikatakan bahwa kehadiran para orang tua Katolik berjiwa muda, bergabung ikutserta dalam kelompok keagamaan OMK, menjadikan OMK mendapatkan semacam pencerahan dalam mengembangkan program-program kegiatan terutama kegiatan yang melibatkan kelompok lintas agama dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Apabila pada waktu sebelum para orang tua Katolik yang berjiwa muda bergabung -yakni pada waktu kelompok keagamaan ini masih bernama MUDIKA- kegiatan yang dilakukan hanya terbatas di bidang olahraga dan belum banyak mengikutsertakan kelompok keagamaan lintas agama, maka setelah para orang tua Katolik yang berjiwa muda ikut bergabung –dan nama kelompok keagamaannya berganti menjadi OMK-, jenis kegiatan dan aktivitas- aktivitas nya semakin beragam dengan mengikutsertakan pemuda lintas agama. Melalui berbagai program kegiatan yang tidak hanya di bidang olahraga, tetapi juga bidang budaya/seni, sosial, keagamaan dan keamanan dengan mengiktsertakan pemuda lin tas agama tersebut, menjadikan OMK Paroki

Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang semakin berperan dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Kupang.

Sebagai kelompok keagamaan yang para pengurusnya pada umumnya terdiri atas para generasi muda dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pemuda lintas agama, kelompok OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya sudah barang tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal, di samping ada faktor pendukung. Hambatan internal maupun eksternal, betapapun, dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang yang ada yakni berupa respon positif dari kalangan Pemda Kota Kupang dan instansi terkait serta para tokoh agama setempat dengan melakukan sinergi untuk mengatasi hambatan yang dirasakan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

(a) Keberadaan kelompok Orang Muda Katolik (OMK) Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, di Jl. Perintis Kemerdekaan II, Kota Kupang, sebagai jawaban atas kebutuhan umat Katolik di wilayah Kupang, tidak hanya dari golongan anak-anak muda Katolik tetapi juga para orang tua Katolik yang berjiwa muda. Kelompok ini dibentuk dalam upaya mengakomodir aspirasi para orang tua Katolik yang berjiwa muda yang ingin bergabung dengan kelompok muda Katolik dalam kegiatan keagamaan. Cikal-bakal kelompok ini adalah

Muda Mudi Katolik (MUDIKA) yang keberadaannya sejak tahun 2000 an.

(b) Latarbelakang berdirinya kelompok keagamaan di atas didasari pemikiran bahwa para muda-mudi Katolik merupakan tulang punggung gereja untuk membantu kegiatan keagamaan di gereja, maka perlu dikoordinasikan dalam suatu wadah untuk mempermudah konsolidasi, di samping untuk mempererat persaudaraan dan menjalin cintakasih antar sesama anggota.

(c) Terdapat perubahan orientasi kegiatan yang signifikan yang dialami OMK dibanding ketika kelompok keagamaan ini masih bernama MUDIKA. Ketika masih bernama MUDIKA, kegiatan yang dilakukan terbatas hanya di bidang olahraga. Setelah berganti nama menjadi OMK, kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih berorientasi kepada upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama dengan melibatkan kelompok agama lain. Kegiatan yang dilakukan antara lain: diskusi-diskusi yang dalam topik bahasan tertentu mengundang kelompok agama lain, ikutserta dalam kepanitiaan hari besar keagamaan, mengadakan pentas seni lintas agama dalam momen-momen tertentu, pertandingan olahraga berupa Assumpta Cup dengan peserta pemuda lintas agama, serta kerjasama di bidang keamanan dan perparkiran dengan kelompok agama lain dalam momen hari besar keagamaan tertentu (Paskah).

(d) Sejauh ini belum terlihat keikutsertaan OMK dalam upaya penanganan konflik keagamaan, dalam arti ikut aktif ambil bagian dalam penanganan kasus konflik. Keikutsertaannya baru sebatas menghadiri undangan instansi yang mengadakan pertemuan membahas kasus konflik keagamaan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

(e) Dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, pada dasarnya tidak ada faktor penghambat yang dialami OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang, namun dalam pelaksanaan program-program kegiatan dirasakan kurang kaderisasi di kalangan internal pengurus dan anggota OMK, serta kurang koordinasi antar kelompok lintas agama sehingga komunikasi kurang lancar. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain: budaya masyarakat Kupang yang memandang perbedaan agama bukanlah hal yang dipermasalahkan, adanya respon positif dari pemuda lintas agama terhadap program-program/kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan OMK, serta sikap proaktif dari unsur Pemda Kupang instansi terkait dan para Pemuka Agama Katolik terhadap kegiatan-kegiatan lintas agama yang dilakukan OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang.

2. **Rekomendasi**

(a) Untuk lebih meningkatkan upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, yang dilakukan oleh OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang, kiranya Kantor Kementerian Agama Kota Kupang dapat membantu melakukan koordinasi dan memotivasi agar OMK mengikutsertakan semua kelompok keagamaan yang ada di Kota Kupang dalam berbagai jenis kegiatan lintas agama yang diselenggarakan dengan mengindahkan aturan-aturan prinsip ajaran masing-masing agama.

(b) Untuk memperlancar komunikasi antar kelompok keagamaan lintas agama, diharapkan Pihak Kantor Kementerian Agama Kota Kupang menginisiasi

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

melakukan mediasi untuk dilakukan pertemuan berkala atau rutin antar kelompok lintas agama.

(c) Dalam pengatasi sikap sementara para orang tua yang kurang memahami dunia muda-mudi, kiranya kelompok OMK Paroki Santa Maria Assumpta diwakili oleh para pengurusnya dapat melakukan pendekatan secara persuasif kepada para orang tua dimaksud untuk menjelaskan berbagai program, ide dan gagasan OMK yang belum dipahami. Dalam kaitan ini, sering berkunjung kepada orang tua akan dapat mencairkan permasalahan muda-mudi yang kurang dimengerti oleh orang tua.

(d) Terkait dengan kurangnya kaderisasi pengurus maupun anggota OMK Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru, Kota Kupang, kiranya Kantor Kementerian Agama Kota Kupang bekerjasama dengan Pemda Kota Kupang dan para tokoh agama Katolik secara sinergis melakukan pendampingan kepada OMK untuk mengadakan pembinaan kader melalui misalnya pelatihan kepemimpinan atau kursus manajemen kepemimpinan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, Cet. Keduabelas, Edisi Revisi V.

Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011, *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya*,

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, 2012, *Kota Kupang Dalam Angka*, Kupang *Infigures*, Kerjasama Bappeda dan BPS Kota Kupang, Kupang.

BERNAS, 2012, *Formalisme Agama: Tantangan Berat Dalam Kehidupan Beragama*, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT., Cikal Imaji – Kupang, Edisi 01 Tahun II, Nomor 7, Januari-Maret 2012, Kupang.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, 2012, Data Keagamaan Provinsi NTB, Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Kupang.

Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, 2012, Data Keagamaan Kota Kupang, Kantor

Kemenag Kota Kupang, Kupang.

Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia, Cet. V, Edisi yang Disempurnakan.

Moleong, Lexy, J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ketujuh belas.

Sunarto, Kamanto, 1993, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Susanto, Astrid, S., 1983, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Binacipta, Cet. Keempat, Edisi Baru.

Vredenbregt, J., 1983, *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta PT. Gramedia.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

III
PERAN ALIRAN BUDDHA CITRA MAITREYA DAN KUMALA BODHI DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh: H. M. Yusuf Asry

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Geografi dan Demografi

Pangkalpinang, ibukota provinsi sekaligus sebuah kota dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Secara keseluruhan tercatat 470 pulau, dan baru sekitar 50 pulau (10.63%) dihuni oleh penduduk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk provinsi ini berjumlah 1.223.296 jiwa dan 311.145 rumah tangga.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk tanggal 21 November 2000, disahkan tanggal 09 Februari 2001 terletak di bagian Timur Pulau Sumatera yang bertetangga dan merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Dari segi administrasi pemerintahan terbagi atas 7 kabupaten/ kota, 36 kecamatan dan 326 desa/kelurahan.

Lokus penelitian ini di Kota Pangkalpinang merupakan kota terbesar dan teramai, serta tempat domisili Kantor Pusat PT Timah Tbk. Daerah ini berbatasan sebalah utara Kabupaten Bangka, sebelah selatan Kabupaten Bangka

Tengah, sebelah timur dengan Laut Cin a Selatan, dan sebalah barat dengan Kabupaten Bangka. Luasnya 105,67 Km2 terdiri atas 7 kecamatan, dan 42 kelurahan. Dihuni penduduk tahun 2011 sebanyak 189.910 jiwa terdiri dari 95.987 laki- laki (50.54%) dan 93.923 perempuan (49.46%)[ix].

Kondisi sosisal dan ekonomi. Dari segi sosial pada tahun 2011 terdapat pengangguran dalam jumlah relatif kecil yaitu 4.835 jiwa[x]. Mata pencaharian utama penduduk ialah pertanian, nelayan, industri pengolahan timah, perdagangan dan karyawan swasta, dan TNI/Polri[xi]. Jumlah pegawai negeri sipil daerah mencapai 1.558 orang.

Agama dan Kelompok Keagamaan. Pemeluk agama di Pangkalpinang pada tahun 2011 tercatat 208.115 jiwa dengan komposisi: 167.624 Islam (80.84%), 7.972 Katolik (3.83%), 7.497 Kristen (3.60%), 80 Hindu (0.038%), 16.303 Buddha (7.83 %), 8.403 Khonghucu (4.03%), dan lainnya 236 jiwa (0.083 %)[xii].

Rumah ibadat berjumlah 109 buah terdiri atas: 85 masjid (77.98%), 9 Gereja Kristen (8.25%), 2 Gereja Katolik (menurut Romo Agustinus Dwi Pambodo hanya 2 buah (1.75%), 9 vihara (8.25%), dan 4 kelenteng (3,66%)[xiii]

Organisasi kemasyarakatan (ormas) banyak ditemukan di Kota Pangkalpinang, termasuk organisasi keagamaan. Namun tidak semua organisasi keagamaan nasional ditemukan di daerah ini. Ormas yang terdaftar di Kantor Badan Kesbangpol dan Limas Kota Pangkalpinang pada bulan Desember 2012 sebanyak 30 buah. Setelah ditelusuri hanya 11 kelompok/yayasan keagamaan, dan 2 (dua) di antaranya ialah ormas Islam yaitu; Wanita Islam dan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam nasional

lainnya dan ormas keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu belum mendaftarkan diri. Termasuk Vihara Citra Maitreya dan Vihara Kumala Bodhi tidak terdaftar di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Pangkalpinang, tetapi tercatat di Kanwil Kemenag Provinsi Kapulauan Bangka Belitung.

B. PROFIL DAN PERAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN

1. Aliran Buddha Citra Maitreya

(a) Profil Singkat Aliran Buddha Citra Maitreya

Yayasan Maitreya Pangkalpinang didirikan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 1983 dengan Akte Notaris Nomor 430. Kemudian diperbaharui tanggal 02 Agustus 2010 dengan Akte Notaris Nomor 01. Pendiri Yayasan dan Vihara Maitreya ini ialah: Zonny, Suni Yanti, dan Bong Ke Tjong. Yayasan ini didirikan sebagai "payung" bagi Vihara Citra Maitreya Pangkalpinang. Sedangkan vihara merupakan wadah umat Buddha yang bertujuan agar mengamalkan ajaran agama Buddha. Ruang lingkup kegiatannya meliputi bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.

Struktur kepengurusan Yayasan Citra Maitreya terdiri atas: Ketua Pembina dan Anggota dua orang, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dua orang,Bendahara, Ketua Pengawas dan Anggota dua orang.

Vihara Citra Maitreya berdiri tahun 1982, dan diresmikan tanggal 24 Maret 1983. Berawal dari kedatangan Sesepuh Cahaya Maitreya ke Pulau Bangka melihat banyak orang perlu mendapatkan ajaran agama Buddha. Kemudian dirintis pendirian vihara dengan

mengutus pandita Tan A Wi ke Pangkalpinang. Akhirnya berdirilah Vihara Citra Maitreya (Ming Ji Fo Tang) Pangkalpinang.

Dalam perjalanan vihara ini penuh perjuangan. Pandita Suni Yanti mendapat amanah mengembangkan vihara di Pulau Bangka sejak tahun 1982. Pada tahun 1998 vihara ini telah memiliki anggota mencapai lebih 8.000 orang sehingga tempat bhaktisala tidak lagi memadai terutama pada hari besar Ce It dan Cap Go. Karena itulah Pandita Suni Yanti bersama tokoh dan umat melakukan renovasi vihara menjadi 2 lantai dengan istana Lao Mu yang megah.

Pandita Suni Yanti memotori perkembangan vihara secara signifikan, baik jumlah umat maupun bangunan fisiknya. Demi kelanjutan pembangunan vihara, Pandita Suni Yanti menjual perhiasannya sebagai talangan dana pembangunan, bahkan sempat meminta bantuan kepada orang tuanya di Riau[xiv]. Pembangunan vihara dapat diselesaikan sebagai sentra bhakti puja, belajar membina diri dan berbuat kebajikan, dan diresmikan penggunaannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2003.

Pengurus Inti Vihara Citra Maitreya terdiri atas: Ketua satu orang dan komisi-komisi yakni Komisi Perintisan, Komisi pendidikan, Komisi Sosial dan Komisi Budaya. Ketua dan Komisi didukung oleh Sekertariat, yang terdiri atas: Administrasi dan Informasi, Personalia, Multimedia Internet Service dan Keuangan.

Jumlah umat Vihara Citra Maitreya Pangkalpinang yang meliputi 5 cabangnya, pada Mai 2013 mencapai 9.710 orang. Jumlah ini belum termasuk umat pada 16 Vihara Maitreya lainnya yaitu 5 cabang di Kabupaten Bangka, 3 cabang di Kabupaten Bangka Tengah, 2 cabang

di Kabupaten Bangka Selatan, dan 6 cabang di Kabupaten Bangka Barat.

(b) Peran Aliran Buddha Citra Maitreya dalam Pemeliharaan Kerukunan

Peran dalam pemeliharaan kerukunan yang dimaksud di sini ialah kerukunan antarumat beragama. Dalam kaitannya dengan upaya kerukunan, Vihara tidak menyebut program kerukunan secara eksplesit atau secara langsung dan khusus, tetapi secara implesit ditemukan aktivitas kerukunan dalam 5 bidang program dan kegiatan, yaitu: 1) pengembangan vihara, 2) pendidikan, 3) ritual, 4) sosial kemasyarakatan, dan 5) seni budaya.

Dalam bidang sosial dan kemanusiaan, Citra Maitreya menyelenggarakan bakti sosial, bantuan sosial dan donor darah. Bakti sosial dalam bentuk kerja bakti yang terbuka bagi semua warga tanpa memandang suku dan agamanya. Di sini tercipta kedekatan dan kerjasama antarpemeluk agama. Bantuan sosial diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan yang ditimpa musibah tanpa dibedakan atas suku dan agama. Bantuan sosial dalam bentuk paket sembako yang biasanya berisi: indomie, gula, minyak goreng, dan beras. Jumlahnya tergantung ketersediaan dana sumbangan dari umat dan para donator. Prioritas dibagikan pada warga sekitar vihara.

Bantuan sosial juga diberikan kepada warga yang tertimpa musibah kecelakaan atau bencana alam. Vihara pernah memberikan sumbangan sosial kemanusiaan bagi korban "tsunami" Aceh tahun 2004, dan bantuan kepada masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah pada saat dilanda gempa bumi. Bantuan sembako ini juga

diberikan kepada panti asuhan dan panti jompo. Di antaranya Panti Jompo di Engtai, Panti Jompo St. Anna di Selindung (Kristen), Panti Asuhan di Parit Lalang (Islam), Panti Asuhan Jln. Muntok (Islam), Panti Asuhan Jln. Kacang Pedang (Islam) dan Panti Asuhan di Pangkal Balam (Islam).

Menurut Pandita Suni Yanti, kegiatan bantuan sosial ini selain bersifat kemanusiaan juga diakui berdampak pada kedekatan masyarakat non Buddha sekitar vihara. Hal ini diprediksi mendekatkan masyarakat dengan umat Buddha, sekaligus menghindari peluang protes warga.

Kerja bhakti dilakukan oleh kelompok keagamaan Buddha Citra Maitreya terutama dalam rangka peringatan hari besar kenergaraan seperti peringatan ulang tahun Negara Republik Indonesia. Menurut Pandita Suni Yanti dalam kerjabakti ini adakalanya diikuti oleh umat lain, terutama umat Islam.

Donor darah dilakukan secara insidentil, dan biasanya dalam rangka memenuhi permintaan PMI. Hasilnya disumbangkan kepada yang memerlukan tanpa melihat latar belakang keyakinan dan agama. Menurut Pandita Suni Yanti, darah sumbangan warga Buddha Citra Maiteraya dari segi kualitas cukup baik, karena umumnya mengkonsumsi makanan diolah dari tumbuh-tumbuhan (vegetarian).

Selain itu, Citra Maitreya menyelenggarakan karnaval pada acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Kagiatan ini terbuka bagi etnis dan agama. Di sinilah tercipta interaksi sosial antarumat beragama yang mendukung kerukunan antarumat beragama.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Di bidang pendidikan, Anak Sekolah Minggu mencapai 100 anak, bersifat terbuka bagi non Buddha. Menerima siswa non Buddha tanpa keharusan mengikuti Pendidikan Agama Buddha. Ada murid non Buddha berjumlah lebih dari lima anak beragama Islam.

Di bidang seni dan olahraga, Citra Maitreya menyelenggarakan Tembang dan Senam Kasih Semesta. Lomba tembang kasih semesta dilakukan tiap tahun. Begitu pula senam kasih semesta terbuka bagi umat beragama lain. Melalui senam ini juga mempererat kerukunan antarumat beragama.

Semua aktivitas kerukunan tersebut pada dasarnya bersifat kemanusiaan tanpa motivasi penyiaran Buddha kepada mereka yang telah beragama. Tidak ada pemeluk agama lain masuk Buddha melalui kegiatan tersebut. Kalaupun ada pemeluk Islam atau lainnya masuk Buddha, karena kesadaran dan umumnya oleh perkawinan. Misalnya, Prihatiningsih asal Pati (Jawa Tengah). Nikah atas seijin orangtuanya. Sekalipun telah mendapatkan Surat Nikah, namun belum aktif ke vihara.

2. Vihara Kumala Bodhi

(a) Profil Singkat Vihara Kumala Bodhi

Kaberadaan Yayasan dan Vihara Kumala Bodhi berkaitan erat dengan peran seorang upasaka bernama Kumala Bodhi. Upasaka ini pernah belajar dari Pembimbing Bhikku Asin Jinarakkhita di Cipanas Jawa Barat. Pada tahun 1978, Kumala Bodhi kembali ke Pangkalpinang, dan merintis pendirian Citya Kubodhi di rumahnya. Cetya ini menjadi pusat penyebaran ajaran Buddha dengan pengikut pertama sekitar 20 orang. Pada

tahun 1979, Romo Kumala Bodhi bersama Romo Hema Bodhi merencanakan pembangunan vihara di atas lahan hibah Kumala Bodhi seluas 315m2.

Yayasan Metta Karuna didirikan sebagai "payung" bagi Vihara yang diketuai Erwan Bahar. Sedang vihara menjadi wadah umat Buddha mengamalkan ajaran agama Buddha.

Pada tahun 1980 Kumala Bodhi meninggal dunia, pembangunan vihara terus berjalan, dan selesai tahun1981. Pembimbing Bhikku Asin Jinarakkhita Thera memberi namanya dengan Vihara KumalaBodhi yang diresmikan oleh Walikota Pangkalpinang (H.M. Arub, SH) tanggal 14 September1986. Alamat Vihara Jln. Balai Desa No. 39 A Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui Pangkalpinang. Pada waktu ini yayasan dipimpin oleh Effendi selaku ketua dan sekretaris Kok Yun Cun.

Pada tahun 1997, nama yayasan disesuaikan dari Metta Karuna menjadi Yayasan Kumala Bodhi Pangkalpinang melalui Akte Notaris No. 04 tanggal 04 November 2009. Alamat Jln. Denpasar No. 5 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang .

Pada tanggal 4 November 2009 terjadi pergantian kepengurusan yayasan dari Bikkhu Sasanarakkhita Thera kepada Lugianto Hadi. Umat Kumala Bodhi terus bertambah sehingga bangunan yang ada tidak mampu menampung anggota terutama pada saat upara Waisak. Atas dasar itulah pada tanggal 21 Juni 2010 dilakukan pemugaran vihara menjadi 2 lantai, dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 9 Januari 2012 oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (H. Eko Maulana Ali).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Sruktur Pengurus puncak Yayasan dan Vihara Kumala Bodhi, masing-masing terdiri atas seorang Ketua dan seorang sekretaris. Dalam Vihara Kumala Bodhi terdapat sejumlah organisasi, yaitu: Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Kota Pangkalpinang yang diketuai dr. Rudi Ridwan, Wanita Buddhis Vihara Kumala Bodhi (WBVKB) yang diketuai Lina, Persaudaraan Muda-Mudi Vihara Komala Bodhi (PMMVKB) diketuai Nanto, dan Sekolah Minggu diketuai Metta Herliana. Vihara ini memiliki sebuah cetya di Gang Durian Pangkalpinang, memiliki anggota 400 orang.

(b) Peran Vihara Kumala Bodhi dalam Pemeliharaan Kerukanan

Vihara Kumala Bodhi memiliki peran dalam pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, yang tertuang dalam program-programnya. Hanya saja tidak dinyatakan secara eksplesit dalam program kegiatan secara khusus, tetapi dapat diketahui dari program dan kegiatan di 3 bidang, yaitu: 1) keagamaan, 2) sosial, dan 3) kemanusiaan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Ruang lingkup dan kegiatan dalam bidang keagamaan meliputi: pendirian rumah ibadat, penerimaan dan penyaluran dana dari anggota dan masyarakat, peningkatan pemahaman keagamaan, pelaksanaan syiar keagamaan, dan studi banding keagamaan. Di bidang sosial meliputi: pendirian panti asuhan, panti jompo dan panti wreda, rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium.

Bidang kemanusiaan dalam bentuk bantuan sosial kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, korban bencana alam, rumah singgah dan duka. Di bidang seni, budaya dan pendidikan terdiri atas:

pembentukan lembaga nonformal seperti Sekolah Minggu, keolahragaan dan penelitian bidang ilmu pengetahuan.

Aktivitas riil yang dilakukan oleh Kumala Bodhi, secara umum dapat dikelompokkan pada: sosial kemanusiaan, karya bakti, sosial keagamaan dan kebaktian, seni budaya dan pendidikan. Kegiatan sosial kemanusiaan ialah memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada mereka yang memerlukan. Paket sembako biasanya berisi antara lain indomie, gula, minyak goreng, dan beras, seharga sekitar Rp. 200,-. Jumlahnya tergantung ketersediaan dana sumbangan dari umat dan para donator, pernah mencapai 315 paket. Mekanisme penyampaiannya diberikan kartu untuk pengambilan bantuan tersebut agar tertib dan lancar.

Sasaran bantuan sosial ialah masyarakat sekitar vihara tanpa membedakan latar belakang etnis dan agamanya. Namun pernah juga paket bantuan sosial dibagikan pada warga yang menjangkau Kabupaten Bangka Tengah, dan bantuan kacamata pada masyarakat Kabupaten Bangka. Dalam rangka baksos pernah juga membagi kacamata gratis bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Pengobatan gratis bagi anggota. Karya bhakti membersihkan Taman Makam Pahlawan rutin tahun bagi makam tanpa melihat dari segi etnis dan agama.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kegiatan sosial keagamaan dan kebaktian ialah menyelenggarakan perayaan waisak yang juga diisi kegiatan perayaan oleh para pelajar dan lintas majelis. Kegiatan yang dominan ialah kebaktian yang terdiri atas: kebaktian umum, muda-mudi, hari besa metta, hari besar magha puja, hari besar waisak, hari besar ashada, hari

besar ulambama, hari besar khatina, kebaktian duka, kebaktian ulang tahun, dan kebaktian anjangsana ke rumah umat. Kegiatan seni dan budaya dalam bentuk kegiatan olah raga dan fangsen. Fangsen adalah pelepasan hewan ke alam bebas dengan diikuti atau disaksikan oleh berbagai pemeluk agama. Kegiataan tersebut bersentuhan dengan kerukunan antarumat beragama, Sekalipun masih minimal dan implesit, dan masih lebih bersifat insidental, karena tergantung pada sumbangan para donator.

C. PANDANGAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI BUDDHA CITRA MAITREYA DAN KUMALA BODHI DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN

1. Pandangan Masyarakat

Para narasumber pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Khonghucu secaraumum memandang kelompok keagamaan Buddha Citra Maitreya dan Kumala Bodhi dalam kaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama telah berpartisipasi sekalipun masih terbatas. Secara umum kelompok keagamaan Citra Maitreya nampak asik dan aktif dalam pembinaan internal keumatan. Dengan demikian aktivitas pemeliharaan kerukunan antarumat beragama belum menjadi prioritas aktivitas. Diakui, secara individual pimpinan vihara ini tidak aktif dalam FKUB.

Peran pemeliharaan kerukunan antarumat beragama oleh Citra Maitreya nampak lebih bersifat komunal dan terjadwal, tetapi tanpa menyebut kerukunan umat beragama. Misalnya pada aktivitas bakti sosial bersama masyarakat

berbagai agama, kerjabakti bersama, program donor darah untuk kemanusiaan, sosialisasi dan kegiatan bazar makanan vegetarian yang menarik partisipasi umat beragama lain.

Kumala Bodhi terkait peran kerukunan antarumat beragama lebih tampak bersifat individual dan sifatnya insidental. Secara perorangan tokoh komunitas ini ada yang berperan aktif dalam FKUB dan Forum Kerukunan Umat Beragama Peduli Kesejahteraan Keluarga. Hengkie aktivis vihara dan yayasan. Peran kerukunan telihat juga pada tradisi saling mengunjungi antarsuku dan agama pada hari hari-hari besar keagamaan. Misalnya saling kunjung pada perayaan idulfitri, hari raya waisak dan nyepi serta natalan.

Citra Maitreya dan Kumala Bodhi hendaknya meningkatkan program terkait kerukunan antarumat beragama. Dari tanpa nama diberi lebel istilah kerukunan, dari sifat implesit agar dieksplesitkan, dan yang negatif digantikan dengan yang positif bagi kerukunan, serta perlu pengembangan publikasi melalui media cetak seperti bulletin, koran baik lokal maupun nasional, dan sepanduk maupun melalui media elektronik seperti radio dan televisi.

2. Pandangan Pemerintah

Secara umum pemerintah daerah, khususnya Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang memandang peran kelompok keagamaan Buddha, sebagai berikut:.

Partisipasi Aliran Buddha Citra Maitreya terkait kerukunan antarumat beragama cukup bervariasi, sekalipun belum berupa kegiatan kerukunan yang diprogramkan. Para pengurusnya selalu ikut serta jika diundang pemerintah dalam kegiatan kerukunan. Kumala Bodhi juga perlu lebih aktif dalam kegiatan kerukunan. Sekalipun secara individual terdapat anggota vihara ini cukup aktif berpartisipasi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui FKUB.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kankemenag Kota Pangkalpinang mengakui perlu peningkatan perhatian terhadap peran pemeliharaan kerukunan antarumat beragama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan. Ke depan bimbingan harus ditingkatkan, termasuk partisipasi dan konstribusi kelompok keagamaan Buddha Citra Maitreya dan Kumala Bhodi untuk kerukunan. Sekalipun dalam batas tertentu bimbingan telah dilakukan Kanwil Kementerian Agama melalui Pembimas Buddha.

D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PERAN KERUKUNAN

Faktor yang mendukung peran Citra Maitreya dan Kumala Bodhi terkait peran kerukunan antarumat beragama, sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi nilai-nilai kerukunan universal. Nilai kasih pada alam semesta. Dengan kasih pada alam, seseorang tidak akan mengganggu atau merusak tatanan hidup yang harmonis di alam ini. Dengan menghargai sesama manusia, tidak terjadi saling menyerang, memusuhi dan menyakiti satu dengan yang lain. Nilai moralitas dunia satu keluarga. Dengan keyakinan manusia keluarga tiada perbedaan engkau aku dia, kaya-miskin, hina-mulia, tidak

peduli suku bangsa ras agama. Nilai diri lebih penting dari nilai materi. Materi-lah yang membuat manusia tersekat-sekat, dan merusak kerukunan dapat diatasi. Kedua, dukungan donator untuk kegiatan kerukunan antarumat beragama, berupa dana dan sembako.

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan peran pemeliharaan kerukunan antarumat beragama yaitu: *Pertama,* sumber daya manusia (SDM) kelompok keagamaan Buddha terbatas yang mengeluti pengembangan filosofi dan moral pembangunan toleransi dan kerukunan. *Kedua,* dana yang menunjang kegiatan kerukunan antarumat beragama belum merupakan prioritas dan terbatas dibanding bidang lainnya. *Ketiga,* kepedulian pemerintah daerah dan kantor kementerian agama di daerah rendah dalam memotivasi dan mengembangkan kerukunan antarumat bergama yang diselenggarakan oleh kelompok keagamaan Buddha Citra Maitreya dan Kumala Bodhi. *Keempat,* menguatnya kearifan lokal "dak kawa nyusah" dalam arti tidak mau ikut-ikutan dalam urusan orang lain yang membuat diri susah. Kearifan lokal ini diperkuat oleh tantangan global yang menyebarkan individualisme dan materialisme sehingga melemahkan rasa persaudaraan dan semangat kegotong royongan, persatuan dan kebersamaan.

Namun demikian, komunitas Buddha terus berupaya mengatasi hambatan terkait peran pemeliharaan kerukunan dengan: *Pertama,* menanamkan nilai-nilai kerukunan yang universal, seperti dunia satu keluarga, baik individual maupun komunal. *Kedua,* pemerintah daerah dan kantor kementerian agama di daerah diharapkan lebih memberikan kepedulian dukungan moril dan dana untuk sosialisasi dan peningkatan kerukunan.

E. ANALISIS

Dari segi agama, sejak kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan abad ke-7 telah masuk agama Hindu dan Buddha di Bangka Belitung. Islam datang menyusul satu abad kemudian, abad ke-8. Kemudian masuk pengaruh kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa. Pada zaman kolonial menyusul masuk agama Kristen dan Katolik. Penganut Katolik telah ada sejak tahun 1830-an di Sungailiat. Di kota Pangkalpinang juga telah berdiri Keuskupan yang meliputi wilayah Riau.[xv]

Secara teoritis daerah yang memiliki tingkat kemajemukan etnis, adat istiadat, budaya, agama dan paham keagamaan rawan akan konflik. Konflik sosial bernuansa agama di Indonesia sering dipicu oleh sentimen perbedaan pemahaman antar individu, kelompok, bahkan institusi. Salah satunya ialah agama dan paham keagamaan[xvi].

Namun tidak demikian halnya bagi kelompok keagamaan Buddha Citra Maitreya dan Kumala Bodhi di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. M elalui aktivitas perdagangan justeru terjadi kerjasama antara pendatang dengan penduduk asli[xvii]. Penduduk asli mayoritas suku Melayu di samping suku-suku kecil lainnya seperti suku Sekak, Sawang, Mapur dan suku Laut. Suku terbesar ialah Melayu diperkirakan mencapai 60%, menyusul suku Tionghoa sekitar 30%, dan selebihnya berbagai suku lain seperti Bugis, Jawa dan, Sunda.

Bangka Belitung merupakan kawasan strategis lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Alamnya yang indah mengandung biji timah yang kaya untuk devisa, dan perkebunan rakyat dengan komoditi lada, karet dan kelapa sawit. Karena itu menarik didatangi oleh berbagai suku dan bangsa lain, baik dari penduduk Nusantara maupun asing.

Mereka juga membawa keyakinan dan agamanya masing-masing. Akhirnya penduduk Bangka Belitung majemuk dalam suku (multietnis) dan beragam agama (multiagama) sehingga sering disebut "Indonesia Mini".

Dengan adanya keragaman etnis membentuk pola kekerabatan yang majemuk. Melalui perkawinan juga melahirkan keragaman masyarakat. Namun tetap hidup rukun, harmonis dan toleran[xviii]. Secara umum aktivitas kerukunan sebagaimana yang terungkap di lapangan hampir semua merupakan pelayanan. Hal terlihat dari bantuan sosial pada masyarakat yang memerlukan seperti panti asuhan, dan bantuan musibah seperti akibat bencana alam , kerja bakti dan donor darah. Hal ini dipengaruhi oleh umumnya karaktertik pedagang ialah keterbukaan, kejujuran, relasi yang luas dan kedamaian untuk keberhasilan usahanya.

Dalam penyusunan peraturan terkait kerukunan para narasumber dari Citra Maitreya menyatakan tidak pernah ikutserta, dan/atau tidak diikutkan (regulasi). Demikian pula pemerintah daerah dan jajaran Kementerian Agama di Bangka Belitung belum pernah duduk bersama dalam menyusun pedoman atau aturan terkait dengan kerukunan. Namun dalam konteks pemberdayaan, pihak vihara pernah diundang sebagai peserta sosialisasi kerukunan, dan hadir.

Peran dominan yang mendukung upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama pada kelompok-kelompok keagamaan sebagaimana telah dikemukakan ialah adanya sosialisasi falsafah dan nilai-nilai kerukunan yang universal. Mislanya penanaman nilai-nilai moral kemanusiaan yang universal, dan kesadaran hidup satu keluarga umat manusia. Di samping karateristik umum para pedagang sebagaimana telah dikemukakan.

Kearifan lokal yang mendukung kerukuan ialah paham kesetaraan, "Tionghoa dan Melayu sama" (*thong ngin fan ngin jit jong*). Hal ini terlihat terpilihnya Basuki Cahaya Purnama alias Ahok menjadi Bupati Belitung Timur, kemudian dilanjutkan oleh adiknya karena Ahok terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Padahal di daerah tersebut orang Melayu mencapai 60% dari jumlah penduduk.

Perkawinan antaretnis, seperti perkawinan antar seorang dari suku Tionghoa dengan Melayu merupakan pilihan yang wajar. Di lingkungan suku Tionghoa merupakan hal yang biasa jika dalam sebuah rumah tangga terdapat penganut agama yang berlainan. Dengan kata lain pilihan agama tidak menyebabkan seseorang dikucilkan dari pemeluk agama arus utama (*mainstream*), , sekalipun dalam keluarga Melayu hal demikian nampak tidak lazim.

Tradisi saling berkunjung antaretnis dan agama pada hari-hari besar keagamaan merupakan kearifan lokal. Misalnya, saling kunjung pada Hari Raya Idul Firi (Islam), Imlek (Tionghoa/Buddha/Khonghucu), Nyepi (Hindu) dan tahun baru pasca natalan (Kristen/Katolik).

Tradisi doa bersama pada momen keagamaan dan kenegaraan merupakan kearifan lokal. Sebagai contoh peresmian Masjid Al Hidayah di Kompleks Korem Bangka Belitung masing-masing wakil dari keenam agama memanjatkan doa secara bergiliran. Doa bersama juga pernah terjadi pada acara Kebaktian Kebangkitan Rohani (Kristen) di lapangan Grend Bangka City dalam rangka tahun baru. Selain itu ada doa bersama pada acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, semua kegiatan tersebut mencerminkan kerukunan antarumat beragama, sekaligus merupakan keteladanan bagi masyarakat luas yang

mengetahui dan menyaksikannya, terlepas dari ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hambatan dominan dalam upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama ialah kearifan lokal yang populer "dak kawa nusah". Dalam arti "tidak mau ikut atau menghindar dari kesusahan". Hal ini dapat ditafsirkan menjauh dari perjuangan hidup yang sarat dengan pengorbanan, dan tidak merdeka dari kesulitan dan permasalahan, Kearifan lokal ini telah mengarah pada menguatnya perilaku individualisme dan materialisme sehin gga persatuan dan kegotong royongan menjadi lemah. Ke depan . justeru diharapkan memberikan solusi atas permasalahan.

Pendirian rumah ibadat yang tidak mengindahkan aturan PBM Tahun 2006 dapat mengudang reaksi penolakan dari warga sekitarnya. Misalnya, kasus penolakan pembangunan Seminari (Katolik) oleh kelompok Hizbut Tahrir Indfonesia (HTI). Namun terselesaikan dengan terbitnya izin dari pemerintah Kota Pangkalpinang.

Segregasi tempat tinggal. Segregasi atas kelompok etnis yang diikuti agama berpotensi rawan konflik ke depan oleh pengaruh kepentingan dan tantangan global. Isu politik sesaat dengan menggunakan simbol agama dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Kempetisi penguasaan barang tambang timah yang dimungkinkan dikait-kaitkan dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Kerukunan ditegakkan di atas dua pondasi, yaitu toleransi dan kerjasama. Dalam bertoleransi tidak selamanya diikuti kerjasama, tetapi tidak konflik (*nir conflict*). Sebaliknya kerjasama dapat melahirkan perilaku laksana pisau bermata dua. Di satu sisi melahirkan kerukunan hidup bersama, dan

tidak jarang membawa ketegangan dan konflik. Dengan toleransi dibangun kerjasama. Dalam kerjasama dilandasi toleransi.

Dari uraian peran komunitas Buddha yang diteliti ialah terbangun dan terpelihara suasana hidup rukun atau harmoni antarumat beragama atas pondasi toleransi. Namun belum nampak peningkatan pada kerjasama secara institusional. Sedangkan kerukunan yang ideal ialah rukun yang positif dan dinamis, serta dalam aktivitas hidup keseharian dan kehidupan institusional.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari temuan penelitian dan pembahasan terkait peran kelompok keagamaan Buddha Citra Maitreya dan Kumala Bodhi di atas, dapat disimpulan berikut:

Kelompok keagamaan Buddha Citra Maitreya dan Kumala Bodhi telah menunjukkan peran bervariasi yang berkonstribusi positif dalam pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, seklipun terbatas, selain minimal juga belum disebut secara eksplesit, baik dalam program maupun kegaitannya, dan lebih bersifat insidentil.

Peran pemeliharaan kerukunan antarumat beragama Citra Maitreya lebih variatif dalam aktivitas sosial kemanusiaan, sosial keagamaan, seni budaya dan pendidikan, dengan sifat komunal dan terjadwal dibanding-kan peran Kumala Bodhi yang masih minim dan terbatas pada aktivitas sosial kemanusiaan dan keagamaan yang sifatnya-pun individual dan insidental.

Relasi antarumat beragama terbangun dan terpelihara suasana hidup rukun atau harmoni di atas pondasi toleransi sosial yang banyak dipengaruhi oleh karateristik umum

pedagang dan kerifan lokal *"thong ngin fan ngin jit jong"*, artinya Tionghoa dan Melayu sama. Sedangkan kerjasama institusional antarumat beragama belum tersentuh seperti dalam usaha ekonomi dan pendidikan.

Pandangan masyarakat tentang partisipasi kelompok keagamaan Buddha Citra Maitreya dan Komala Bodhi dalam pemeliharaan kerukunan antarumat beragama masih terbatas, dan ada-pun tanpa lebel kerukunan, dengan sifat kegiatannya komunal dan terjadwal (Citra Maitreya) serta individual dan insidental (Komala Bodhi). Namun telah mentradisi kunjungan silaturahim antarpemuka Citra Maitreya dan Komala Bodhi pada hari besar keagamaan dan ha ri besar nasional. Sedangkan pandangan pemerintah dalam sosialisasi kerukunan antarumat beragama bagi kelompok keagamaan Citra Maitreya dan Komala Bodhi masih terbatas pada kegiatan sosialisasi PBM dan pembinaan oleh Penyelenggara Bimas Hindu dan Buddha Kanwil Kemenag.

Faktor dominan yang mendukung peran pemeliharaan kerukunan antarumat beragama oleh kelompok-kelompok keagamaan Buddha ialah: (1) Sosialisasi nilai-nilai falsafah dan moral universal terkait kerukunan antarumat beragama; (2) Kearifan lokal yang berorientasi kesetaraan *"thong ngin fan ngin jit jong"*, artinya Tionghoa dan Melayu sama; (3) Tradisi saling mengunjungi antaretnis dan agama pada hari-hari besar keagamaan dan kenegaraan; dan (4) Tradisi doa bersama.

Hambatan dominan dalam pelaksanaan peran pemeliharaan kerukunan antarumat beragama ialah: (1) Kearifan lokal *"dak kawa nyusah"*, dalam arti, "tidak mau ikut atau menghindar dari kesusahan"; (2) Pendirian rumah ibadat yang tidak mengacu PBM Tahun 2006; (3) Segregasi tempat tinggal atas kelompok etnis dan agama; (4) Isu politik sesaat

pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada); dan (5) Kempetisi penguasaan barang tambang timah yang dikait-kaitkan isu SARA.

2. Rekomendasi

Dari temuan penelitian, analisis dan kesimpulan di atas, dirumuskan rekomendasi bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang serta pemerintah daerah hendaknya:

(a) Memotivasi ormas dan kelompok keagamaan untuk memasukkan kerukunan umat beragama dalam program dan kegiatannya melalui berbagai kesempatan seperti orientasi kerukunan, dialog lintas agama, dan pada forum pendidikan dan latihan (diklat).

(b) Dalam pertemuan ormas berkala oleh Pemda Kota Pangkalpinang sebaiknya diikutsertakan kelompok-kelompok keagamaan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan wawasan yang moderat dan sikap inklusif melalui dialog dan acara *"coffee morning"*.

(c) Menyelesaikan kasus antarumat beragama terutama pendirian rumah ibadat dengan mengacu pada PBM Tahun 2006, dengan sikap tegas dan tuntas.

(d) Kelompok-kelompok dan ormas keagamaan hendaknya memperkuat program dan kegiatan kerukunan umat beragama secara eksplesit, terprogram dan berkesinambungan melalui program yang bernuansa kerukunan seperti baksos dan bantuan musibah bencana alam, kerjabakti lintas agama, donor darah kemanusiaan dan dialog peradaban.

(e) Pemerintah, ormas dan kelompok kegamaan, majelis agama serta FKUB perlu mengkondisikan peningkatan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama secara aktif, dinamis dan toleran melalui kegiatan keseharian dan merintis kerjasama institusional dalam aktivitas soial, budaya dan ekonomi.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan, Ibnu Mujib dan M. Iqbal Ahnaf, (Editor), 2008, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global,* Sekolah Tinggi Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

-------,2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan,* Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2012, *Kota Pangkalpinang Dalam Angka,* Tahun 2012.

Bintang M, Ibrahim, 2002, *Kepulauan Bangka Belitung,* Philosohy Press, Jogyakarta. Buddhadasa, 2001, *Buddha Dharma for Students,* Terjemahan Wahid Winoto, S.Th *Dharma untuk Mahasiswa,* Yayasan Dian Dharma, (t.tp),

Haba, John, 2007, *Revitalisasi Kearifal Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso,* ICIP dan Eropean Commision, Jakarta.

Ibrahim, 2004, *Dari Mitos ke Logos: Sebuah lagi Upaya Memahami Kultur Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,* Pustaka Selayang Sedulang, Yogyakarta.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013,"Data Kasus-*Kasus Keagamaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013,* Pangkalpinang.

Liliweri, Alo M.S., 2005, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural,* LKIS. Yogyakarta.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Nell Usman, 1999. *Akar kerusuhan dan konflik di Indonesia: Suatu kajian Awal dalam Kehidupan Masyarakat,* Paramadina, Jakarta.

Syaefuddin, 2007, Asep, *Merukunkan Umat Beragama,* Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.

Dokumen:

Akta Pendirian Yayasan Kumala Bodhi Pangkalpinang, No. 04 tanggal 04 November2009.

Akta Pendirian Yayasan Maitreya Pangkalpinang, No. 1 tanggal 02 Agustus 2010. Charlei Sandra Budi, "Sejarah Singkat Perjalanan Vihata Citra Maitreya Pangkalpinang", 12 April 2013.

Hingkie, "Sejarah Singkat Vihara Kumaka Bodhi",Pangkalpinang, 14 April 2013. Kepulauan Bangka Belitung: http:id.wikipedia.org/wiki/kepulauan Bangka Belitung.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR NARASUMBER

1) Charlie Sandra Budi (Pandita Madya Citra Vihara Maitreya).
2) Hengkie (Sekretaris Vihara dan Sekretaris Yayasan Kumala Bodhi, Sekretaris MBI Provinsi, Wakil Sekretaris FKUB Provinsi, dan Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera (FAPSEDU).
3) Iponi Taroreh (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pendeta).
4) Iwan Setiawan, S.IP (Kasub Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang).
5) Joui Sumitro (Pimpinan Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia).
6) Kholil Harahap, Drs. H. (Ketua FKUB Kota Pangkalpinang).
7) Kholil Mahfud, Drs. (MUI/Kepala Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang).
8) Mulyadi Hazairin, MH., Drs. (Kabag Tata Usaha, Kanwil Kemenag Provinsi Bangka Belitung).
9) Agustinus Dwi Pramodo (tokoh Katolik, Pastor).
10) Prianto (Ketua Vihara Kumala Bodhi).
11) Putu Wartawan (Parisada Hindu Dharma Indonesia).
12) Suni Yanti (Pandita Vihara Citra Maitreya).
13) Taufik Salim (tokoh Khonghucu).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

14) Teguh Agung Nugroho, SE (Kasub Hukum dan Kerukunan Umat Beragama, Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
15) Yayuk Sri Rahayu S.Ag (Pembimas Buddha, Kanwil Kemenag Provinsi kepulauan Bangka Belitung).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

IV

PERAN DESA ADAT ANGANTIGA DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PETANG, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

Oleh: Ibnu Hasan Muchtar & Haris Burhani

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi dan Demografi

Kabupaten Badung secara geografis terletak antara 8°14'20" - 8°50'48" Lintang Selatan dan 115°05'00"- 15°26'16" Bujur Timur. Luas wilayahnya 418,52 k m² atau sekitar 7,43 % dari daratan Pulau Bali, terbagi atas 6 kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Dari 6 kecamatan tersebut, Kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 km², sedangkan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 17,52 km².

Jumlah penduduk Kabupaten Badung berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2011 tercatat 399.861 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,74 %, dengan kepadatan rata-rata 955 jiwa per km².

Dilihat dari persebaran penduduk antar kecamatan, terlihat Kecamatan Mengwi berpenduduk paling banyak yaitu 110.588 jiwa atau 27,66 % dari jumlah penduduk Kabupaten Badung, disusul Kecamatan Abiansemal yaitu 83.579 jiwa atau 20,90 %, sedangkan Kecamatan Petang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 28.507 jiwa atau 7,13 %.

Kepadatan penduduk per km² di Kecamatan Kuta merupakan yang tertinggi yaitu 2.287 jiwa per km², disusul Kecamatan Kuta Utara sebesar 1.890 jiwa per km² dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya di Kecamatan Petang yaitu 248 jiwa per km².

Ditinjau dari angka perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan atau seks rasio terdapat 2 kecamatan yaitu Mengwi dan Abiansemal yang seks rasio di bawah 100. Hal ini berarti penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Sedangkan 4 kecamatan lainnya (Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Petang) angka seks rasio berada di atas 100, yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) di Kabupaten Badung tahun 2011 tercatat 409,91 ribu jiwa. Perbandingan penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (TPAK) Kabupaten Badung tahun 2011 sebesar 76,38 %, bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar (76,65 %), mengalami penurunan (0,27 %). Untuk jelasnya terkait dengan sektor-sektor yang digeluti penduduk setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya, dapat disimak dalam Tabel 1 berikut:

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Tabel 1
Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Badung Tahun 1995, 2000, 2010.

No.	Lapangan Pekerjaan	Kabupaten Badung		
		1995	2000	2010
1.	Pertanian	24,49	25,69	15,18
2.	Pertambangan &	1,49	-	0,17
3.	Penggalian	6,42	3,71	10,54
4.	Industry	0,05	-	0,49
5.	Listrik, Gas, & Air Minum	15,58	-	9,29
6.	Bangunan	28,51	15,82	37,43
7.	Perdagangan, Hotel &	6,22	1,62	4,93
8.	Restoran	2,10	-	2,42
9.	Pengangkutan	15,14	35,59	17,88
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Catatan: Tahun 1995 Hasil SUPAS Tahun 2000, 2010 hasil Sensus Penduduk

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

2. Pemerintahan

Peranan pemerintah dalam upaya pembangunan dan tugas-tugas pelayanan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kelembagaan dan fungsi yang ada. Dalam upaya kepemerintahan yang baik (*good government*), kelembagaan yang ada terdiri dari Sekretariat Daerah, 15 Dinas, 6 Badan, 4 Kantor, 1 Inspektorat dan 6 kecamatan, dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang dapat mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Badung. Ruang Lingkup kewilayahan Kabupaten Badung terdiri dari 6 kecamatan dan

62 desa/kelurahan. Ditinjau dari klasifikasi maka di Kabupaten Badung terdapat 40 daerah urban (perkotaan) dan 22 daerah rural (pedesaan).

Dalam masyarakat Bali, istilah "desa" menunjuk kepada dua pengertian. Pertama, istilah desa menunjuk kepada desa dinas, yaitu desa yang merupakan kesatuan wilayah administrasi pemerintahan. Kedua, istilah desa menunjuk kepada desa yang merupakan kesatuan wilayah masyarakat adat (Ayu Putu Nantri dan I Ketut Sudantra, 1991, "Struktur Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga dalam Desa Adat Gianyar", Laporan Penelitian, Universitas Udayana, Denpasar, hal.1). Desa dalam pengertian inilah yang kemudian dikenal sebagai Desa Adat atau Desa Pakraman.

Desa Petang terdiri atas 7 Banjar Dinas yang tergabung dalam 5 Desa Adat. Masing- masing Banjar Dinas dimaksud adalah: (1) Banjar Dinas Angantiga; (2) Banjar Dinas Mundukdaping; (3) Banjar Dinas Lipah; (4) Banjar Dinas Petangdalem; (5) Banjar Dinas Petang; (6) Banjar Dinas Petangsuci; dan (7) Banjar Dinas Kerta. Peminpin Banjar Dinas disebut *Kelian Banjar Dinas*. Sedangkan untuk Desa Adat masing-masing adalah: (1) Desa Adat Petang membawahi 3 Banjar Adat yaitu Banjar Adat Petangkelod, Banjar Adat Petangtengah dan Banjar Adat Petangkaja; (2) Desa Adat Kerta membawahi 1 Banjar Adat Kerta; (3) Desa Adat Lipah membawahi 1 Banjar Adat Lipah; (4) Desa Adat Mundukdamping membawahi 1 Banjar Adat Mundukdamping; dan (5) Desa Adat Angantiga membawahi 1 Banjar Adat Angantiga. Pemimpin Desa Adat disebut *Bendesa Adat/Kelian Adat*.

Desa Adat sebagai satu kesatuan wilayah adat yang mempunyai otonomi tersendiri diharapkan mampu dapat berperan aktif dengan baik dan tercipta koordinasi yang

serasi, selaras dan harmonis dengan konsep kemitraan dengan Desa Dinas/Banjar Dinas dengan mengacu kepada konsep *"Tri Hita Karana"* yaitu: Palemahan, Pawongan dan Parahyangan. Tiga kerangka ini yang dijadikan umat Hindu di Bali sebagai dasar dalam kehidupan yang harmonis kaitan hubungannya dengan alam, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta, yang dalam pelaksanaannya telah diatur dalam *Awig-awig Desa Adat*.

Banjar Dinas Angantiga yang terdapat di Desa Petang Kecamatan Petang Kabupaten Badung sangat unik lain dari pada Banjar-banjar Dinas yang umum di Provinsi Bali. Banjar Dinas Angantiga ini penduduknya terdiri dari dua komunitas agama besar yaitu umat Hindu dan umat Islam yang berjumlah 160 KK terdiri dari 105 KK penganutnya beragama Islam dan 55 KK penganutnya yang beragama Hindu, dengan jumlah Jiwa ± 648 terdiri dari 329 orang laki-laki dan 319 orang perempuan. Sedangkan luas wilayah Banjar Dinas Angantiga hanya seluas 35 ha. yang terdiri dari tanah sawah dan perkebunan dengan bentuk berbukit danber jurang. Secara turun temurun terdapat 2 (dua) adat yang berlaku yaitu Adat Hindu yang disebut Desa Adat yang dipimpin oleh seorang Bendesa Adat/Kelian Adat untuk umat Hindu, dan Kampung Muslim/Islam yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung untuk umat Islam. Banjar Angantiga ini telah lama dikenal sebagai perkampungan muslim di pulau Bali sejak lama, seiring dengan sejarah dibukanya wilayah Angantiga oleh tiga tokoh muslim dari Bugis di tahun 1442 (Wawancara dengan wakil Kelian Dinas Banjar Dinas Angantiga M. Djailani, 5 Mei 2013)

Berbagai versi sejarah Banjar ini, salah satunya didasarkan pada naskah Lontar Purana yang tersimpan di

Puri Carangsari Kecamatan Carangsari Badung. Berdasarkan Lontar tersebut dan penuturan turun temurun dari orang-orang tua di kampung Angantiga, leluhur kampung Angantiga ini adalah tiga orang pengembara dari Bugis. Ketiga orang ini berhasil mengamankan daerah yang sekarang menjadi wilayah Angantiga, yang saat itu bernama Bangkian Jaran dari berbagai marabahaya.

Lontar Purana menceritakan, bahwa pada masa Puri Carangsari masih menjadi kerajaan yang bernama Kerajaan Pungingpuspo dengan raja yang memerintah Ida Gusti Ngemangkurat Kacung Gede, memiliki masalah dengan wilayahnya yang terbentang dari Alas Gede di daerah Blahkiu dan Sangeh di Selatan sampai Gunung Catur di bagian Utara. Oleh karena wilayahnya berada di daerah bergunung-gunung, warga yang berasal dari daerah Utara yang akan *sowan* ke Puri harus melewati daerah yang bernama *Bangkian Jaran* (pinggang kuda). Daerah ini disebut Bangkian Jaran karena daerah itu merupakan jalur setapak yang sempit dengan kiri dan kanannya jurang. Pada saat warga akan *sowan* (menghadap) ke Puri, selalu mendapat gangguan, bahkan banyak warga yang hilang di daerah tersebut.

Pihak Puri berupaya mencari cara menyelesaikan masalah daerah Bangkian Jaran tersebut. Akhirnya penguasa Puri mendengar berita ada 3 pengembara dari tanah seberang yaitu Bugis, yang mana ketiga orang tersebut dikenal sebagai orang-orang yang pintar (sakti) dan hebat. Pihak Puri kemudian mengutus telik sandinya untuk mencari dan menemukan ketiga orang tersebut. Telik sandi kerajaan mencari dan bertanya pada orang - orang tentang adanya 3 orang yang pakaiannya berbeda dengan orang kebanyakan. *"Orang najak telu, ngingak no orang tiga, najak telu?"*. Akhirnya

ketiga orang itu berhasil ditemukan di daerah Karangasem, dan tempat ditemukannya itu disebut daerah *Angantelu*.

Ketiga orang itu akhirnya diajak ke Puri dan diterima sang raja. Apapun keyakinan atau agama ketiga orang itu, pihak Puri tidak akan mencampuri. Keyakinan mereka bertiga berbeda dengan yang dianut raja dan masyarakat di sana, yaitu beragama Islam, tetapi pihak puri tidak mempermasalahkannya. Ketiga orang itu sebenarnya adalah utusan dari kerajaan Bugis yang tengah melakukan tugas atau misi tertentu, yaitu untuk menghukum raja Klungkung yang telah menculik salah satu putri kerajaan mereka. Penguasa Puri menawarkan tempat untuk tinggal, yaitu di daerah Bangkean Jaran sambil mempersiapkan diri melakukan tugas dari kerajaan mereka. Selain itu, mereka bertiga diminta untuk menjaga keamanan di wilayah itu dan mengantar masyarakat yang akan melewati Bangkian Jaran agar aman baik berangkat maupun pulangnya dari sowan ke Puri.

Dengan adanya ketiga orang ini, akhirnya daerah Bangkean Jaran menjadi aman. Masyarakat yang akan sowan ke Puri Carangsari atau kerajaan Pungingpuspo, mendapatkan keamanan dan selamat sampai tujuan. Tempat itu kemudian diberi nama *Angantiga* oleh pihak Puri. Angantiga ini berasal dari bahasa Bali halus yang mengandung penghormatan. *Angan* artinya raga atau diri manusia, dan *tiga* artinya tiga dalam bahasa Bali halus, yang bahasa umumnya *telu*. Karena itu pemberian nama Angantiga ini merupakan bentuk penghormatan Puri terhadap ketiga orang Bugis yang telah membantu kerajaan Pungingpuspo ini.

Selanjutnya ketiga orang itu tinggal di daerah Angantiga tersebut yang merupakanpemberian sang Raja

atas jasa-jasa mereka. Oleh penguasa Puri, warga kerajaan yang beragama Hindu diutus untuk menemani ketiga orang itu tinggal di sana. Akhirnya ketiga orang menikah dengan warga Hindu, dan beranak keturunan sehingga Islam kemudian berkembang berdampingan dengan warga Hindu yang lain.

Demikian dikisahkan dalam *Lontar Purana* yang tersimpan di Puri Carangsari, sebagaimana disampaikan oleh Pelingsir Puri Carangsari, Anak Agung Bagus Surya Mandala. Lontar itu menyebutkan kehadiran ketiga orang tersebut di Angantiga terjadi pada tahun 1442. Adapun siapa ketiga orang tersebut, tidak ada penjelasan. Namun diyakini bahwa ketiga orang tersebut adalah Daeng Mapilih, Daeng Sarekah, dan Daeng Safi'ie. Mereka bertiga yang berhasil mengamankan daerah Bangkian Jaran dari marabahaya.

Dari berbagai versi sejarah Angantiga, masyarakat setempat lebih cenderung pada versi yang menyebutkan bahwa wilayah Angantiga atau dulunya daerah Alas Bangkean Jaran pertama kali dibuka dan dihuni oleh pendatang dari Bugis. Hal ini diakui tidak saja oleh warga kampung Islam Angantiga, tetapi juga oleh warga Hindu di Angantiga, sebagaimana dinyatakan oleh Pemangku Puseh Kayangan Tiga di Angantiga, I Made Santun; Pemangku Dalem Raja Pati di Angantiga, Mangku Barata; dan Kliean Adat Banjar Angantiga, I Made Caluk. Tokoh yang membuka daerah tersebut adalah tiga orang muslim, dan memiliki hubungan dengan kerajaan atau Puri di sekitar wilayah Petang Badung. Mereka berhasil mengamankan daerah tersebut dan membuka wilayah tersebut menjadi pemukiman penduduk (Joko Tri Haryanto, 2010, Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Multikultural (Studi terhadap Norma "Nyama Braya" dan Tradisi "Bale Suji" Di Kampung

Islam Angantiga Bali), Laporan Penelitian Balai Litbang Aama Semarang, hal 31-32).

Bentuk Desa di Bali terutama didasarkan atas kesatuan tempat di samping kesatuan wilayah, maka sebuah desa merupakan pula suatu kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks pura desa yang disebut Kahyangan Tiga, ialah Pura Puseh, Pura Bale Agung dan Pura Dalem. Ada kalanya Pura Puseh dan Pura Bale Agung dijadikan satu dan disebut Pura Desa (Baliaga, 2000). Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, "desa" dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah "Desa Dinas" atau"Desa Administratif". Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu Desa Adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga).

Dasar pembentukan desa adat dan desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu sama dan sejajar dengan desa adat. Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang

mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa (Dharmayuda, 2001). Eksistensi Desa adat di Bali diakui oleh pasal 18 UUD 1945 dan dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6.

Tahun 1986, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali. Kelembagaan Desa adat bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana.

Pengertian desa adat mencakup dua hal, yaitu : (a) Desa adatnya sendiri sebagai suatu wadah, dan (b) adat istiadatnya sebagai isi dari wadah tersebut. Desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan sosial, budaya dan *keagamaan* masyarakat umat Hindu di Bali. Desa adat dilandasi oleh Tri Hita Karana, yaitu:

(i) Parahyangan (mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu Hyang Widhi Wasa);
(ii) Pelemahan (mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya);
(iii) Pawongan (mewujudkan hubungan antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan Nya (Dharmayuda, 2001)
(http://iptekdankemiskinan.blogspot.com/2011/01/eksistensi-desa-adat-dan-kelembagaan.html diposkan oleh nic zegeg di 20.44)

Sejarah Desa Adat Angantiga tidak terlepas dari sejarah Angantiga itu sendiri sebagaimana di sebut di atas. Adapun struktur dan komposisi kepengurusan Desa Adat Angantiga saat ini terdiri atas: Pembina/Kelian Dinas, Bendesa/Kelian/Ketua Desa Adat, Penyarikan/Sekretaris, Juru

Raksa/Bendahara, Kesinoman/Juru Arah/Penerangan, dan Pecalang/Juru Aman.

Untuk melaksanakan tugas membantu kelancaran dan pelaksanaan pembangunan dibidang *keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan,* melaksanakan, memberi kedudukan hukum adat, membina dan mengembang-kan nilai-nilai adat dan menjaga/memelihara dan memanfäatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat, Bendesa adat dibantu oleh lembaga perangkat desa adat lainnya yaitu:

(a) Sekehe Taruno Taruni (STT Tri Cakti Banjar Adat Angantiga)

Perkumpulan ini khusus beranggotakan pemuda-pemudi umat Hindu Banjar Angantiga yang berumur antara 17 tahun sampai dengan sebelum menikah. Saat ini jumlah anggota sebanyak 63 orang, dengan susunan kepengurusan sbb: Pembina 2 orang, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sinom/Juru Penerang 2 orang.

Keberadaan organisasi pemuda di tingkat Banjar ini sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa adat Angantiga. Organisasi yang sifatnya tradisional ini arah dan gerak utamanya adalah di bidang adat dan agama serta kegiatan umum lainnya.

Diantara program kerja/kegiatan yang dilakukan oleh STT Tri Cakti ini adalah melakukan gotong royong setiap 15 hari sekali di lingkungan Pura yang ada di Banjar Adat. Melakukan musyawarah di kalangan internal pemuda Hindu, dilakukan setiap 20 hari sekali dan melaksanakan perayaan ulang tahun STT Tri Cakti

yang dilakukan pada setiap tanggal 6 April setiap tahun.

Dari kegiatan yang dilakukan oleh STT ini ada yang melibatkan pemuda di luar yang beragma Hindu khususnya yang beragama Islam karena hanya terdapat 2 (dua) kelompok keagamaan ini di Banjar Dinas Angantiga sebagaimana disebut di atas yaitu pada saat perayaan hari ulang tahun STT dalam kegiatan lomba-lomba seperti: Pertandingan olah raga, Tarik Tambang, Jalan Santai dan kegiatan pentas seni. Keterlibatan pemuda Islam/Remaja Masjid Baiturrahman (Remaba) tidak sebatas menghadiri karena diundang namun terlibat secara fisik baik dalam kepanitiaan pelombaan, sebagai peserta lomba dan sebagai partisan/penonton. Hal ini menunjukkan ada kebersamaan, ada interaksi di antara pemuda-pemudi yang ada di Banjar Dinas Angantiga dalam rangka menjaga kerukunan yang selama ini sangat baik (Wawancara dengan pengurus STT Tri Cakti, I Putu Heri Hendrawan & I Kd Darmawan, 5 Mei 2013).

(b) Sekehe Santhi yang membidangi terkait upacara di tempat suci

Seperti halnya Sekehe Taruna Taruni, Sekehe Santhi berfungsi juga untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, adat dan agama di lingkungan Ibu-ibu/perempuan umat Hindu di Desa Adat Angantiga. Perkumpulan ini khusus untuk kalangan intern umat Hindu karena berkaitan dengan adat dan keagamaan Hindu yang tidak dapat melibatkan warga agama lain.

(c) Sekehe Gong/Kesenian

Perkumpulan ini dimaksudkan untuk melestarikan dan mengembangkan minat dan bakat yang ada pada masing-masing anggota selain juga sebagai pelengkap dan sarana upacara keagaman umat Hindu. Dalam kesempatan-kesempatan yang tidak dikhususkan untuk upacara keagamaan, maka kelompok kesenian ini sering juga melibatkan warga Banjar Angantiga lainnya dari kalangan umat Islam. Misalnya kesenian dalam rangka perayaan pernikahan, perayaan hari-hari besar nasional.

(d) Kelompok Subak: Subak Air dan Subak Abian

Bertani merupakan mata pencaharian hidup yang paling utama dari sebagian besar masyarakat Bali. Jenis pertanian di pulau dewata ini meliputi pertanian sawah dan juga perkebunan. Di dalam sistem pertanian di Bali, "subak" sangatlah memegang peranan penting. Subak adalah salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan pada masyarakat Bali yang bersifat tradisional dan yang dibentuk secara turun temurun oleh masyarakat umat Hindu Bali. Subak berfungsi sebagai satu kesatuan dari para pemilik sawah atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber air atau bendungan tertentu.

Subak terdiri dari dua jenis yaitu Subak Air dan Subak Abian. Subak air adalah kelompok orang yang mengatur pertanian di sawah sedangkan Subak Abian adalah kelompok orang yang mengatur pertanian di darat seperti perkebunan atau cocok tanam di selain persawahan

yang menggunakan air/irigasi.

Untuk kelompok Subak yang ada di Banjar Dinas Angantiga dikelola oleh kedua komunitas yang ada yaitu dari pihak umat Hindu dan juga dari pihak Muslim untuk kedua Subak baik untuk Subak Air maupun Subak Abian. Bahkan oleh karena yang memiliki persawahan di Desa Dinas Angantiga lebih banyak dai pihak Kampung Muslim maka pengurusnya lebih banyak dari kalangan Kampung Muslim (Wawancara dengan Bendesa Adat Angantiga I Nyoman Banu tgl, 3 Mei 2013).

Sebagaimana diurai di atas bahwa Desa Adat di Bali sudah berlaku secara umum di Provinsi Bali, oleh karena itu jaringan sosial kelompok ini (Desa Adat Angantiga) cukup luas antar sesama Desa/Banjar Adat, Desa/Banjar Dinas baik se Desa Petang maupun dengan Kecamatan Petang. Namun demikian setiap Desa Adat mempunyai hak otonom sendiri- sendiri. Khusus untuk Desa Adat Angantiga jaringan sosialnya bukan hanya seperti dikemukan di atas namun juga dengan lingkungan setempat khususnya dengan Kampung Islam yang ada di sekitarnya.

Banjar Dinas Angantiga dipimpin oleh seorang Kepala/Kelian Banjar Dinas yang dipilih secara langsung oleh masyarakat/penduduk Angantiga baik yang beragama Hindu maupun yang beragama Islam. Sudah menjadi kesepakaan secara turun temurun di Banjar ini apabila yang terpilih menjadi Kelian/Kepala berasal dari umat Hindu maka yang menjadi wakilnya adalah dari

umat Islam atau sebaliknya. Saat ini Banjar Dinas Angantiga dipimpin oleh I Wayan Tirta sedangkan wakilnya adalah M. Djailani. Sebagai staf operasional Kepala Desa/Perbekel di wilayah kerjanya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel/Kepala Desa, Kelian Banjar Dinas berfungsi menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang administrasi di antaranya: (1) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Banjar Dinas; (2) Membina kehidupan masyarakat Banjar; (3) Melakukan koordinasi terhadap kedua kepemimpinan adat yang ada di Banjar Dinas Angantiga yaitu: (a) Desa Adat Angantiga yang dipimpim oleh I Nyoman Banu selaku Bendesa/ Kelian Adat; (b) Kampung Islam Angantiga yang dipimpin oleh Ramsudin selaku Kepala Kampung.

Dalam bidang politik, berdasarkan hasil Pemilihan umum tahun 2009 terpilih wakil-wakil rakyat secara demokratis untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Badung sebanyak 40 kursi sesuai kuota, dengan perolehan kursi masing-masing fraksi sebagaimana komposisi berikut: Fraksi PDI Perjuangan 14 kursi, Fraksi Partai Golkar 11 kursi, Fraksi Nurani-Marhaen 6 kursi dan Fraksi Demokrat 9 kursi.

3. Pendidikan dan Perekonomian

Dalam upaya pencerdasan masyarakat, pemerintah daerah melakukan pembangunan bidang pendidikan antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Sampai dengan tahun 20010 di Kabupaten Badung terdapat 169 Taman Kanak- Kanak, 270 Sekolah Dasar termasuk

Madrasah Ibtidaiyah, 47 Sekolah Menengah Pertama, 20 SMA, dan 18 SMK. Jumlah siswa untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah: Taman Kanak-Kanak 10.019 siswa, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah 59.130 siswa, Sekolah Menengah Pertama 25.300 siswa, Sekolah Menengah Atas 8.802 siswa dan Sekolah Menengah Kejuruan 9.453 siswa.

Satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Badung adalah Universitas Udayana, yang pada tahun 2010 memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 20.112 orang. Perguruan Tinggi lainnya adalah perguruan tinggi swasta sebanyak 4 buah , yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BIITM Kuta Badung, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dyana Pura, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Triatmajaya.

Di bidang ekonomi, kehidupan perekonomian masyarakat yang terbilang menonjol adalah sektor pertanian. Hal ini setidaknya didukung oleh kondisi geografis bahwa dua pertiga wilayah Kabupaten Badung berupa lahan pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi tanaman untuk kebutuhan pangan penduduk dan pelestarian lingkungan.

Di Desa Petang, pada umumnya mata pencaharian penduduk sebagai petani, namun demikian ada juga yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pegawai.

Untuk menopang perekonomian penduduk, sebagaimana umumnya di desa-desa adat lainnya di Provinsi Bali, Di Desa Adat/Banjar Dinas Angantiga terdapat pula Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga ini bertujuan antara lain: menjaga ketahanan ekonomi Krama Desa Adat melalui tabungan anggota, memberantas ijon dan sebangsanya, mendorong pemerataan dan kesempatan berusaha dan

meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga ini merupakan Badan Usaha milik Desa Adat dan oleh karena dikelola oleh Krama Desa Adat/umat Hindu. Namun demikian oleh karena komunitas yang ada di Desa Dinas Angantiga tidak hanya umat Hindu melainkan juga umat Islam yang sudah berabad- abad tinggal bersama maka lembaga ini juga memberikan kesempatan kepada umat Muslim sebagai nasabah. Ke depan diharapkan tidak hanya sebatas nasabah tetapi juga akan dilibatkan di dalam pengelolaannya (Wawancara dengan Sekretaris Desa Adat, I Made Wardhana tanggal, 5 Mei 2013).

4. Kehidupan Keagamaan

Penduduk Kabupaten Badung dilihat dari segi agama, terdiri atas berbagai pemeluk agama. Penduduk beragama Hindu menempati posisi jumlah mayoritas, yakni sebanyak 337.034 jiwa (85,95). Penduduk beragama Islam 28.747 jiwa (7,33 %), Katolik 13.441 jiwa (3,43 %), Kristen Protestan 11.172 jiwa (2,85 %), dan Budha 1.535 jiwa (0,39 %). Sementara itu belum ada data tentang penganut agama Khonghucu di kabupaten ini. Untuk melaksanakan peribadatan, masing-masing umat beragama memiliki tempat peribadatan (bangunan suci). Tempat peribadatan dimaksud berikut jumlah masing-masing adalah: Pura Kahyangan Tiga 354 buah, Pura Sad/Dang Kahyangan 11 buah, Pura Kahyangan lainnya1.411 buah; masjid 20 buah, mushalla 16 buah, Gereja Kristen 43 buah, Gereja Katolik 7 buah, Klenteng/Vihara 5 buah.

Untuk lebih jelasnya, komposisi jumlah penduduk masing-masing agama berikut rumah ibadatnya, dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk dan Tempat Ibadat Menurut Agama
Di Kabupaten Badung Tahun 2010

No.	Agama	Penduduk	Prosentase	Tempat	Prosentase
1.	Hindu	414.863	76,35	362	80,29
2.	Islam	96.166	17,70	16	3,55
3.	Kristen	18.396	3,39	52	11,53
4.	Katolik	10.234	1,90	8	1,77
5.	Buddha	2.475	0,45	5	1,11
		543.332	100,00	451	100,00

Sumber : BPS, Badung Dalam Angka, 2012

Adapun Jumlah pemeluk agama per-kecamatan pada tahun 2012 secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Penganut Agama per- Kecamatan
Di Kabupaten Badung Tahun 2012 *)

Kecamatan	Hindu	Islam	Budha	Kristen Protest	Katolik	Jumlah
Kuta	49.025	9.008	148	1.253	4.123	63.557
Kuta	31.477	9.481	1.111	4.106	5.346	51.521
Kuta	7.929	7.207	-	4.163	2.982	22.281
Mengwi	116.86	2.061	276	1.585	958	121.74
Abiansem	97.370	611	-	-	25	98.006
Petang	34.549	379	-	65	7	35.000
Jumlah	337.03	28.74	1.535	11.172	13.44	392.10

Sumber: Kantor Kemenag Kabupaten Badung, 2012.

Dari tabel di atas terlihat, di Kecamatan Petang dengan jumlah penduduk 35.000 jiwa, sebagian besar penduduk atau sekitar (98,71%) terdiri atas umat Hindu. Kemudian umat Islam (1,08 %), umat Kristen (0,19 %) Katolik (0,02 %), sedangkan umat Buddha tidak ada, Adapun tempat ibadat yang tersedia di Kecamatan Petang meliputi : Pure Kahyangan Tiga 76 buah, Pure Sad/Dang Kahyangan 3 buah, Pure Kahyangan lainnya 22 buah, masjid 1 buah, mushalla 6 buah, gereja Kristen 8 buah, gereja Katolik 4 buah *(Kemenag Kabupaten Badung, 2012).*

Di Kabupaten Badung, kesadaran untuk bersama-sama menjaga dan memelihara kerukunan serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat sudah berlangsung sejak lama. Kesadaran tersebut semakin menguat setelah terjadi pergolakan politik di Indonesia tahun 1998 yang menimbulkan konflik sosial bahkan muncul pula konflik yang berbau SARA terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Situasi ini dianggap bisa merusak kerukunan yang sudah terjaga dengan baik selama ini. Oleh karena itu, para tokoh/ pimpinan lembaga/majelis agama yang ada di Bali dalam beberapa kali pertemuan menyepakati untuk membicarakan perlunya sebuah wadah yang dapat dipakai untuk menjembatani komunikasi masing-masing komponen dalam masyarakat dengan cepat dan tepat.

Atas saran Bupati Badung dan didorong oleh kebutuhan bersama para pimpinan agama untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Badung, maka dibentuk Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) ditetapkan dengan SK Bupati Badung No. 2642 A tertanggal 27 Desember 1999. Keberadaan FKAUB ditangani oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Setelah Bagian Sosial dilikuidasi tahun 2000, FKAUB ditangani Dinas Sosial, dan

tahun 2001 ditangani Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung sampai dikeluarkan SK Bupati tentang perubahan menjadi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2008. FKUB memiliki visi sebagai mitra terdepan pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung. Adapun misinya, pertama memelihara kerukunan intern dan antar umat beragama, kedua memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama, ketiga memfasilitasi pendirian rumah ibadat sesuai kebutuhan nyata dari umat dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan.

Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama di Bali, khususnya Kabupaten Badung antara lain juga adanya dukungan kearifan lokal Bali seperti: *menyama braya/pasiddhikaran* yaitu budaya *hidup bersama sebagai satu saudara.* Prinsip dan semangat *menyama braya* ini sudah menjadi komitmen bersama masyarakat Bali bahwa di atas segala-galanya komunikasi menjadi penting. Melalui komunikasi, dan selanjutnya kerjasama, kerukunan umat beragama dapat ditingkatkan.

Kehidupan keagamaan masyarakat Badung dan Bali pada umumnya, diwarnai oleh keberadaan lembaga-lembaga adat yang justru terlihat sangat eksis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jumlah lembaga adat dimaksud berikut jenisnya di Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Lembaga Adat di Kabupaten Badung

No	Kecamatan	PHDI	Desa Adat	Banjar	Seka Teru	Subak	Jumlah
1	Kuta Selatan	-	9	36	27	17	89
2	Kuta	-	7	33	30	3	73
3	Kuta Utara	-	6	24	17	19	66
4	Mengwi	-	38	96	126	64	324
5	Abiansemal	-	31	122	99	41	293
6	Petang	-	31	48	9	39	127
	Jumlah	-	118	459	208	183	968

Sumber: Kantor Kemenag Kabupaten Badung, 2012.

B. Peran Desa Adat Angantiga Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

1. Kedudukan dan Fungsi Desa Adat, Termasuk Desa Adat Angantiga

Sebagai suatu persekutuan wilayah yang berdasar atas kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwarisi secara turun temurun serta diikat dengan 'kahyangan tiga' yaitu Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa, bedasarkan Perda Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat, sebagai Kesatuan masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Bali, menentukan dalam Bab III tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat, dalam Pasal 5 menyebutkan "Desa adat di Propinsi Bali, merupakan kesatuan masyarakat Hukum adat

yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan" Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, mempunyai fungsi:

a) Membantu pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang *keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.*
b) Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adatnya.
c) Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan.
d) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan *paras paros salunglung sabayantaka*/musyawarah untuk mufakat.
e) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dalam ayat (2) Perda di atas disebutkan bahwa Fungsi tersebut ayat (1) dijabarkan di dalam Awig- awig Desa Adat (IBP Purwita, Desa Adat dan Banjar di Bali, Denpasar: Kawisastra, hal. 9).

Berdasarkan fungsi di atas maka program/kegiatan yang dicanangkan oleh Kelian Desa Adat serta perangkatnya di antaranya adalah:

(i) Bidang Pembangunan/Perbaikan Pure yang ada di lingkungan Banjar Adat, pelaksanaan kegiatan ini terbagi dalam 3 katagori Jangka Panjang, Jangka Menenagh dan Jangka Pendek. Pengaturan ini dilakukan karena penyesuaian dengan kondisi keuangan Desa Adat.

(ii) Mengkoordinir upacara-upacara keagamaan meliputi: upacara ketika ada yang meninggal dunia/Ngaben dilakukan upacara Nyekah, Pernikahan dilakuan upacara Musakapan. Dalam adat Bali jika seseorang melaksanakan pernikahan maka diberikan waktu selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan harus melakukan upacara Musakapan. Jika telah dilaksanakan upacara Musakapan ini maka pernikahan seseorang sudah sah menurut hukum Negara dan sah menurut hukum adat Bali. Jika belum dilakukan upacara Musakapan maka mereka akan mendapat sanksi adat berupa pengucilan dan bahkan tidak diperkenankan untuk ikut dalam pelaksanaan upacra-upacara keagamaan baik di Pure dan tempat lainnya, dan bahkan tidak mendapat pelayanan dari pengurus adat Desa/ Banjar.

(iii) Keberadaan pengurus Desa Adat Angantiga baru beberapa waktu lalu ada pergantian pengurus maka salah satu agenda kegiatannya adalah mengisi personel Pemangku Tiga Pura yang ada di Desa Adat Angantiga yaitu Pura Puseh, Pura Desa dan Para Dalem.

(iv) Di bidang keamanan Banjar juga akan segera dilakukan penentuan personel Pecalang.

(v) Di bidang kepemudaan sudah terbentuk Sekehe Teruna-Teruni Tri Cakti

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

2. Peran Desa Adat Angantiga dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Setiap orang yang menjadi pengurus baik Kelian Banjar Dinas, Kelian Banjar Adat maupun Kepala Kampung harus memiliki wawasan terbuka dan demokratis serta peka terhadap lingkungan yang ada. Jangan pernah lakukan

yang tidak baik, mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap kelompok lain serta tidak saling melukai perasaan kelompok lain. Wawasan demikian itu mendasari peran mereka sesuai fungsi masing-masing terhadap berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, termasuk kerukunan umat beragama.

Desa Adat Angantiga sesuai fungsinya mempunyai peran tertentu dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Peran di bidang kerukunan antara lain: bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, budaya, seni dan olahraga, serta peran dalam bidang kerukunan umat beragama. Selain itu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat yang berbeda agama, antara lain:

a) Penyiaran Agama

Upaya pemeliharaan kerukunan dari aspek penyiaran agama, lebih pada upaya pencegahan ketidakrukunan. Salah satu dari berbagai faktor yang dapat memicu timbulnya ketidakrukunan antar warga berbeda agama sebagaimana hasil inventarisasi dari Badan Litbang dan Diklat bersama beberapa perwakilan majelis-majelis agama adalah persoalan penyiaran agama. Permasalahan penyiaran agama sudah muncul setelah terjadinya G.
30 S PKI tahun 1965, sehingga perlu dilakukan Musyawarah Antar Umat Beragam a yang kemudian lahir SKB No. 1 tahun 1969 dan SKB No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Di dalam Bab. III Pasal 4 SKB No. 1 Tahun 1979 disebutkan bahwa "Pelaksanaan Penyiaran Agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara diantaranya menggunakan bujukan, menyebarkan pamplet, majalah, bulletin, buku-buku dan bentuk barang cetakan lainnya serta tidak dengan cara melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain. Untuk memelihara keharmonisan antar warga yang berbeda agama maka berbagai kesepakatan diambil diantaranya adalah tetap mejaga untuk tidak melakukan penyiaran agama terhadap warga lain selain warga seagamanya. Oleh karenanya untuk menjaga kesepakatan bersama tersebut warga muslim yang ada di Desa ini setiap melakukan acara dakwa di Masjid dengan mendatangkan penceramah dari luar Desa maka diberikan pengertian agar dalam ceramahnya tidak menyinggung agama lain dan tidak pula memberikan ceramah yang mengarah kepada ajakan kepada agama yang sedang disampaikan. Hal serupa pula dilakukan oleh pihak warga Hindu yang ada di Desa Angantiga ini.

b) Pernikahan Beda Agama

Sikap pembiaran para orang tua umat Hindu yang tidak melarang anak perempuannya nikah dengan umat lain, merupakan bentuk pemeliharaan kerukunan di kalangan Desa Angantiga. Peristiwa pernikahan yang melibatkan pemuda pemudi yang berbeda agama sebelum menikah (calon pengantin pria Muslim dan calon pengantin wanita beragama Hindu) sudah sering terjadi dan ini tidak menjadi persoalan dikalangan warga Desa Angantiga sepanjang peristiwa ini didasarkan atas

kemauan murni dari kedua calon pengantin tidak berdasarkan atas paksaan dari manapun. Kesepakatan ini tetap berjalan hingga saat ini dan akan tetap berlangsung sepanjang tidak terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak.

c) Hewan Peliharaan

Walaupun sebagian besar letak pemukiman antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Hindu terpisah tetapi masih di dalam satu desa, dan bahkan sebagian masih bercampur dalam satu wilayah. Untuk menjaga keharmonisan seluruh penduduk desa ini maka sudah terjalin saling pengertian dan saling mamahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga yang berbeda keyakinan. Warga yang memeluk agama sudah sangat paham bahwa hewan babi adalah salah satu yang diharamkan (tidak diperbolehkan makan, memelihara dan bersentuhan) oleh warga yang memeluk agama Islam, maka dalam pemeliharaan pun sangat diletakkan jauh dari pemukiman muslim, jika ada resepsi yang terdapat makan-makan, maka pihak warga yang beragama Hindu menyerahkan masak-memasak makan kepada warga muslim untuk dihidangkan pada tempat terpisah.

d) Perayaan Hari Besar Keagamaan

Dalam Perayaan Hari Besar Keagamaan, misalnya pada saat pawai bersama dalam acara pawai ogoh-ogoh yang disebut Pengerupukan. Keterlibatan warga Kampung Islam tentu sebatas hal-hal yang tidak menyalahi ketentuan agama Islam yang diyakini warga Kampung Islam misalnya sebatas membantu pengamanan jalannya pawai dan yang lainnya sebatas ikut memeriahkan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

e) Kerjasama di Bidang Keamanan

Dalam berbagai momen perayaan keagamaan, dilakukan kerjasama pengamanan acara-acara, baik yang dilakukan oleh Desa Adat maupun Kampung Islam. Kedua belah pihak saling memberikan bantuan pengamanan yang dilakukan oleh Pecalang masing-masing pihak.

f) Kebersamaan Dalam Acara Duka,Terkena Musibah Maupun Suka-Cita

Jika ada yang mendapat kemalangan seperti kematian atau musibah lainnya, ataupun sukacita seperti perayaan pernikahan, maka kedua belah pihak warga ikut dalam kebersamaan, saling mengunjungi, memberikan bantuan dalam hal kemalangan, dalam hal sukacita mereka akan saling mendoakan dan hadir jika mendapatkan undangan dari yang mempunyai hajat.

g) Penyelesaian Perselisihan

Kondisi Desa Adat Angantiga saat ini sangat kondusif, hubungan antar warga yang terdiri atas berbagai umat beragama terjalin sangat baik. Kondisi demikian itu sudah terjalin secara turun-temurun karena awalnya ada hubungan kekeluargaan melalui kawin-mawin dan tetap terjaga oleh semua perangkat desa baik yang ada di kampung muslim maupun di kampung Hindu. Hanya saja, riak-riak kecil yang menyangkut hubungan antar warga masih sering terjadi misalnya keributan antar remaja yang disebabkan oleh kenakalan anak muda/ remaja yang sering kebut-kebutan dalam mengendarai motor. Hal lain yang berkenaan dengan ketersinggungan dalam pelaksanaan prosesi keagamaan. Potensi konflik ada, tetapi bersifat laten terutama disebabkan oleh

kesenjangan sosial antara warga Hindu dan Muslim juga terjadi ketidak-adilan pemerintah daerah terhadap distribusi dana-dana bantuan seperti bantuan desa adat yang tidak menyentuh kampung muslim sama sekali.

Riak-riak kecil tersebut tidak sampai menimbulkan permusuhan di antara kedua belah pihak, disebabkan karena setiap kali terjadi masalah segera dapat diselesaikan oleh pemangku adat kedua belah pihak dan jika tidak dapat diselesaikan maka melibatkan pengurus Banjar Dinas. Usaha pengurus Banjar Dinas dan bahkan anggota DPRD asal daerah pemilihan daerah ini untuk memasukkan dan atau mengupayakan agar kampung Muslim Desa Angantiga ini juga mendapatkan bantuan yang sama seperti bantuan untuk Desa Adat (kampung Hindu) belum membuahkan hasil (Wawancara dengan Kelian Banjar Dinas Angantiga, 5 Mei 2013).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Setiap upaya untuk meningkatkan keharmonisan, ketentraman dan rasa penuh kebersamaan dalam suatu masyarakat/kelompok warga dalam suatu komunitas tentu senantiasa mendapat rintangan dan hambatan, selain juga dukungan. Berikut di antara faktor pendukung maupun penghambat dalam upaya memelihara Kerukunan Umat Beragama di Desa Adat Angantiga:

a) Faktor Pendukung: Di antara faktor pendukung upaya pemeliharaan kerukunan adalah: (i) Adanya kesepahaman di kalangan masyarakat yang sudah turun temurun; (ii) Masing-masing kampung baik Kampung Hindu maupun Kampung Muslim

mempunyai awig-awig (peraturan sendiri-sendiri); (iii) Jika menyangkut urusan bersama maka berlaku regulasi umum yang dikoordinasikan oleh Banjar Dinas misalnya gotong royong bersama, atau hal-hal lain yang menyangkut urusan pemerintahan.

b) Faktor Penghambat: Adapun di antara faktor penghambat upaya kerukunan umat beragama di Desa Angantiga antara lain: (i) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah; (ii) Lapangan kerja yang sangat terbatas; (iii) Tingkat ekonomi mayoritas masyarakat rendah disebabkan luas wilayah Desa Angantiga sangat sempit yang terdiri atas perbukitan dan jurang; (iv) kenakalan remaja semakin meningkat pengaruh dari luar baik dibawa langsung oleh individu-individu maupun pengaruh media massa dan elektronik.

4. Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat

Keberadaan Desa Adat Angantiga memang sudah berabad-abad lamanya. Jarak wilayahnya yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten dan letaknya yang secara geografis berada di antara bukit dan jurang, pada mulanya tidak mudah mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten. Namun, dengan semakin terbukanya akses untuk menjangkau wilayah ini maka berbagai perhatian pemerintah mulai diberikan kepada Desa Adat Angantiga, seperti tersedianya Sekolah-Sekolah Dasar Negeri dan sarana/prasarana lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Khusus untuk kepentingan Kampung Muslim yang berada di Desa Adat Angantiga terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) yang akhir-akhir ini baru saja dibangun oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung.

Ada beberapa tanggapan dari masyarakat dan Ketua MUI Kecamatan Petang terkait dengan upaya untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama yang memang sudah lama terwujud di Desa Adat Angantiga, di antaranya adalah:

a) Desa ini semakin kondusif dan harmoni disebabkan oleh kekompakan pengurus Desa.
   Adat baik dari pihak Kampung Hindu maupun Kampung Muslim, pengurus kampung senantiasa mengarahkan dan membimbing para remaja baik yang tergabung di dalam Sekehe Taruno Taruni (STT Tri Cakti) untuk remaja Hindu maupun yang tergabung dalam Remaja Masjid Baiturrahman (Remaba) Kampung Muslim;
b) Telah terjadi peningkatan keakraban dan kebersamaan antar warga Hindu dan Muslim disebabkan adanya peningkatan pemahaman keagamaan terutama di kalangan muslim tidak lagi terjadi semuanya sama sehingga tidak tahu mana yang boleh dan tidak boleh dimakan misalnya. Saat ini jika ada hajatan dan dilakukan oleh pihak warga Hindu maka mereka telah menyiapkan tempat dan masakan khusus untuk muslim dan hewannya dipotong dan dimasak oleh warga muslim, jika ada kenduri dari pihak warga Hindu maka warga muslim membantu dalam bentuk apa saja di dalam nampan misalnya kemudian sebagai kembalinya dari pihak warga Hindu mengembalikannya dengan diisi telor dan atau buah-buahan yang dapat dimakan oleh saudaranya yang muslim;
c) Dalam hal pemberdayaan masyarakat dari kaum ibu-ibu pernah ada dilakukan training atau praktek pembuatan Jahe Instan yang diprakarsai ibu-ibu PKK dari Kecamatan;
d) Usul agar bantuan untuk Desa Adat Angantiga dari APBD, yang terus mengalir setiap tahun karena sudah ada Peraturan Daerahnya jika Kampung Muslim belum

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

memungkinkan untuk masuk di dalam Perda tersendiri maka pemanfaatan bantuan tersebut dapat juga dinikmati oleh warga Kampung Muslim (Rangkuman dari hasil wawancara dengan pengurus Desa Adat, Kampung Islam dan Ketua MUI Kecamatan Petang, 5 Mei 2013).

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan beberapa hal berikut:

a) Desa Adat Angantiga tidak berarti memisahkan diri dari kebersamaan dengan daerah lain yang sudah terwujud selama ini.
b) Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Ciri desa adat antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa.
c) Eksistensi Desa adat di Bali diakui oleh pasal 18 UUD 1945 dan dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6 Tahun 1986, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali. Kelembagaan Desa adat bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana.
d) Dalam menjalankan fungsinya desa adat di Desa Angantiga membentuk beberapa lembaga yang bertugas membantu menjalankan tugas-tugas desa adat. Lembaga-

lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya tetap melibatkan warga muslim selain Sekehe Shanti yang khusus membidangi terkait upacara di tempat suci umat Hindu. Norma Menyama *Braya* dalam kehidupan umat Hindu menuntut setiap warga menganggap anggota warga yang lain sebagai anggota keluarganya sendiri, sehingga memunculkan ikatan sosial yang kuat dan terbangun kerukunan hidup.

e) Peran Desa Adat Angantiga dalam memelihara kerukunan umat beragama dapat terlihat di antaranya peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang kemasyarakatan lainnya. Sedangkan peran desa adat dalam mencegah terjadinya gesekan di antara warga, antara lain: pengaturan penyiaran agama, pernikahan beda agama dan hewan peliharaan.

f) Faktor pendukung pemeliharaan kerukunan umat beragama di antaranya: masih terikat dengan kesepahaman yang sudah turun temurun, masing-masing kampung mempunyai awig-awig (peraturan sendiri-sendiri), jika menyangkut urusan bersama maka berlaku regulasi umum yang dikoordinasikan oleh Banjar Dinas misalnya gotong royong bersama, atau hal-hal lain yang menyangkut urusan pemerintahan.

g) Beberapa faktor penghambat upaya pemeliharaan kerukunan di antaranya: tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, lapangan kerja yang sangat terbatas, tingkat ekonomi mayoritas masyarakat rendah disebabkan oleh wilayah desa Angantiga sangat sempit dan terdiri dari perbukitan dan jurang, kenakalan remaja yang semakin meningkat oleh pengaruh dari luar baik dibawa langsung oleh individu - individu maupun pengaruh media massa dan elektronik.

h) Konflik terbuka tidak pernah terjadi, hanya riak-riak kecil berupa keributan antar remaja yang disebabkan oleh kenakalan remaja. Potensi konflik ada walaupun bersifat laten disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ketidakadilan pemerintah dalam pembagian dana-dana bantuan seperti bantuan terhadap desa adat yang tidak menyentuh kampung muslim sedikitpun di desa Angantiga.

2. Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan di atas direkomendasikan hal-hal berikut:

a) Keterlibatan warga muslim dalam desa/banjar adat Angantiga hendaknya tidak terbatas pada menghadiri, berpartisipasi dalam acara-acara jika diundang, namun hendaknya terlibat di dalam kepengurusan sepanjang yang tidak menyangkut urusan yang bertentangan dengan agama dan keyakinan misalnya dapat terlibat dalam Lembaga Perkeriditan Desa (LPD).

b) Kondusifitas Desa Anggantiga yang selama ini terlihat dan dirasakan oleh warganya perlu dipelihara dan ditingkatkan dengan melakukan kerjasama antarwarga yang lebih intensif lagi.

c) Perlu motivasi dan dorongan yang lebih kuat lagi dari tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama bahkan pemerintah setempat kepada para pemuda dan remaja untuk keluar dari daerahnya baik untuk menuntut ilmu dan atau untuk bekerja, mengingat sangat terbatasnya sumber daya baik manusia maupun alam di Desa Angantiga.

d) Jika tidak memungkinkan mengubah Peraturan

Pemerintah Daerah tentang Desa Adat untuk memasukkan Kampung Muslim sebagai Desa Adat Muslim di dalam anggaran APBD dan tercatat sebagai Desa Adat tersendiri maka hendaknya bantuan untuk Desa/Banjar Adat Angantiga dapat pula dibagi penggunaannya untuk Kampung Muslim.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR PUSTAKA

Kecamatan dalam Angka, Kecamatan Petang Kabupaten Badung, tahun 2012.

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. Keduabelas, Edisi Revisi v.

Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011, Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan.

Diani, Mario, 2000, *"The Concept of Sicial Movement"* dalam Kate Nash, *Reading in*

Contemporary Political Sociology, Blackwell: Oxford University Press.

Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta, PT. Gramedia, Cet. v, Edisi yang Disempurnakan.

Moleong, Lexy, J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ketujuh belas.

Sunarto, Kamanto, 1993, *Pengantar Sosiologi,* Jakarta, Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Susanto, Astrid, S., 1983, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial,* Jakarta, Penerbit Binacipta, Cet. Keempat, Edisi Baru.

Tanribali, L., A., 2010, *Direktori Organisasi Kemasyarakatan,*

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba Lainnya, Jakarta, Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Triwibowo, Darmawan, et.al., 2006, *Gerakan Sosial: Wacana Civil Society bagi Demokratisasi*, Jakarta, LP3ES.

Vredenbregt, J., 1983, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia.

Wiktorowicz, Quintan, (Ed.), 2012, *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*(Judul Asli: *"Islamic Activism: A Social Movement Approach"*), Yogyakarta, Gading Publishing dan Yayasan Wakaf Paramadina, Cet.I.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

V

PERAN PERKUMPULAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL "BOEN TEK BIO" DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA TANGERANG

Oleh: Ahsanul Khalikin

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Tangerang

Dalam literatur sejarah Tangerang tercatat bahwa jejak Sejarah Tangerang banyak diwarnai dan dipengaruhi oleh akulturasi budaya dari beberapa etnis masyarakat yang dominan, antara lain meliputi budaya masyarakat Betawi, Tionghoa, Makasar, Lampung, dan budaya masyarakat Sunda. Dari sekian pengaruh budaya dominan tersebut, Titian Budaya Masyarakat Tionghoa termasuk paling menonjol dengan meninggalkan berbagai jejak sejarah yang masih dapat kita saksikan di wilayah Tangerang, khususnya Kota Tangerang.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Perkembangan Kota Tangerang tidak lepas dari peranan masyarakat Tionghoa yang telah menetap sejak lama. Mereka datang dan menetap di Tangerang melalui beberapa fase kedatangan, antara lain :

a) Fase Tahun 1407:

Berdasarkan Babad Sunda dalam kitab Tina Layang Parahyang disebutkan pada tahun 1407 telah terdampar rombongan kapal laut dari negeri Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Chen Ci Lung (Panglima Ha Lung). Pada saat itu kapal laut tersebut terdampar di desa Pangkalan (yang sekarang dikenal dengan Kecamatan

Teluk Naga) yang pada saat itu dipimpin oleh Adipati Anggalarang. Konon nama Teluk Naga tersebut diambil dari kapal laut yang berbentuk Kepala Naga yang terdampar di sebuah teluk di desa Pangkalan tersebut. Dikarenakan mereka terdampar serombongan menetap dan tinggal di desa tersebut dan melakukan pembauran dengan masyarakat dan melakukan kawin campur, sehingga memunculkan istilah Cina Bike, yaitu orang Tionghoa yang berasal dari keturunan bibi dan sinkhe (Baca Buku Tina Layang Parahyang).

b) Fase Tahun 1740:

Terjadinya kerusuhan pada tahun 1740 yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban di daerah Jakarta Barat yang pada saat itu disebut Batavia. Setelah pulih dari kerusuhan tersebut, Belanda pada saat itu meminta kepada masyarakat Tionghoa untuk membuka lahan dengan menganut sistem Tanam Paksa. Dimana masyarakat Tionghoa diminta untuk menanam tanaman yang hasilnya akan dikirim ke Eropa sebagai komoditas dagang Belanda. Hal tersebut menyebabkan dibangunnya komunitas-komunitas baru seperti Pondok Cabe, Pondok Jagung, Pondok Aren, dan lain sebagainya (Baca Buku Huru-Hara 1740, Tionghoa Dalam Pusaran Politik).

2. Benda dan Bangunan Bersejarah

Sehubungan dengan perkembangan Tangerang yang tidak lepas dari komunitas Tionghoa maka banyak bangunan-bangunan yang merupakan peninggalan-peninggalan masyarakat Tionghoa pada jaman itu, antara lain:

a) Kelenteng Boen Tek Bio:

Berdiri sekitar tahun 1684, terletak di kawasan

Pasar Lama, Tangerang. Di dalam kelenteng tersebut terdapat banyak sekali benda kuno dan bersejarah, seperti : Batu Tambur (sekitar abad ke-17), Patung Singa / Ciok Say (sekitar abad ke-17), Lonceng kuno (sekitar abad ke-18) dan Prasasti Kayu (sekitar abad ke-18).

b) Kelenteng Boen San Bio:

Berdiri sekitar tahun 1689 yang terletak di kawasan Pasar Baru, Tangerang. Di dalam kelenteng tersebut terdapat benda kuno dan bersejarah, seperti : Patung Singa / Ciok Say (sekitar abad ke-17) dan Perahu Pecun (berusia sekitar 100 tahun).

c) Kelenteng Boen Hay Bio:

Berdiri sekitar tahun 1694 yang terletak di kawasan Pasar Lama, Serpong. Di dalam kelenteng tersebut terdapat benda kuno dan bersejarah, seperti : Patung Singa / Ciok Say (sekitar abad ke-17).

d) Rumah Kapitan Oey Dji San:

Kapitan adalah jabatan Dewan Kong Koan yaitu sebuah perkumpulan yang dibentuk oleh Belanda untuk masyarakat Tionghoa sebagai pusat komunitas saat itu, yang pemimpinnya disebut sebagai Weijk Masteer (setingkat Lurah), Luitenant (setingkat Bupati), Kapitan (setingkat Walikota), Mayor (setingkat Gubernur). Konon rumah ini berdiri sebelum Kelenteng Boen Tek Bio.

Rumah Kapitan Oey Dji San terletak di daerah Karawaci dan memiliki keunikan tersendiri, di antaranya : Mengandung 3 unsur arsitektur (Belanda, Cina, dan Lokal), memiliki keindahan dengan berbagai ukiran di setiap sisi bangunannya, atap rumahnya berbentuk ekor wallet, pernah menjadi tempat penampungan masyarakat Tionghoa yang telah menjadi korban kerusuhan pada tahun 1946 dan pernah

pula menjadi pusat perkebunan karet terbesar di Tangerang (Baca Buku Tionghoa Dalam Pusaran Politik).

e) Rumah Keluarga Tan Un Long:

Rumah ini masih ada sampai sekarang dan terletak di daerah Gang Bansin, Karawaci Tangerang. Keunikannya adalah: Atap ekor wallet, memiliki papan arwah 8 generasi (konon katanya tidak ditemukan didaerah lain), memiliki Hio Lo (tempat hio / dupa, dari sekitar abad ke-17),

f) Makam Kapitan Oey Giok Koen:

Kapitan Oey Giok Koen adalah tokoh masyarakat Tionghoa pada saat itu. Yang merupakan pemimpin masyarakat Tionghoa, beliau meninggal sekitar tahun 1900 -an. Adapun makamnya memiliki keindahan dan keunikan tersendiri yang nisan nya konon didatangkan langsung dari Negeri Tiongkok. Namun sekarang, makam tersebut sudah tidak ada lagi, dikarenakan tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat. Makam tersebut sebelumnya terletak di daerah Pondok Arum, Tangerang.

g) Makam Kapitan Oey Kiat Tjin:

Makam seorang Kapitan Tionghoa terakhir yang meninggal pada tahun 1937 yang kini makamnya masih dapat kita lihat di daerah Karawaci, Gang H. Rain.

h) Rumah Kebaya:

Rumah macam ini masih dapat kita temui di daerah-daerah tertentu, namun kondisinya cukup meng-khawatirkan dikarenakan banyaknya pengusaha-pengusaha property yang akan membangun perumahan. Keunikan dari rumah kebaya: Keseluruhan bangunan menggunakan unsur kayu dengan pintu di tengah diapit oleh dua buah jendela, memiliki paseban untuk menerima tamu, memiliki latar untuk menjemur padi.

i) Perahu Pecun:

Perahu Pecun di Tangerang sangat mengandung sejarah yang sangat tinggi dan unsur budaya yang bernilai tinggi. Dimana perahu Pecun pernah meramaikan festival Pecun yang diadakan pada abad ke-19. Kini perahu tersebut telah dikeramatkan oleh masyarakat Tionghoa Tangerang dan berada di 3 wilayah, antara lain : Di Kelenteng Boen San Bio,□Di Belakang Kantor Pajak Karawaci, Tangerang, serta di Pemakaman Tanah Gocap, Tangerang.

j) Kereta Jenazah:

Masyarakat Tionghoa yang meninggal pada abad ke-19, umumnya dimakamkan di pemakaman umum dengan menggunakan kereta jenazah. Kereta ini berbentuk seperti delman dan didorong oleh tenaga manusia. Kereta tersebut masih dapat kita temui di Rumah Duka Boen Tek Bio, Tangerang. Referensi : Ziarah Kota Tangerang by Wahidin Halim, IPTI Banten & Berbagai Sumber.

k) Masjid Al-Adzom :

Masjid Al-Adzom, Kota Tangerang banyak diwarnai dan dipengaruhi dari akulturasi budaya dari beberapa etnis masyarakat yang dominan, antara lain meliputi budaya masyarakat Betawi, Tionghoa, Makasar, Lampung, dan budaya masyarakat Sunda. Dari sekian pengaruh budaya dominan tersebut, Titian Budaya Masyarakat Tionghoa termasuk paling menonjol dengan meninggalkan berbagai jejak sejarah yang masih dapat kita saksikan.

3. Keadaan Geografis dan Demografis

Jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2011 sebanyak 1.883.124 jiwa, dari jumlah yang ada penduduknya mayoritas beragama Islam. Menurut rekap data sementara

kehidupan beragama di Kota Tangerang hingga Per Januari 2011, penduduknya yang beragama Islam 1.650.878 jiwa (87,67%), Kristen 100.939 jiwa(5,36%), Katolik 49.219 jiwa (2,61%), Hindu 3.506 jiwa (0,18%), Buddha 77.579 jiwa (4,11%), Khunghucu 949 jiwa (0,05%). (BPS Kota Tangerang, *Kota Tangerang Dalam Angka 2011*).

Masing-masing umat beragama memiliki rumah ibadat, antara lain; Islam berupa masjid sebanyak 586 buah dan mushalla sebanyak 1.271 buah, Gereja Kristen sebanyak 57 buah, Gereja Katolik sebanyak 46 buah, Pura sebanyak 9 buah,Vihara sebanyak 39 buah, dan Kelenteng/Litang sebanyak 2 buah.

B. Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" Kota Tangerang

1. Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio"

Keberadaan Kelenteng Boen Tek Bio yang terletak di persimpangan Jalan Bakti dan jalan Cilame, Pasar Lama Tangerang, Banten tidak terlepas dari sejarah Kota Tangerang. Mengenai kedatangan orang Tionghoa pertama kali ke Tangerang belum diketahui secara pasti. Dalam kitab sejarah Sunda yang berjudul "Tina Layang Parahyang" disebut tentang kedatangan orang Tionghoa ke daerah Tangerang. Kitab tersebut menceritakan tentang mendaratnya rombongan Tjen Tjen Lung (Halung) di muara sungai Cisadane pada tahun1407. Pada waktu itu pusat pemerintahan ada disekitar pusat kota sekarang, yang diperintah oleh Sanghyang Anggalarang selaku wakil dari Kerajaan Pajajaran (Prosesi 12 tahunan Yang Maha Suci/YMS Kwan Im Hud Couw ke 14 2563/2012: 14).

Perahu rombongan Halung terdampar dan mengalami kerusakan juga kehabisan perbekalan. Daerah tujuan yang

semula ingin dikunjungi adalah Jayakarta. Dalam rombongan itu terdapat 9 orang gadis yang cantik, oleh prajurit Sanghyang Anggalarang disunting dengan konpensasi sebidang tanah dan yang laki-laki pendatang itu menikah dengan penduduk setempat, hasil pernikahan ini disebut peranakan Tionghoa. Setelah berkembang, peranakan tionghoa ini membuka lahan baru yang disebut Desa Pangkalan yang keberadaannya di daerah Teluk Naga, mereka juga mengaku sebagai Tang Lang ata u Tang Ren (orang dinasti Tang). Sesudah dua daerah itu berkembang, maka mereka mulai mencari lahan baru, melalui jalur sungai pergi ke tempat antara lain Pasar Lama, Pasar Baru, dan Serpong. Ini bisa dibuktikan dengan keberadaan tiga Kelenteng tua di Tan gerang, yaitu Boen Tek Bio, Boen San Bio, dan Boen Hay Bio. Selain itu menurut Tom Pires seorang pelaut Portugis bahwa tahun 1513 sudah ada komunitas Tionghoa di Tangerang (Prosesi 12 tahunan, 2012: 15).

Orang-orang Tionghoa melarikan diri ke daerah Pondok Cabe, Pondok Jagung, Pondok Aren, Pondok Pinang, Tegal Pasir (Kalipasir), Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di depan Kelenteng Boen Tek Bio dikenal dengan nama *Petak Sembilan*. Perkempungan ini kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan telah menjadi pusat perdagangan dan telah menjadi bagian dari Kota Tangerang. Daerah ini terletak di sebelah timur sungai Cisadane, sekarang daerah Pasar Lama (Prosesi 12 tahunan, 2012: 15).

Menurut sejarah, Kelenteng Boen Tek Bio berdiri diperkirakan sekitar tahun 1684, didirikan oleh kapitan (tuan tanah). Menurut cerita bangunan yang sekarang dibangun pada tahun 1684, prasasti tertua tertera tahun 1805, namun kelenteng itu agaknya berdiri pada abad 17. Yungyun, yang berkunjung pada tahun1884 mencatat bahwa kelenteng

itu tidak banyak berbeda dengan kelenteng lainnya yang ada di Batavia. Kelenteng Boen Tek Bio telah mengalami beberapa kali perbaikan, diantaranya pada tahun 1844 dan 1904. Kelenteng Boen Tek Bio ditetapkan sebagai Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" pada tanggal 12 Januari 1912 (Prosesi12 tahunan, 2012: 15).

Dalam pembukaan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio disebutkan; keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Suci Kwan Im Hud Couw serta ajaran Buddha, Khunghucu dan Tao dalam kehidupan sehari-hari dijalankan dengan penuh hikmat dan sujud. Hal di atas merupakan kewajiban dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio untuk turut membantu pemerintah dalam mengembangkan ajaran dan keyakinan tersebut (Statuten AD dan ART Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" 1912).

Asas didirikan Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" pada Bab III pasa l4 yaitu; berazaskan Pancasila, dengan tujuan pada pasal 5 adalah:

a) Mengikhtiarkan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang penuh kebajikan dan intelektual, sehat fisik, mental, social dan spiritual.
b) Menghimpun seluruh potensi umat Buddha, Khunghucu dan Tao sebagai warga negara Indonesia untuk membantu usaha pemerintah dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama melaksanakan pembangunan di bidang social dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c) Membentuk dan mengembangkan pelayanan masyarakat yang berkesinambungan untuk setiap orang

di bidang social sesuai kemampuan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

d) Menjalin kerjasama dengan organisasi social dan kemasyarakatan lainnya guna meningkatkan toleransi kehidupan social, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
e) Mengupayakan usaha-usaha yang menciptakan iklim sejuk, damai tenteram, dalam kehidupan penuh toleransi dan kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Statuten AD dan ART "Boen Tek Bio" 1912; 10).

Dalam bab III pasal 6, Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" bersifat; social, local dan hanya di Tangerang, serta tidak menjadi bagian (andebow) dari suatu organisasi, perkumpulan atau partai politik apapun juga (Statuten AD dan ART "Boen Tek Bio" 1912; 10).

Sedangkan usaha-usaha perkumpulan ini dijelaskan pada Bab IV pasal 7 yaitu:

a) Turut aktif membantu pemerintah dalam membina dan memajukan pendidikan, sosial, seni budaya, dan olahraga.
b) Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
c) Menyediakan dan mengusahakan sarana: rumah duka, tanah makam, crematorium, rumah abu, klinik, rumah sakit dan sarana-sarana social lainnya terutama bagi umat Buddha, Khunghucu dan Tao.
d) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya yang ada dalam masyarakat.

e) Menyelenggarakan kursus-kursus dan latihan-latihan, seminar-seminar, workshop- workshop dalam bidang sosial, kesehatan dan keterampilan umum.
f) Membentuk dan mendirikan pusat pelayanan masyarakat di bidang kesehatan umum dan konsultasi sosial.
g) Menjalankan usaha-usaha dan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan umum dan konsultasi sosial.
h) Mengusahakan bantuan materil dan pengumpulan dana untuk masyarakat Indonesia luas yang ditimpa malapetaka, kebakaran, bencana alam, kelaparan, kemiskinan dan lain sebagainya.
i) Mengupayakan bentuk bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang berprestasi tetapi kurang mampu berdasarkan kriteria tertentu.
j) Menerbitkan brosur-brosur, majalah-majalah, harian-harian atau penerbitan lain yang berhubungan dengan bidang social, kesehatan dan pendidikan.
k) Menjalankan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha-usaha tersebut di atas (Statuten AD dan ART "Boen Tek Bio" 1912; 11).

Terkait dengan keanggotaan pada Bab V pasal 8 dijelaskan; setiap warga Negara Indonesia penganut agama Buddha, Khunghucu dan Tao yang sudah berumur 17 tahun keatas atau belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah/ berkeluarga dan bertempat tinggal di Tangerang serta tidak menjadi anggota organisasi terlarang dan tidak menjadi pengurus partai politik. Jenis keanggotaan dapat dibedakan menjadi: anggota biasa, anggota penyukung/donator, dan anggota kehormatan. Keanggotaannya berakhir apabila;

meninggal dunia, mengundurkan diri, dipecat/diberhentikan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini (Statuten AD dan ART "Boen Tek Bio" 1912).

Struktur organisasi perkumpulan pada Bab VII pasal 12 disebutkan: Pimpinan Perkumpulan yang terdiri dari 3 (tiga) badan yaitu; Badan Penasehat, Badan Pengawas dan Badan Pengurus, yang terbagi atas pusat dan cabang. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Perkumpulan dan Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Vihara, Cetiya, Lithang dan Kuil yang ada di Tangerang.

Khusus Badan Pengurus terdiri dari: seorang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua atau lebih, 1 (satu) orang sekretaris atau lebih, 1 (satu) orang bendahara atau lebih, dan beberapa Koordinator/Kepala Bidang sesuai kebutuhan.

Dalam struktur organisasi perkumpulan "Boen Tek Bio" ini ada terdapat; Wakil Ketua I membawahi; Bidang Pendidikan Buddi, Bidang Pendidikan Setia Bhakti (Khunghucu), dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Wakil Ketua II membawahi: Bidang Agama Khunghucu, Bidang Agama Buddha, Bidang Persembahyangan. Wakil Ketua III membawahi; Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Bidang Anak Asuh. Wakil Ketua IV membawahi; Bidang Rumah Tangga dan Logistik, Bidang Rumah Duka, dan Bidang Tanah Makam (Struktur Kepengurusan Perkumpulan Boen Tek Bio).

2. Kegiatan-kegiatan terkait pemeliharaan kerukunan yang dilakukan

Adanya kelenteng Boen Tek Bio tidak terlepas adanya sejarah, seiring sejalan dengan masuknya orang-orang Cina dulu ke tanah Tangerang melalui sungai dari zaman Dinasti Ming sudah masuk menelusuri sungai,

sepanjang sungai Cisadani ada kelenteng pasti ada masjid. Artinya orang-orang pertama migran kemari ternyata (masih digali sejarahnya) namun dari kondisi yang ada itu kira-kira abad Ming yang memulai masuk sampai ke pasar, jadi orang-orang yang dibawa Cinghu (Muslim), dalam satu angkatan armada ada yang muslim dan ada yang masih tradisionil artinya mereka masih persembahyangan, ada juga buddhis dan ada khunghucu, karena tiga ajaran ini di zamannya sendiri selalu dipakai dalam kehidupan. Sehingga masuk kemari tidak heran seperti masjid di Kali Pasir ornamennya adalah ornamen oriental karena yang bangun onun katanya orang-orang seperti itu. Sebab daerah ini masih daerah masih sepi, sehingga melihat dari sejarahnya pertautan apalagi berkaitan keagamaan dari dulunya sudah tidak ada permasalahan di Tangerang (Ir. Udayakhsa Halim, Ketua Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" Kota Tangerang, Selasa, 7 Mei 2013).

Setelah berdirinya Boen Tek Bio 1912 (perkumpulannya), kelentengnya sendiri 1684, setelah dipormalisir ada sudah sekelompok orang membentuk perkumpulan, azas itu dituangkan disana bahwa memang azas untuk menaungi kaum Tionghoa dalam kehidupan pribadi mereka ada yang menganut Taoisme, Buddhis dan Khunghucu. Tiga ini menjadi azasnya komunitas yang ada saat itu. Tapi dalam praktek sosialnya mereka-mereka sendiri di tanah Tangerang yang namanya asimilasi sudah jauh hari terjadi, jangan heran di tanah Tangerang kulit hitam seperti ini kalau digali pasti punya akar, demikian juga mereka "pribumi" kalau kita lihat sejarah mundurnya malah nenek moyang dari Yunan pantat kecil dari kecil sudah tembok, oleh karena itu pertautan itu sudah ada darah oriental. Demikian juga yang sudah ada disini dari dulu dibangun masyarakat. Zaman

segitu be lum ada yang namanya kontrak, mereka bangun dibantu, itu terjadi sejak zaman dulu. Ketika ada pembangunan masjid agung pertama di tangerang umat yang ada ternaungi di Boen Tek Bio ikut membantu, terbukti pengurus ikut membawa batu, sehingga boleh dibilang kerukunan itu harusnya tidak jadi masalah di tangerang. (Ir. Udayakhsa Halim; Selasa, 7 Mei2013).

Kontribusi perkumpulan ini terhadap berbangsa dan bernegara selama 1 abad satu tahun bisa dicontohkan; bayangkan kita sudah memulai pendidikan murah bahkan diawali pendidikan gratis kira-kira 35 tahun yang lalu dimana sekolah dibangun di Litang Kungcu Bio sebelahnya tumpukan peti jenazah disekat sedikit, jadi anak-anak belajar melihat tumpukan jenazah dan sering bermain-main dengan peti jenazah. Lalu pendidikan juga diawali pendidikan buka sekolah Buddi sekarang dianggap dewa street, dulu itu pemakaman umum jalan dari sini ke Imam Bonjol perlu waktu kurang lebih satu jam, yang mengajar rohaniawan tidak dipungut biaya. Ini semata- mata bagaimana perkumpulan ini komitmen dengan azas tunggalnya "Boen Tek Bio" Boen artinya pendidikan berbudaya, Tek artinya berkebajikan. Bagaimana mendidik orang yang berkebajikan, mendidik orang yang moralitas. Oleh karena itu kita awali pendidikan seperti itu, harusnya bangun sekol ahan bukan soal yang mudah, butuh perjuangan yang luar biasa dan kelengkapan surat -surat yang luar biasa tapi kita sudah adakan dulu di tempat ibadat sehingga bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat. Walaupun pada saat itu hanya sebatas umat, umat ju ga masyarakat sebagai warga negara yang harus ditolong, pada saat itu sekolah negeri juga bayar, sedangkan tempat kita gratis yang mengajar rohaniawan. Mulai dari itu terus

berkesinambungan. Di zaman sekarang ini saya sering menghadapi akreditasi secara kebetulan jatoh tempo, jadi akreditor bingung Buddhi keren dan megah perkumpulan Boen Tek Bio uangnya banyak. Saya bilang kalau ada orang bicara seperti itu mari kita lihat, ini sekolah seiring sejalan sudah diakreditasi tentu laporannya sudah lengkap. Satu contoh anak-anak bimbel 350 ribu seminggu 2 kali sekali 1 jam setengah. Kalau di sekolah ini bayarannya mulai dari 40 ribu naik 50 ribu, karena yang masuk makin banyak dan rohaniawannya terbatas, engga kuat lagi bayar karena gurunya negeri. (Ir. Udayakhsa Halim; Selasa, 7 Mei 2013).

Kontribusi perkumpulan ini terhadap berbangsa dan bernegara selama 1 abad satu tahun bisa dicontohkan; bayangkan kita sudah memulai pendidikan murah bahkan diawali pendidikan gratis kira-kira 35 tahun yang lalu dimana sekolah dibangun di Litang Kungcu Bio sebelahnya tumpukan peti jenazah disekat sedikit, jadi anak-anak belajar melihat tumpukan jenazah dan sering bermain-main dengan peti jenazah. Lalu pendidikan juga diawali pendidikan buka sekolah Buddi sekarang dianggap dewa street, dulu itu pemakaman umum jalan dari sini ke Imam Bonjol perlu waktu kurang lebih satu jam, yang mengajar rohaniawan tidak dipungut biaya. Ini semata- mata bagaimana perkumpulan ini komitmen dengan azas tunggalnya "Boen Tek Bio" Boen artinya pendidikan berbudaya, Tek berkebajikan. Bagaimana mendidik orang yang berkebajikan, mendidik orang yang moralitas. Oleh karena itu kita awali pendidikan seperti itu, harusnya bangun sekolahan bukan soal yang mudah, butuh perjuangan yang luar biasa dan kelengkapan surat-surat yang luar biasa tapi kita sudah adakan dulu di artinya tempat ibadat sehingga bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat. Walaupun

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

pada saat itu hanya sebatas umat, umat juga masyarakat sebagai warga negara yang harus ditolong, pada saat itu sekolah negeri juga bayar, sedangkan tempat kita gratis yang mengajar rohaniawan. Mulai dari itu terus berkesinambungan. Di zaman sekarang ini saya sering menghadapi akreditasi secara kebetulan jatoh tempo, jadi akreditor bingung Buddhi keren dan megah perkumpulan Boen Tek Bio uangnya banyak. Saya bilang kalau ada orang bicara seperti itu mari kita lihat, ini sekolah seiring sejalan sudah diakreditasi tentu laporannya sudah lengkap. Satu contoh anak-anak bimbel 350 ribu seminggu 2 kali sekali 1 jam setengah. Kalau di sekolah ini bayarannya mulai dari 40 ribu naik 50 ribu, karena yang masuk makin banyak dan rohaniawannya terbatas, engga kuat lagi bayar karena gurunya negeri. (Ir. Udayakhsa Halim; Selasa, 7 Mei 2013)

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemelihartaan Kerukunan

a) Faktor Pendukung

Boen Tek Bio bukan agama, bukan sebuah kepercayaan yang diyakini oleh satu kelompok, melainkan semacam perkumpulan perpaduan 3 (tiga) agama, yakni; agama Buddha, agama Khunghucu dan Tao. Dalam perkumpulan tidak lagi membicarakan salah satu keyakinan agama, lebih banyak social eksen. Perkumpulan ini untuk mengakomodir berbagai macam kegiatan yang sifatnya untuk menjadi perekat ketiga agama, semacam ada rumah duka untuk dipakai ketiga keyakinan.

Tidak lagi memperdebatkan masalah prinsip-prinsip perbedaan keyakinan. Tidak pernah terjadi gesekan karena perbedaan keyakinan, karena tidak menjadi

wilayah Boen Tek Bio, menurut mereka keyakinan *inheren* menjadi keyakinan masing-masing, mereka beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Jelasnya, Boen Tek Bio semacam organisasi keagamaan dan social tempat berkumpulnya agama Buddhi, Khunghucu dan Tao dan kegiatannya lebih banyak yang bersifat social eksen (Abd Rozak; Tokoh Agama Muda Tangerang, Jum'at, 10 Mei 2013).

Peran Boen Tek Bio sangat kuat, secara tidak langsung tugas pemerintah sangat terbantu karena mereka sudah berjalan sangat lama dengan bagus, selanjutnya tugas pemerintah lebih banyak melakukan pembinaan, koordinasi dan komunikasi kepada berbagai kelompok yang ada di wilayah Kota Tangerang (Abd Rozak; Jum'at, 10 Mei 2013).

b) Faktor penghambat

Terjadinya gejolak pembantaian peranakan Tionghoa pada tahun 1946 (zaman gedoran) dan adanya kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap Umat Khonghucu menjadikan hak-hak pelayanan mereka tidak mendapatkan legalitas dalam kebebesan berkeyakinan dan beribadah menurut keyakinan yang sudah menjadi leluhur mereka lakukan, sehingga banyak diantara mereka legalitas identitas dirinya beragama lain seperti; Buddha, Kristen, Katolik, Hindu tetapi rutinitas ritual keagamaannya tetap pada Khunghucu.

Sebagian besar peranakan Tionghoa yang ada di Indonesia khususnya Tangerang merasakan kejadian yang dialami waktu tempo dulu menjadi sesuatu yang trauma yang pernah dialami bagi orang tua mereka, sehingga dimasa sekarang ini mereka lebih berhati - hati dan tidak

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

terlalu menonjolkan terhadap legalitas keyakinan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun diantara mereka sudah banyak melakukan berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan masyarakat bahwa mereka itu bagian dari unsur bangsa yang memiliki kontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara di Indonesia yang sama-sama kita cintai.

4. Kasus-kasus Konflik Keagamaan yang Pernah Terjadi dan Cara Penanganannya

Hanya sekali noda tercatat di Tangerang pada tahun 1946 (zaman gedoran) waktu itu baru merdeka, intinya saat habis zaman kemerdekataan ada terjadi gejolak, entah bagaimana caranya waktu itu baru merdeka belum stabil dan belum mantap dan mapan, sehingga adanya krikil-krikil kecil dari Jakarta digosepkan bahwa ada seorang Tionghoa mengibarkan bendera Mica, sehingga terjadilah huru-hara, sehingga orang Tionghoa yang berada dipesisir tangerang sedangkan tangerang tidak terjadi apa-apa, yang dibilang tangerang benteng (pasar lama) tidak terjadi apa-apa, tapi yang terjadi di tangerang pinggiran seperti Pasar Kemis sampai daerah Karawaci terjadi pembantaian besar-besaran orang Tionghoa. Oleh karena itu kami mengingatkan kepada generasi muda bahwa ini adalah sejarah kelam yang harus ditutup (pengertian ditutup tidak boleh berulang) tapi layak masyarakat harus tahu. Kejadian hanya issu seperti itu yang menjadi korbannya ribuan termasuk kakek mertua saya jadi korban bagaimana dia melalarikan ke atas ditembak, dan yang membantai itu menurut sejarahnya (buku) bukan kaum-kaum garis keras, tapi turut campur tangan militer dapat dibayangkan bagaimana orang-orang dibakar hidup-hidup. Oleh karena itu yang sudah bermukim puluhan tahun

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

generasipun tanahnya diambil dan orangnya dibakar. (Ir. Udayakhsa Halim; Selasa, 7 Mei 2013).

Penyelesaiannya pada saat itu (menurut buku sejarah) ada turut campur tangan dari pemerintah pusat termasuk juga gerakan-gerakan kaum Tionghoa yang merasa militan dan nasionalis ini tidak benar begini, mereka mengusulkan pada zaman itu kepada Presiden Soekarno untuk bagaimana mempersenjatai kaum Tionghoa, coba bayangkan mereka rakyat jelata tiap kali berpetani, berkebun dibantai bersenjata berami-rami · korbannya ribuan orang. Tangerang pemicunya sehingga menyebar kemana-mana. Sejak zaman itu sudah ditenangkan oleh pemerintah pusat turut campur sampai (waktu baru kemerdekaan) pihak RRC juga turut campur tangan, bagaimana menegur kok ada orang-orang bisa terjadi seperti itu, kita bersyukur waktu itu masalah bisa diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi apa-apa dalam kotanya. Setelah itu kegiatan-kegiatan kita dulunya selalu konteks dengan masyarakat setempat. Ada klenik di belakang kelenteng Boen Tek Bio, mereka yang penghuni di belakang sudah banyak asimilasi pribumi dengan keturunan Tionghoa, jadi mereka sebenarnya sudah tidak ada masalah dan pola kehidupannya juga mestinya rukun hanya pemicu saat itu adalah pemicu politik (masyarakat yang dipolitisasi) yang zaman kemerdekaan banyak tidak puas dengan kepemimpinan Presiden Soekarno, garis -garis keras berusaha bagaimana memicu konflik-konflik di daerah salah issu yang paling gampang diissukan masalah itu. Padahal kalau kita melihat sejarahnya orang-orang Tionghoa di Indonesia walaupun tidak banyak tapi juga ada berkontribusi langsung termasuk pembuatan-pembuatan kamus bahasa Indonesia yang bermuatan melayu, termasuk

di tangerang kalau melihat dari batu prasasti yang ada di museum orang datang ke sini untuk mengumpulkan sejumlah dana untuk membangun darmaga dan membangun jalan, jadi kota ini boleh dibilang dibangun oleh mereka-mereka yang berurunan sosial. Setelah zaman itu berlarut pengurus-pengurus sebelum Ir. Udayaksha Halim sempat juga bagaimana hal ini dilestarikan, oleh karena itu salah satu cara seperti perayaan arakan peringatan 12 tahunan YMS Kwan Im Hud Couw ke 14 2563/2012 bukan Cuma kelompok etnis Tionghoa saja yang terlibat dari zaman dulunya berbagai etnis yang terlibat. Itulah sampai sekarang yang baru kami peringati kembali sebagai tali silaturrahmi yang bisa mempererat lintas batas agama, primodial, kesukuan, hal ini yang kami anggap baik termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial. Sampai saat ini sejauh yang kami jalanin, bagaimana kita juga memberi atau melakukan tindakan sosial untuk kemasyarakatan. Banjir untuk itu pemerintah selalu memberi apriasi kepada Boen Tek Bio, kalau banjir dimana mereka tidak perlu minta, kita yang merasa harus, kita bikin dapur umum, kita kirim sampai terakhir kemarin karena terpaksa saya turun langsung ke lapangan, bagaimana liner-liner kita dibagian bawah untuk mendistrubusikan makanan tidak gampang, banyak institusi-institusi harusnya mereka membantu lebih banyak tebar pesona, bayangkan perahu karet di atas mobil begitu banyak, tapi tidak diturunkan dan kita coba pinjam untuk bawa obat tidak diberikan. Terpaksa kita kumpulkan dana untuk beli perahu karet sendiri, jadi kalau banjir bawa perahu karet sendiri, tahun ini banjir di Cileduk dan Mutiara Pluit. Itu salah satu bentuk bagaimana sekarang menjalin keperdulian sosial tidak ditentukan hanya pada kaum tersendiri.

Konflik yang baru terjadi tahun 1998 dalam Kota Tengerang aman sebab tidak terjadi apa- apa, tangerang terjadi di wilayah pinggiran seperti Lippo Karawaci, pada saat itu yang jaga disini semua orang-orang belakang di Kali Pasir (pribumi/muslim) dalam kota tangerang aman, karena harusnya tidak dipermasalahkan, isteri saya sendiri pribumi mau apa lagi dipermasalahkan, kita hidup di zaman sekarang dengan pendalaman keagamaan dan pandangan kehidupan yang baik tidak boleh terjadi konflik lagi (Ir. Udayakhsa Halim; Selasa, 7 Mei 2013).

5. Pandangan Masyarakat dan Pemerintah Kota Tangerang Terhadap Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Oleh Perkumpulan Boen Tek Bio

a) Pandangan Masyarakat

Penduduk Kota Tangerang mayoritas beragama Islam 1.650.878 jiwa (87,67%), Kristen 100.939 jiwa (5,36%), Katolik 49.219 jiwa (2,61%), Hindu 3.506 jiwa (0,18%), Buddha77.579 jiwa (4,11%), Khunghucu 949 jiwa (0,05%). (BPS Kota Tangerang, Tahun 2011). Rumah ibadatnya Khonghucu yang sekarang dikenal orang hanya 1, meskipun kata orang ada 2, tapi yang agak rami di Jalan Kisaman, mereka menamakan rumah ibadatnya disebut Litang.

Dulunya orang Tionghoa kebanyakan masuk agama ke Buddha, malah kalau melihat kehidupan sehari-hari orang-orang Buddha dan Khunghucu itu-itu saja umatnya. Khonghucu itu bukan agama, katanya tidak mengerti kenapa sekarang menjadi agama, misalnya di rumah umat Khonghucu ada meja dan ada sajian, persembahannya untuk nenek moyang saja, tidak ada

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Tuhan itu dan ini. Tuhannya Buddha; Sidarta Gautama, sedangkan Khonghucu itu hanya ajaran budaya (K.H. Edi Junaedi Nawawi, Ketua MUI Kota Tangerang, Sabtu, 11 Mei 2013).

Karena umat Khonghucu sangat minoritas, hubungan umatnya dengan umat lain tidak mengganggu, namun kita melihat umat mayoritas itu ada kecemburuan masalah ekonomi saja. Kalau persoalan peribadatan dan lain-lain sekarang yang paling banyak mengganggu adalah umat Kristen. Orang-orang Buddha tidak masalah apa-apa, apalagi orang Khunghucu tidak kelihatan, cuma mereka itu menonjolnya di budaya saja seperti; budaya barungsai, arakan dewa-dewa, pecun, cap gomi, itu semua asal mulanya pesta rakyat yang tidak bersifat ritual. Jadi mereka itu lebih bersifat budaya dan kemanusiaan (K.H. Edi Junaedi Nawawi; Sabtu, 11 Mei 2013).

Masyarakat Tangerang menyebut yang namanya Boentek Tek Bio atau Boen Tek Bio adalah disebutnya Vihara berarti Buddha, kalau Khonghucu tempat ibadatnya Litang, jadi Litang khususnya umat Khonghucu. Pada upacara pesta adat, yang mengundang justru pemerintah kota Tangerang, contoh; pesta Pecun sudah di *kamonplase* dengan pestival Cisadane, sebab zaman Soeharto sudah tidak ada, zaman Gus Dur muncul lagi, tapi sekarang ini pestival Cisadane padahal waktunya waktu pecun, seperti; cap gomi, dan acara lainnya sudah tidak ada lagi kecuali khusus di vihara, kalau dulu justru se kota Tangerang (K.H. Edi Junaedi Nawawi; Sabtu, 11 Mei 2013).

Dalam Boen Tek Bio ada kesepakatan, ada aturan main yang disepakati 3 keyakinan agama misalnya, ketika

seseorang beribadah diantara mereka tidak ada saling mengganggu meskipun tempat ibadat sama, tidak ada bujukan dan rayuan untuk ditarik ke salah satu keyakinan. Tidak pernah terjadi rayuan pindah misalnya dari Buddha diajak pindah ke khunghucu, kalaupun ditemukan ada kepindahan tidak melalui proses rayuan melainkan kesadaran bahwa merasa dulunya orang Khunghucu karena transisi zaman tidak ada legalitas mereka menggunakan KTP Buddha setelah Khunghucu disahkan mereka bisa pindah secara berbondong-bondong. Tapi di Boen Tek Bio tidak ada rebutan penganut dari tiga agama, maka di Boen Tek Bio Kota tangerang menjadi sebuah model konfigurasi pertemuan agama-agama, memang ditempat lain agak sulit.

Aktifitas kegiatan mulai dari rumah duka, pengurusan pelayanan jenazah, pendidikan, pengobatan klinik sampai punya mobil operasional, anggaran cukup besar karena Boen Tek Bio bergabung kompak. Waktu membagikan beras hari agama-agama tertentu seperti bantuan kepada ribuan umat Islam sampai beras berton-ton (Abd Rozak, Tokoh Agama Muda di Tangerang, Jum'at, 10 Mei 2013).

Dalam rangka mengatur kesepakatan dalam memelihara kerukunan umat beragama selama ini mereka diajak dalam pembinaan social kemasyarakatan oleh pihak Pemkot Tangerang, misalnya; setiap ada pengobatan gratis, peringatan Hari Besar Agama, even-even sifatnya lokal ulang tahun Pemkot Tangerang, even MTQ, even lainnya, mereka selalu dilibatkan karena proteksinya besar, umatnya banyak, dana mencukupi serta jaringannya yang luas, kemudian harmonisasinya

bagus, semua itu modal yang paling penting di Boen Tek Bio, tokoh-tokohnya banyak karena masing-masing punya liders di agama Buddha, Khunghucu dan Tao, mereka itu budaya menghormati dan budaya toleransi sangat tinggi karena tidak terdengar gesekan. Di era Presiden Gus Dur selama ini di Kota Tangerang tidak ada kedengaran mobilisasi dari Buddha ke Khunghucu, ada pemaksaan, kalaupun terjadi mereka membangun kesadaran sendiri. Kalau ada yang sudah terlanjur tetap beragama Buddha itu hak mereka, meskipun ada sendirian bahwa umat Khunghucu habis oleh Buddha gara-gara kebijakan pemerintah orde baru, makanya sekarang biarpun mereka memobilisir supaya yang Buddha menjadi Khunghucu, tapi tidak mungkin dilakukan dalam sebuah umat beragama, karena prosesnya sudah sangat panjang. Mungkin umat Khunghucu secara bertahap, secara pelan-pelan bagaimana mengembalikan yang dulu Khunghucu kembali menjadi agama Khunghucu (Abd Rozak; Jum'at, 10 Mei 2013).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dalam waktu dekat pihak Khunghucu melalui Kelenteng Khungcu Bio akan mengadakan seminar tentang *akar sejarah Islam dan Khonghucu di Kota Tangerang*, itu memang sudah diprogram dan dibicarakan, mereka sangat eksis dengan program-program penyadaran, program-program yang mengarah terciptanya kerukunan, perdamain, keadilan, social keadilan masyarakat semua itu nampak. Dan itu dengan cara bergabung dengan agama-agama lain seperti; Islam, Kristen. Mereka punya social yang sangat kuat, dengan apapaun mereka cepat merespon (Abd Rozak; Jum'at, 10 Mei 2013).

b) Pandangan Pemerintah Kota Tangerang

Tupoksi Kesbangpollinmas antara lain menangani masalah agama (lembaga keagamaan), termasuk masalah politik, keamanan, bencana, narkoba, perlindungan masyarakat, ormas keagamaan dan LSM. Bicara masalah agama sesuai dengan PBM Mendagri dan Menag No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang peran dan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah meningkatkan potensi kerukunan umat beragama di daerah, salah satunya bila hendak mendirikan rumah ibadat harus ada rekomendasi FKUB (Drs. H. Habibullah; Kepala Kesbanglinmas Kota Tangerang, 10 Mei 2013).

Situasi kerukunan umat beragama di Kota Tangerang relative kondusip hal ini tidak terlepas dengan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam memelihara kerukunan um at beragama dalam rangka peningkatan toleransi yang merupakan manifestasi kerukunan nasional. Sebab kerukunan nasional tidak mungkin terwujud tanpa adanya kerukunan di daerah, kerukunan di daerah tidak mungkin terwujud tanpa adanya kerukunan di lingkungan, kerukunan lingkungan tidak mungkin terwujud tanpa adanya kerukunan di keluarga, terakhir kerukunan pribadi yang merupakan ketahanan nasional (Drs. H. Habibullah; 10 Mei 2013).

Diakui di Kota Tangerang masing-masing bicara masalah aliran sesat, Ahmadiyah, Syiah dan Sunni semua itu bisa diatasi dengan baik, sebab pemerintah pro aktif, beda di daerah lain seperti kasus di Cianjur warga Ahmadiyah tidak boleh memiliki E_KTP tekanan dari ormas Islam tidak boleh dibuatkan akhirnya terjadi konflik. Kesbangpolinmas melakukan koordinasi dengan Binmas Polres Metro Tangerang (AKBP Harun Idrus) agar

Kota Tangerang tidak terjadi seperti di Cianjur, langsung dikunjungi ke markas Ahmadiyah di Jalan Kenanga-Cipondoh, pimpinannya Ustadz Syukir Ahmad. Ditanyakan bagaimana kerukunan Ahmadiyah di tempat, dijawab tidak ada masalah. Ditanyakan lagi E_KTP pada sudah bikin belum, dijawab sudah bikin E_KTP kurang lebih1.000 jemaah (Drs. H. Habibullah; 10 Mei 2013).

Terkait dengan agama Khonghucu selama Presiden Gus Dur dibolehkan kembali, dulunya orde baru terpaksa umat Khonghucu tidak dibolehkan agamanya Buddha, kembali dibolehkan sebagian besar sudah kembali lagi ke agama Khonghucu. Perkumpulan Bon Tek Bio dianggap bagus sosialnya sangat tinggi, sering membantu masyarakat yang kurang mampu berupa pelayanan kesehatan, berobat geratis, pendidikan sampai SMA gratis, memang ada batas pada kelas 3, cukup hanya menunjukkan KTP dan KK (Drs. H. Habibullah; 10 Mei 2013).

Hubungan Bon Tek Bio dengan pemerintah diakui bagus, pengalaman sewaktu Kepala Kesbangpollinmas manjadi lurah juga sering diundang dan mengundang dalam perayaan umat beragama, dalam rangka melakukan perayaan agama seperti; barungsai, arakan dewa-dewa, pecun, cap gomi, 100 tahun keagamaanya, pemerintah siap mengamankan agar tidak terjadi kemacetan dan ketidakamanan yang awalnya bisa menimbulkan potensi konflik (Drs. H. Habibullah; 10 Mei 2013).

Pada dasarnya pihak Kesbangpollinmas dan unsur pemerintah kota Tangerang lainnya, tidak membeda-bedakan dan mempersulit dalam memberikan pelayanan, yang penting kita jaga kerukunan, damai,

yang namanya perbedaan hal yang biasa, berbeda adalah rahmah. Kasus-kasus yang terjadi hanya sebatas dalam hal pendirian rumah ibadat misalnya belum diberikan izin sudah didirikan dibangun akhirnya ditegur dan distop selanjutnya izinnya diurus (Drs. H. Habibullah; 10 Mei 2013).

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan berikut:

a) Keberadaan Kelenteng Boen Tek Bio yang terletak di persimpangan Jalan Bakti dan jalan Cilame, Pasar Lama Tangerang, Banten tidak terlepas dari sejarah Kota Tangerang. Menurut sejarahnya Kelenteng Boen Tek Bio berdiri diperkirakan sekitar tahun 1684, didirikan oleh kapitan (tuan tanah). Kelenteng Boen Tek Bio telah mengalami beberapa kali perbaikan, diantaranya pada tahun 1844 dan 1904. Kelenteng Boen Tek Bio ditetapkan sebagai Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" pada tanggal 12 Januari 1912.

b) Aktifitas Boen Tek Bio, selain di bidang pendidikan, juga melakukan kegiatan urusan kematian mulai dari rumah duka, pengurusan jenazah, klinik, pengobatan sampai punya mobil operasional. Anggaran untuk kegiatan tersebut cukup besar karena para anggota kelompok Boen Tek Bio bergabung kompak.

c) Dalam partisipasi pemeliharaan kerukunan umat beragama, selama ini Perkumpulan Boen Tek Bio

diajak oleh pihak Pemkot Tangerang dalam pembinaan sosial kemasyarakatan, misalnya: setiap ada pengobatan gratis, peringatan Hari Besar Agama, even - even bersifat lokal hari jadi Pemkot Tangerang, mereka selalu dilibatkan karena potensinya besar, umatnya relatif banyak, dana mencukupi serta jaringannya yang luas. Mereka memiliki harmonisasi yang bagus, merupakan modal yang paling penting di Boen Tek Bio. Tokoh - tokohnya banyak, punya *leadership* di Buddha, Khunghucu dan TaO. Mereka mempunyai budaya menghormati dan budaya toleransi yang sangat tinggi, sehingga tidak terdengar ada gesekan.

d) Tercatat dalam sejarah sekali noda (konflik) di Tangerang pada tahun 1946 (*zaman gedoran*) waktu itu baru merdeka, intinya saat habis zaman kemerdekataan ada terjadi gejolak, entah bagaimana caranya waktu itu baru merdeka belum stabil dan belum mantap dan mapan, adanya krikil-krikil kecil dari Jakarta digosepkan bahwa ada seorang Tionghoa mengibarkan bendera Mica, terjadilah huru hara, sehingga orang Tionghoa yang berada di pesisir dan pinggiran Tangerang seperti; Pasar Kemis sampai Karawaci terjadi pembantaian besar-besaran orang Tionghoa. Oleh karena itu pihak Tionghoa mengingatkan kepada generasi muda bahwa ini sejarah kelam yang harus tidak boleh berulang tapi layak masyarakat harus tahu.

e) Konflik yang baru terjadi tahun 1998, dalam Kota Tengerang aman sebab tidak terjadi apa-apa, terjadi di wilayah Tangerang pinggiran seperti Lippo Karawaci, pada saat itu yang jaga disini semua

orang-orang belakang di Kali Pasir (pribumi/ muslim).

f) Kontribusi perkumpulan ini terhadap berbangsa dan bernegara selama kurang lebih1(satu) abad, dicontohkan; sudah memulai pendidikan murah bahkan diawali pendidikan gratis kira-kira 35 tahun yang lalu dimana sekolah dibangun di Litang Kungcu Bio sebelahnya tumpukan peti jenazah disekat. Anak-anak belajar melihat tumpukan jenazah dan sering bermain-main dengan peti jenazah. Lalu pendidikan juga diawali pendidikan sekolah Buddi sekarang dianggap dewa *street*, dulu itu pemakaman umum jalan dari sini ke Imam Bonjol perlu waktu kurang lebih satu jam, yang mengajar rohaniawan tidak dipungut biaya. Ini semata- mata bagaimana perkumpulan ini komitmen dengan azas tunggalnya "Boen Tek Bio" Boen artinya pendidikan berbudaya, Tek artinya berkebajikan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

2. Rekomendasi

Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio perlu dijadikan *rule of model* bagi harmonisasi umat beragama di Indonesia, berkumpulnya agama-agama dalam sebuah wadah organisasi visi dan misi tanpa memperdebatkan perbedaan keyakinan masing - masing agama, lebih banyak bergerak dibidang sosial keagamaan, kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, pencerahan yang harus dijadikan model di masyarakat. Bisa saja model di daerah provinsi kabupaten/kota misalnya; membuat perkumpulan sosial beberapa agama Islam, Kristen, Buddha, atau

agama lainnya berpencar menjadi dua-dua atau tiga-tiga tanpa lagi membawa atau menonjolkan simbol-simbol keagamaan tertentu, jadi tokoh-tokohnya duduk bareng membuat program, mencari kekuatan modal untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat semua.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. Keduabelas, Edisi Revisi v.

Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011, Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan.

Catalog Lomba & Dokumentasi, *Prosesi 12 Tahunan YMS Kwan Im Hud Couw ke 14 2563/2012,* Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" Kota Tangerang, 2012.

Diani, Mario, 2000, *"The Concept of Sicial Movement"* dalam Kate Nash, *Reading in Contemporary Political Sociology,* Blackwell: Oxford University Press. Go Gien Tjwan, *Desa Dadap Wujud Bhinneka Tunggal Eka,* Elkasa, 2008.

Iwan Santosa, *Peranakan Tionghoa di Nusantara,* Jakarta, Kompas, 2012

Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta, PT. Gramedia, Cet. v, Edisi yang Disempurnakan.

Komunitas Lintas – Budaya Indonesia, *Peranakan Tionghoa Indonesia Sebuah Perjalanan Budaya,* Jakarta, Intisari.

Moleong, Lexy, J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ketujuhbelas.

Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang,* Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2013

Sunarto, Kamanto, 1993, *Pengantar Sosiologi,* Jakarta,

Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Susanto, Astrid, S., 1983, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Penerbit Binacipta, Cet. Keempat, Edisi Baru.

Tanribali, L., A., 2010, *Direktori Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba Lainnya*, Jakarta, Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Tegus Setiawan, *Cina Muslim dan Runtuhnya Republik Bisnis*, Jakarta, Republika, 2012

Triwibowo, Darmawan, et.al., 2006, *Gerakan Sosial: Wacana Civil Society bagi Demokratisasi*, Jakarta, LP3ES.

Vredenbregt, J., 1983, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia. Wiktorowicz, Quintan, (Ed.), 2012, *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus* (Judul Asli: *"Islamic Activism: A Social Movement Approach"*), Yogyakarta, Gading Publishing dan Yayasan Wakaf Paramadina, Cet.I.

Daftar Informan/narasumber:

1. K.H. Edi Junaedi Nawawi; Ketua MUI Kota Tangerang
2. Drs. H. Habibullah; Kepala Kesbanglinmas Kota Tangerang
3. Drs. H. Ahmad Nawawi, M. Si; Kepala Kemenag Kota Tangerang
4. Drs. H. Muhammad Nahrowi, M. Pd; Kasubag TU Kemenag Kota Tangerang
5. Ir. Udayakhsa Halim; Ketua Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" Kota Tangerang.
6. Rudi Gunawijaya; Ketua Matakin Provinsi Banten

7. Oey Tjin Eng; Humas Perkumpulan Keagamaan dan Sosial "Boen Tek Bio" Kota Tangerang
8. Drs. H. Amin Munawar; Ketua FKUB Kota Tangerang
9. WS. Trisna Juanda; Pengurus FKUB Kota Tangerang, perwakilan Umat Khonghucu
10. Pdt. Deny Oping; Pengurus FKUB Kota Tangerang, perwakilan Umat Kristen
11. H. Misbih; Pengurus FKUB Kota Tangerang, perwakilan Umat Islam
12. MP. T. Harmanto; Pengurus FKUB Kota Tangerang, perwakilan Umat Buddha
13. H. Fahrurrozy; Sekretaris FKUB Kota Tangerang
14. H. Abdul Rojak, M. Ag; Tokoh Agama Muda Tangerang
15. H. Mudini; Pengurus MUI Kota Tangerang

IKHLAS BERAMAL
PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

VI
PERAN RUKUN KEMATIAN (RUKEM) DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KELURAHAN SURABAYA KECAMATAN KEDATON DAN KELURAHAN BUKIT KEMILING PERMAI KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Oleh: Haidlor Ali Ahmad

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi dan Demografi

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada kordinat 5°21'-5°30' lintang selatan dan 105°28'-105°37' bujur timur. Kota Bandar lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² (Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2012: 3), terbagi menjadi 20 kecamatan, 126 kelurahan (Koreksi Drs. HS Riyadi dalam FGD, 8 Mei 2013; data dari BPS Kota Bandar Lampung (2012) menyebutkan 13 kecamatan dan 98 kelurahan), 248 lingkungan, dan 2.679 RT. Berdasarkan administrasi kepemerintahan wilayah Kota Bandar Lampung di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Pesawaran; di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2012: 3).

Penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 891.374 jiwa, dengan rasio jenis kelamin102, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

Tingkat 14 wihara; dan Hindu 1 pura (Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2012: 97).

Menurut Drs. Khoiruddin Tahmid Ketua FKUB Bandar Lampung, dalam kehidupan keagamaan di Kota Bandar Lampung kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, mencapai 10.953 jiwa/km². Sedangkan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah di Kecamatan Kemiling, yaitu 2.613 jiwa/km² (Kota Bandar Lampung, data tahun 2012: 37).

2. Kehidupan Kegamaan

Penduduk Kota Bandar Lampung dilihat dari kepemelukan agama adalah sebagai berikut: pemeluk agama Islam berjumlah 714 005 jiwa, Kristen 35 933 jiwa, Katolik 23 143 jiwa, Buddha 16 964 dan Hindu 7 179 (Data Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung, 2013).

Sebagai sarana kehidupan keagamaan di Kota Bandar Lampung telah tersedia rumah ibadat bagi semua penganut agama yang ada. Bagi umat Islam tersedia 710 masjid, dan 815 mushala; bagi umat Kristen 20 gereja; Katolik 16 gereja; Buddha terdapat permasalahan yang mendesak yaitu masalah fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) yakni berupa kelangkaan lahan, terutama lahan pemakaman. Dalam masalah Fasos dan Fasum ini seharusnya pemerintah kota dapat memfasilitasi, tapi faktanya tidak. Pemkot Bandar Lampung harus membuat estimasi tentang lahan-lahan Fasos dan Fasum, termasuk kebutuhan tanah pemakaman. Sehingga tidak akan pernah terjadi sebagaimana yang dialami masyarakat Kelurahan Surabaya yang membeli tanah pemakaman secara swadaya di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selain letaknya di luar Kota Bandar Lampung juga relatif jauh dari

tempat pemukiman mereka (Drs. Khoiruddin Tahmid, dalam FGD, 8 Mei 2013).

B. Rukun Kematian (Rukem) dI Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton dan Kelurahan Bukit Kemiling Permai Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung

1. Identifikasi Rukun Kematian (Rukem)

Di Kota Bandar Lampung, Rukem terdapat di hampir semua RT/lingkungan atau blok di perumahan. Dilihat dari sisi kepengurusannya, Rukem dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu: (a) Rukem yang di bentuk oleh masyarakat Muslim tingkat RT, lingkungan dan blok di perumahan; (b) Rukem yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh pengurus masjid/mushala dan masuk dalam struktur organisasi kepengurusan masjid/mushala. Adapun yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Rukem kategori pertama.

Rukem dapat dikategorikan sebagai kelompok keagamaan karena Rukem tidak hanya memberikan dana sosial terhadap anggotanya yang mengalami musibah kematian saja, tetapi juga berkiprah sebagai motor penggerak dalam menjalankan syariat agama, minimal menunaikan *fardlu kifayah* mengurus jenazah, yakni meliputi memandikan, mengafani, menyolatkan, dan memakamkan jenazah. Bahkan ada Rukem yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan, seperti tahlilan pada pasca pemakaman jenazah, minimal dari hari kesatu sampai ketiga, ada yang dari hari kesatu sampai ketujuh, ada pula yang menyelenggarakan pengajian rutin, dan peringatan hari besar Islam (PHBI).

Selain kegiatan-kegiatan keagamaan, ada juga Rukem yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, seperti menyantuni

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

warga yang sakit yang menjalani rawat inap di rumah sakit terutama yang menjalani operasi, dan melaksanakan sunatan masal.

2. Rukem "Pengajian dan Kerukunan Belasungkawa Nurul Iman "A" di Lingkungan III Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton

Rukem Lingkunan III Kelurahan Surabaya didirikan pada tanggal 20 Desember 1984 (Kerukunan Pengajian Nurul Iman, 1984). Pada mulanya Rukem yang terdapat di Lingkungan III Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung ini diberi nama Kerukunan Pengajian Nurul Iman (KPNI) (Anggaran Dasar Kerukunan Pengajian Nurul Iman Kel. Surabaya Kedaton Tanjungkarang, 1985.). Dalam perkembangan selanjutnya berganti nama menjadi Kerukunan Belasungkawa & Majelis Taklim Nurul Iman "A" terlihat dalam kop surat tahun 2010 berdasarkan Kop Surat Data Anggota atau formulir calon anggota. Namun dalam symbol yang terdapat dalam kop surat tersebut hanya tertera tulisan, Majelis Taklim (di lingkaran bagian atas), Nurul Iman (di tengah-tengah), dan di lingkaran bagian bawah tertulis Kelurahan Surabaya-Kecamatan Kedaton- Kota Bandar Lampung.

Sedangkan dalam kop surat yang lain Susunan Kepengurusan Pereode 2010-2015 berbunyi Pengajian Nurul Iman "A" & Kerukunan Belasungkawa Kelurahan Surabaya (Kop surat susunan pengurus pereode 2010-2015). Berbeda pula dengan yang tertulis dalam Mukadimah Anggaran Dasar, pada poin kedua disebut nama Pengajian dan Kerukunan Belasungkawa Nurul Iman "A" (Kerukunan Pengajian Nurul Iman merupakan nama sejak awal Rukem ini yang didirikan pada tahun 1984). Yang terakhir ini merupakan nama yang terbaru yang disebutkan dalam draft

Mukadimah Anggaran Dasar yang baru yang akan dirapatkan untuk menggantikan anggaran dasar yang lama.

a) Latar Belakang dibentuk Rukem Lingkungan III Kelurahan Surabaya

Latar belakang di bentuknya rukem Lingkungan III Kelurahan Surabaya adalah: i) perlunya membangun ukhuwah dan silaturahmi warga masyarakat lingkungan; ii) kesadaran perlunya pembelajaran tentang keislaman; iii) untuk menjalin kerjasama sosial masyarakat; iv) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat berkenaan dengan kehidupan keagamaan; v) Memakmurkan pemanfaatan sarana peribadatan yang ada di lingkungan; vi) membangun persatuan sesama umat, menjauhkan masalah *firqoh* (perpecahan) dan khilafiyah di kalangan masyarakat Muslim; vii) komitmen menciptakan kerukunan sesama umat, khususnya intern umat Islam.

Alasan dari latar belakang yang disebut terakhir ini karena mayoritas masyarakat Lingkungan III Kelurahan Surabaya adalah muslim, sementara non muslim dapat dikatakan bisa dihitung dengan jari. Namun demikian kerukunan dengan umat lain tetap dijaga dan berusaha tetap bersama-sama meskipun terbatas pada masalah sosial-ekonomi atau masalah duniawi yang tidak ada kaitannya dengan masalah aqidah, seperti membesuk dan memberi santunan terhadap warga yang sakit, dan memberikan dana bantuan musibah banjir.

b) Tujuan Didirikan

Berdasarkan AD-ART lama (1985) tujuan didirikan Rukem KPNI di Lingkungan III adalah:

1) Untuk mendukung segala kegiatan LKMD Kel.

Surabaya

2) Membantu meringankan beban anggota keluarga KPNI bila terkena musibah atas meninggalnya salah satu keluarga dan tamu.
3) Ikut serta menunjang program pemerintah tentang wajib belajar bimbingan rohani, keluarga berencana (KB), kesehatan lingkungan (KL) dan lain-lain yang bersifat membangun.
4) Membantu anak yatim piatu, fakir miskin, anak putus sekolah yang dikarenakan kekurangan biaya dan kegiatan amal lainnya yang dinilai perlu untuk dibantu (AD ART tahun 1985).

Tujuan poin keempat tersebut merupakan tujuan yang mulia, namun hal ini masih merupakan sesuatu yang diedialkan atau belum dapat direalisasikan. Hal ini tampak dalam ketentuan selanjutnya yang berbunyi "Dalam hal dana yang diberikan kepada anak yatim, fakir miskin dan putus sekolah yang kekurangan biaya ini, kita segenap anggota harus mengadakan musyawarah dahulu". Selain itu sekretaris rukem juga mengatakan bahwa rukem yang diurus belum banyak menyentuh masalah sosial yang lain, menyantuni baru berupa sunatan massal, rencana bantuan dana pendidikan belum dapat terealisasikan (Wawancara dengan Sutrisno Noor, 5 Mei 2013).

c) Keanggotaan

Anggota Pengajian dan Kerukunan Belasungkawa Nurul Iman A semua Muslim, meskipun anggota tidak dibatasi wilayah lingkungan III, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) baru disebutkan "Anggota Pengajian dan Kerukunan Belasungkawa Nurul Iman A adalah segenap warga masyarakat di lingkungan III dan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

sekitarnya". Oleh karenanya ada anggota yang tinggal di Sukarame dan Way Halim.

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART), rukem ini tertutup untuk warga non Muslim. Karena dalam ART pada pasal Persyaratan Anggota disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota Pengajian dan Kerukunan Belasungkawa Nurul Iman A adalah: warga masyarakat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Surabaya dan sekitarnya. Berdasarkan data terakhir anggota rukem ini mencapai 115 KK.

d) Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Rukem Lingkungan III Kelurahan Surabaya antara lain:

1) Kegiatan pengajian rutin sebulan dua kali. Pengajian yang dilakukan dari rumah ke rumah dimaksudkan sebagai media silaturahmi warga. Untuk menggelar pengajian, tuan rumah mendapat bantuan dana Rp 200.000,- yang sebenarnya hanya cukup untuk membeli air kemasan gelas, karena yang hadir sekitar 75 orang. Meski jumlah bantuan tidak se berapa, namun biasanya jamuan berupa kue cukup lengkap, karena yang mendapat giliran merasa senang, sehingga dengan sukarela mengeluarkan uang pribadi untuk melengkapi jamuan yang dihidangkan. Disamping itu biasanya para tetangga dekat ikut serta menyumbang aneka macam kue/makanan. Yang mendapat giliran tidak merasa terbebani bahkan sebaliknya merasa senang, karena putaran giliran cukup lama, tiga tahun sekali baru mendapat giliran lagi, karena jumlah anggotanya cukup banyak. Namun jika yang mendapat giliran tidak sanggup

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

atau karena rumahnya kecil, maka pengajian diselenggarakan di mushala.

2) Pengajian bulan Ramadlan. Pengajian Ramadlan ini sekaligus untuk memakmurkan rumah ibadat. Warga yang tinggal di "atas" memakmurkan Masjid Al Manar, sedangkan yang di "bawah" memakmurkan mushala Al Muhtadin. (Istilah "atas" digunakan oleh penduduk setempat untuk menyebut bagian wilayah lingkungan yang topografinya lebih tinggi –yakni sekitar Masjid al Manar- dan "bawah" untuk menyebut wilayah yang lebih rendah yakni sekitar Mushala Al Muhtadin).
3) Pemotongan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban. Hewan kurban berasal dari anggota dan non anggota. Di samping itu juga menyelenggarakan arisan kurban, sehingga setiap tahun Rukem memotong kurban tidak kurang dari tiga ekor sapi dan belasan kambing.
4) Peringatan/perayaan Hari Besar Islam (PHBI). Pada momen-momen ini Rukem Lingkungan III Kelurahan Surabaya biasanya menyelenggarkan pengajian dengan mengundang pembicara/mubaligh yang sudah terkenal (kondang) dari luar, berbeda dengan mubaligh yang biasa diundang dalam pengajian rutin.
5) Sunatan massal satu tahun sekali, bekerjasama dengan Ibu-Ibu PKK. Kegiatan ini sudah berjalan selama tiga tahun. Sunatan massal dilaksanakan pada waktu libur sekolah, agar tidak mengganggu aktivitas belajar anak-anak. Sumber dana untuk sunatan massal ini diperoleh dari swadaya warga masyarakat dan anggota majelis taklim

PROPERTI DIP KEMENTERIAN AGAMA RI

6) Menyelenggarakan kegiatan sosial, seperti mengadakan kunjungan ke panti asuhan dengan memberikan santunan kepada anak yatim.
7) Memberi bantuan kepada keluarga yang mendapat musibah kematian.
8) Memberi bantuan kepada jamaah yang sakit, terutama bagi yang menjalani rawat inap di rumah sakit.

e) Aset yang Dimiliki

Rukem Lingkungan III Kelurahan Surabaya memiliki asset kekayaan antara lain berupa:

1) Satu unit kereta dorong untuk membawa jenazah (tempat pemakaman relatif jauh, terlalu berat bila dipikul).
2) Dua unit tenda dengan ukuran 4x6 m,
3) Kursi 200 buah.
4) Satu set sound system.
5) Hambal (Wawancara dengan Maria Theresia binti Hi. Moch. Zaini, Isteri Drs. Edy Suryadi, 7 Mei 2013).
6) Gudang dengan ukuran 4x6 m yang dibangun oleh jamaah pengajian. Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan inventaris yang dimiliki Rukem.
7) vii) Jembatan beton ukuran 8X1,5 m, untuk lalu-lintas penyeberangan menuju gudang yang letaknya berada di seberang sungai, di samping untuk penyeberangan penduduk sekitar yang memerlukan sekaligus untuk mempermudah akses jalan ke seberang sungai. Sebelum ada jembatan beton, tanah di seberang sungai merupakan lahan kosong, namun setelah ada jembatan tersebut penduduk semakin banyak dan hal ini tentu saja merupakan

amal jariah anggota Rukem (Drs. Edy Suryadi, dalam FGD, 8 Mei 2013).

f) Hak dan Kewajiban Anggota

Setiap anggota Rukem Lingkungan III dikenakan iuran bulanan sebesar Rp 6.000,-/bulan. Ketika tertimpa musibah kematian, anggota Rukem mendapatkan pelayanan berupa biaya penggalian kubur, peralatan pemakaman lengkap senilai Rp 750.000,-. Meskipun sudah ada dana dari Rukem, tetapi tradisi masyarakat berupa "uang ta'ziyah" juga masih berjalan. Selain itu, Rukem juga mengajukan permohonan dana musibah kematian melalui RT kepada pemerintah setempat (cq. Dinas Sosial). Biasanya Dinas Sosial memberikan santunan sebesar Rp 500.000,-.

Bagi anggota keluarga yang sakit dan rawat inap mendapat santunan "tali asih" sebesar Rp 150.000,- di luar itu masing-masing warga biasanya masih memberikan sumbangan sukarela secara pribadi. Bagi warga non anggota, juga mendapat pelayanan sebagai wujud kepedulian, meski tidak seistimewa seperti anggota. Bagi anggota Rukem apabila memerlukan/ meminjam tenda maupun kursi tidak dikenakan uang sewa. Sedangkan untuk non anggota untuk tenda dikenakan biaya pasang sebesar Rp 150.000,- dan sewa kursi Rp 500,-/kursi.

Rukem di Lingkungan III memiliki inisiatif untuk pembelian tanah pemakaman, karena tanah pemakaman yang ada sudah penuh. Inisiatif tersebut kemudian mendapat tanggapan positif dari pihak kelurahan (Wawancara dengan Maria Theresia binti Hi. Moch. Zaini, 7 Mei 2013). Pihak kelurahan kemudian melakukan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

pemungutan kepada semua KK, sebesar Rp 200.000,-/KK untuk membeli tanah pemakaman di Kecamatan Natar. Tanah pemakaman tersebut dibeli pada tahun 2012 yang lalu. Karena tempat pemakaman berada jauh di luar kota, maka untuk memudahkan pengangkutan jenazah Kelurahan Surabaya dari dana swadaya masyarakat membeli ambulan yang diberi nama "Kereta Merta" (Wawancara dengan Edy Supriyadi, 8 Mei 2013).

g) Upaya Pemeliharaan Kerukunan

1) Kerukunan Internal Islam

Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang poin satu "perlunya membangun ukhuwah dan silaturrahmi warga masyarakat lingkungan"; Pada poin enam, membangun persatuan sesama umat, menjauhkan masalah *firqoh* (perpecahan) dan khilafiyah di kalangan masyarakat muslim; Poin tujuh komitmen menciptakan kerukunan sesama umat, khususnya intern umat Islam.

Upaya pemeliharaan kerukunan intern umat Islam Pengajian dan Rukun Belasungkawa Al-Iman "A", dapat dikategorikan berhasil. Karena Rukem ini berupaya menjauhkan masalah firqoh dan khilafiyah. Meskipun umumnya masyarakat muslim Lingkungan III berfaham Nahdliyin, tapi Rukem dapat mengakomodasi faham-faham yang lain.

2) Kerukunan Antarumat Beragama

Di Provinsi Lampung dan khususnya di Kota Bandar Lampung–sebagai daerah sasaran transmigrasi sejak jaman pemerintah Hindia Belanda, sebagai tempat bertemunya berbagai macam etnis dan agama –kerukunan hidup antarumat beragama sudah

terbentuk sejak lama dan sudah menjadi tradisi pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Antarumat sudah terbiasa saling berinteraksi. Demikian pula di Lingkungan III Kelurahan Surabaya, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi umat lain cukup merasa terayomi tinggal di lingkungan tersebut. Jika terjadi musibah mereka saling mengunjungi tanpa mel ihat agama yang dianut oleh mereka yang tertimpa musibah. Demikian pula pada even -even hari besarkeagamaan mereka juga saling mengunjungi. Meski umat non-Muslim melakukan kunjungan pada waktu Idul Fitri setelah umat Islam selesai melakukan shalat Ied dan itu dihargai oleh umat Islam sebagai wujud solidaritas. Tapi pada waktu Natal, umat Islam melakukan kunjungan ke rumah umat Kristiani menunggu pada waktu peringatan Tahun Baru. Menurut Sutrisno, kunjungan umat Muslim pada perayaan Tahun Baru ini merupakan pemahaman warga Muslim tentang batas-batas aqidah dan yang tidak termasuk akidah, yang ditanamkan pada waktu pengajian. Menurut informan kami hal ini penting, di satu sisi untuk memelihara kerukunan antarumat di lingkungannya, dan di sisi lain tetap terjaganya akidah bagi warga Muslim (Wawancara dengan Sutrisno, 7 Mei 2013).

Pemeliharaan kerukunan antarumat antara lain, "jika ada musibah yang menimpa warga baik muslim maupun non muslim, Rukem akan menggalang dana dan menyalurkan kepada keluarga yang terkena musibah.

3. **Rukem "Al -Islah Blok "l" di Kelurahan Bukit Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling**

a) Latar Belakang Dibentuk Rukun Kematian (Rukem)

Rukem Al - Islah Blok "L" didirikan pada tanggal 11 Januari 2013 (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 2013). Pada mulanya masyarakat Blok L tergabung dalam rukem yang meliputi 4 blok, yaitu Blok I, K, L, dan S. Karena rukem yang meliputi 4 blok ini sudah terlalu banyak anggotanya, maka Blok I, K dan L memisahkan diri. Dalam perkembangan selanjutnya di masing-masing blok kemudian mengadakan pengajian sendiri-sendiri dan waktu berbeda-beda, sehingga menyulitkan warga untuk mengikuti pengajian-pengajian tersebut. Akhirnya masyarakat Blok L sepakat untuk memisahkan diri dan mendirikan rukem sendiri.

Pemisahan itu terealisir pada tahun 2013. Akibat dari pemisahan tersebut rukem Blok L tidak memiliki kekayaan apapun. Rukem Blok harus memulai dari nol. Namun rukem baru ini dituntut segera memiliki sarana perlengkapan pengurusan dan pemakaman jenazah. Karena musibah kematian jika telah datang waktunya tidak bisa ditunda. Oleh karena itu rukem Blok L meminjam uang masjid sebesar Rp 5.000.000,- untuk memesan keranda, pemandian jenazah, dan kain kafan (Wawancara dengan Halusi Mukri, 6 Mei 2013).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

b) Keanggotaan

Rukem Blok L memiliki anggota sebanyak 140 KK dan ada anggota non Muslim 1 KK. Untuk menjadi anggota, dikenakan uang pangkal Rp 10.000,- dan iuran bulanan sebesar Rp. 5000,- (Wawancara dengan Halusi Mukri, 6 Mei 2013).

c) Aset yang Dimiliki

Sekarang ini Rukem Al-Islah telah memiliki aset berupa alat pemandian jenazah stainless, keranda lengkap dengan tutupnya, drum pemandian, tiga ember ukuran 80 liter, gayung 1 lusin, payung jenazah, persiapan kain kafan 3 set, tabir pemandian, dan bendera kuning bordiran (Wawancara dengan Halusi Mukri, 6 Mei 2013).

d) Pelayanan

Bagi anggota yang mendapat musibah kematian mendapatkan santunan sebesar Rp500.000,- yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan penggalian kubur dengan nilai Rp200.000,- dan kain kafan, papan dan lain-lain senilai Rp 200.000,- Sebagaimana di Kelurahan Surabaya, tradisi santunan uang ta'ziah dari warga masyarakat yang ikut belasungkawa juga masih berjalan di kalangan masyarakat BKP.

Acara ritual pasca pemakaman, hari kesatu sampai hari ketika dilakukan pembacaan tahlil tanpa undangan. Sedangkan pembacaan tahlil pada hari ketujuh atas undangan shahibul musibah.

Bagi non anggota, jika mendapat musibah kematian juga mendapat pelayanan seperti anggota, akan tetapi setelah selesai pemakaman diwajibkan membayar Rp 500.000,-. Bagi anggota non Muslim Rukem hanya memberikan dana belasungkawa akan tetapi tidak bisa ikut mengurusi ritual pengurusan jenazah (Wawancara dengan Halusi Mukri, 6 Mei 2013).

e) Kegiatan-Kegiatan yang Dilakukan

Sebagai rukem yang baru, Rukem Al-Islah belum memiliki ban yak program dan kegiatan. Kegitan-kegiatan yang dilakukan oleh Rukem ini dapat dikatakan

masih sebatas melaksankan *fardlu kifayah* pengurusan jenazah. Di samping itu minimnya program dan kegiatan karena Rukem Al-Islah dipisah dengan kelompok pengajian (taklim), meskipun personil pengurusnya terdiri dari orang yang sama, hanya saja susunannya dibolak-balik. Sebagai contoh, pada struktur kepengurusan Rukem, Soleh Suwarta sebagai ketua dan Halusi Mukri sebagai wakil ketua. Sedangkan dalam struktur kepengurusan pengajian, Halusi Mukri sebagai ketua dan Soleh Suwarta sebagai wakil ketua. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan kegiatan terutama dalam pelaksanaan *fardlu kifayah* pengurusan jenazah sulit dipisahkan antara kegiatan Rukem dan majelis taklim (Wawancara dengan Halusi Mukri, 6 Mei 2013).

f) Upaya Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

1) Kerukunan Intern Umat Islam

Rukem Al-Islah meskipun baru didirikan namun telah dapat menciptakan kerukunan intern umat Islam. Rukem ini telah mampu membentuk rasa kebersamaan, meningkatkan solidaritas atau rasa kepedulian sesama warga terutama terhadap warga yang tertimpa musibah, baik berupa musibah sakit maupun kematian.

2) Kerukunan Antarumat Beragama

Peran pemeliharaan kerukunan yang dilakukan Rukem Al-Islah, antara lain: (a) anggota tidak hanya terbatas umat Islam tetapi juga termasuk non muslim; (b) jika umat muslim mengadakan tahlilan warga non muslim juga hadir; (c) pada perayaan hari besar keagamaan seperti hari Idul Fitri atau Natal, para anggota kelompok Rukem Al-Islah saling kunjung-mengunjungi.

4. **Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemeliharaan Kerukunan**

a. Faktor Pendukung

Pertama, wilayah kecamatan Kedaton termasuk wilayah kota sehingga cenderung aman dari konflik. Berbeda dengan wilayah *hinterland* (daerah pinggiran) seperti Sukarame dan Kota Sepang yang sering dijadikan sasaran penyiaran agama lain sehingga sering timbul ketegangan antarumat beragama (Wawancara dengan Sutrisno Noor, 5 Mei 2013), yang menurut Khoiruddin Tahmid, Kecamatan Tanjung Senang yang lebih tinggi tingkat konfliknya (Wawancara dengan Khoiruddin Tahmid, 8 Mei 2013). Kondisi yang cukup aman merupakan faktor pendukung bagi pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.

Kedua, tradisi saling kunjung dalam merayakan hari besar, umat non muslim biasa berkunjung pada hari lebaran, umat muslim juga membalas berkunjung pada hari besar mereka. Meskipun untuk hari natal, karena kalangan muslim setempat memandang sebagai hari ritual keagamaan, maka kalangan muslim melakukan kunjungan pada Tahun Baru. Agar tidak terjadi kesalahfahaman hal ini dijelaskan kepada kalangan muslim dan non muslim.

Ketiga, tradisi kunjungan berbelasungkawa dengan tanpa melihat agama, termasuk ritual pasca pemakaman (missal: tahlil) meskipun warga non muslim tidak ikut baca tahlil, mereka hadir untuk penghormatan terakhir.

b. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam pemeliharaan kerukunan antarumat beragama yaitu:

*Pertama,*upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama tidak diprogramkan oleh Rukem, karena dianggap selama ini umat beragama meski berbeda-beda agama dan keyakinan tapi mereka bisa hidup rukun dan damai.

Kedua, adanya keengganan sebagian warga untuk ikut menjadi anggota Rukem. Pengurus Rukem sudah menawarkan bagi semua warga untuk ikut menjadi anggota, tapi jangankan warga non muslim, warga muslim sendiri ada yang tidak mau ikut bergabung menjadi anggota Rukem. Ada berbagai alasan yang mereka kemukakan, misalnya: hanya sebagai penduduk sementara, keberatan terhadap jumlah iuran bulanan dan lain- lain.

5. Pandangan Masyarakat

Rukem merupakan lembaga sosial-keagamaan yang sangat penting keberadaannya, karena musibah sakit apalagi kematian sering terjadi di kalangan masyarakat yang hal itu di luar dugaan banyak orang. Pada saat keluarga secara ekonomi sedang dalam kondisi yang memprihatinkan, untuk makan seha ri-hari saja sulit tiba-tiba salah satu anggota keluarganya ada yang tertimpa musibah sakit atau meninggal dunia. Dalam kondisi susah kemudian ditimpa kesusahan yang lebih berat seperti itu jika tidak ada Rukem maka shahibul musibah akan mengalami tekanan yang sangat berat. Tetapi dengan keberadaan Rukem, maka shahibul musibah terbebas dari hampir semua kesulitan tersebut, karena semua pengurusan jenazah dari memandikan, mengafani, menyolatkan dan memakamkan ditangani oleh rukem.

Sebagai kelompok sosial keagamaan Rukem juga dipandang penting sebagai perekat dalam kehidupan sehari-hari sesama umat maupun antar umat. Sayangnya pemerintah daerah belum begitu perhatian terhadap keberadaan Rukem ini. Selama ini belum pernah pihak pemerintah mengadakan *work shop* tentang Rukem. Mungkin karena selama ini dipandang aman-aman saja dan tidak ada masalah.

Rukem dibentuk atas inisiatif masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Mereka belum terlatih menata dan mengelola organisasi, mereka belum mengenal manajemen yang baik (Wawancara dengan Jamaluddin, 8 Mei 2013. Keberadaan Rukem sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Sayangnya belum mendapat perhatian dari masyarakat (Wawancara dengan H. Edi Suryadi, 8 Mei 2013). Belum ada perhatian pemerintah kepada Rukem. Pengelolaan atau manajemen Rukem akan lebih baik, jika pada kesempatan tertentu pengurus Rukem diundang workshop (Wawancara dengan Hilaludin, 8 Mei 2013).

6. Pandangan Pemerintah

Selaku pejabat pemerintah Kepala Kantor Kemenag Kota, mengatakan bahwa selama ini pemerintah masih kurang perhatian terhadap keberadaan Rukem. Ia mengatakan bahwa dirinya pun tidak tahu jika ternyata ada Rukem yang memiliki anggota non muslim. Selama in i ia mengira semua Rukem hanya beranggotakan kepala keluarga (KK) yang beragama Islam saja. Jika tidak ada penelitian ini ia tidak akan mengetahui jika ada Rukem yang memiliki anggota non muslim (Wawancara dengan Hs. Riyadi, 8 Mei 2013).

Demikian pula pernyataan seorang staf Kesbang Kota Bandar Lampung, bahwasanya pemerintah daerah juga belum memperhatikan keberadaan Rukem yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Mungkin karena selama ini Rukem dipandang aman-aman saja dan tidak ada masalah (Wawancara dengan Sudirman, 7 Mei 2013). Hal yang sama dikemukakan oleh seorang pejabat dari Kanwil Kemenag, bahwa selama ini pemerintah masih kurang perhatian terhadap Rukem, belum pernah pihak pemerintah yang mengadakan *work shop* tentang Rukem (Wawancara dengan Jamaluddin, 8 Mei 2013).

Seorang pejabat dari Kantor Kemenag Kota sebagai representasi pihak pemerintah mengatakan bahwa pihak pemerintah masih kurang dalam memperhatikan Rukem yang ada di wilayahnya. Padahal jika diperhatikan sebenarnya para pengurus Rukem dalam melakukan pengelolaan Rukem masih sangat sederhana dan lemah penguasaan manajemennya (Wawancara dengan Hilaludin, 8 Mei 2013). Oleh karena itu untuk meningkatkan pengelolaan Rukem, pemerintah cq instansi terkait perlu mengadakan diklat peningkatan manajemen pengelolaan Rukem (Wawancara dengan Jamaluddin dan Hilaludin, 8 Mei 2013) .

C. Analisis

Rukem merupakan kearifan lokal yang tumbuh secara *bottom up* dari masyarakat akar rumput yang dilatarbelakangi adanya kepentingan yang sama dari para anggota masyarakat, atau karena adanya kesulitan yang mereka hadapi berkenaan dengan musibah kematian, meliputi pengurusan jenazah dari memandikan, menyolatkan, hingga memakamkan. Dari latar belakang tersebut kemudian terwujud bentuk kelompok keagamaan

yang peduli terhadap apa yang mereka alami atau yang menimpa mereka.

Dilihat dari sisi kepengurusan, Rukem dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) Rukem yang di bentuk oleh masyarakat Muslim tingkat RT, lingkungan dan blok di perumahan; (2) Rukem yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh pengurus masjid/mushala dan masuk dalam struktur organisasi kepengurusan masjid/mushala.

Rukem dapat dikategorikan sebagai kelompok keagamaan karena tidak hanya memberikan dana sosial terhadap anggotanya yang mengalami musibah kematian saja, tetapi juga berkiparah sebagai motor penggerak dalam menjalankan syariat agama, minimal menunaikan *fardlu kifayah* mengurus jenazah, yakni meliputi memandikan, mengafani, menyolatkan, dan memakamkan jenazah. Bahkan ada Rukem yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan, seperti tahlilan pada pasca pemakaman jenazah, minimal dari hari kesatu sampai ketiga, ada yang dari hari kesatu sampai ketujuh. Ada pula rukem yang menyelenggarakan pengajian rutin, dan peringatan hari besar Islam (PHBI).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Selain kegiatan-kegiatan keagamaan, ada juga Rukem yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, seperti menyantuni warga yang sakit yang menjalani rawat inap di rumah sakit terutama yang menjalani operasi, dan melaksanakan sunatan masal. Kegiatan sosial semacam ini termasuk perwujudan dari perilaku kesalehan sosial yang diajurkan oleh kalangan neo- modernis Islam pada awal tahun 1990-an yang belakangan kurang terdengar gaungnya.

Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung – sebagai daerah sasaran transmigrasi sejak

jaman pemerintah Hindia Belanda, sebagai tempat bertemunya berbagai macam etnis dan agama – kerukunan hidup antarumat beragama sudah terbentuk sejak lama dan sudah menjadi tradisi pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Antarumat sudah terbiasa saling berinteraksi secara hamonis. Jika terjadi musibah mereka saling mengunjungi tanpa melihat agama yang dianut oleh mereka yang tertimpa musibah. Demikian pula pada even -even hari besar keagamaan mereka juga saling mengunjungi. Kondisi kehidupan yang harmoni seperti ini menjadikan rukem tidak memiliki program untuk mengatasi konflik keagamaan, kecuali konflik-konflik kecil yang bersifat intern umat Islam berupa perbedaan faham keagamaan.

Secara umum kedua Rukem yang menjadi sasaran penelitian ini telah dapat memelihara kerukunan intern umat Islam dan telah mampu membentuk rasa kebersamaan, meningkatkan solidaritas atau rasa kepedulian sesama warga terutama terhadap warga yang tertimpa musibah, baik berupa musibah sakit, kematian dan musibah lainnya, seperti banjir yang sering terjadi di Lingkungan III. Meskipun Rukem ini tidak memiliki program kerukunan antarumat, namun Rukem telah melestarikan tradisi kerukunan antarumat beragama, misalnya jika ada warga yang meninggal dunia para tetangga datang untuk ikut belasungkawa dan memberikan penghormatan terakhir dengan tanpa melihat apa agama orang yang meninggal dunia. Demikian pula jika yang meninggal umat muslim dan diadakan acara tahlilan, warga non muslim juga hadir, meski mereka tidak ikut membaca tahlil . Mereka ikut memberikan pnghormatan terakhir dan menunjukkan rasa ikut berduka cita sedalam-dalamnya.

Pada waktu perayaan hari-hari besar keagamaan warga yang berbeda agama juga saling kunjung-mengunjung. Meski kunjungan yang dilakukan oleh umat muslimin pada perayaan Natal tidak dilakukan tepat pada hari Natal, melainkan pada waktu perayaan Tahun Baru. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat muslim setempat bahwa perayaan Natal merupakan bagian ritual keagamaan Kristen/Katolik dan mereka berkeyakinan bahwa kaum muslimin tidak boleh masuk dalam acara ritual agama lain. Di sinilah terlihat betapa bijaknya para pengurus Rukem, keyakinan tersebut disosialisasikan kepada seluruh warga muslim. Alasan tersebut juga disampaikan kepada umat Kristen dan Katolik agar tidak terjadi kesalahfahaman dan ketersinggungan. Di satu sisi, pengurus Rukem dapat mejaga akidah umat Islam setempat sesuai dengan keyakinan mereka dan sekaligus memelihara kerukunan intern umat Islam. Di sisi lain pengurus Rukem juga berupaya menjaga perasaan umat Kristen dan Katolik sehingga dapat dikatakan telah berupaya memelihara kerukunan atarumat beragama.

Demikian pula kiprah Rukem dalam kegiatan sosial, misalnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana bagi mereka yang terkena musibah banjir, hal ini juga dilakukan dengan tanpa memandang agama. Di samping itu, keberadaan satu KK non muslim yang diterima sebagai anggota Rukem Blok L Kelurahan Bukit Kemiling Permai telah menunjukkan sikap warga muslim Blok L yang toleran terhadap umat lain. Jika mereka tidak memiliki sikap toleransi, satu KK non muslim bisa saja diabaikan dan tidak diterima sebagai anggota Rukem.

Pemerintah daerah belum begitu perhatian terhadap keberadaan Rukem. Karena selama ini keberadaan Rukem

dipandang aman-aman saja dan tidak ada masalah. Selain itu, Rukem juga belum mendapat perhatian dari masyarakat. Padahal keberadaan Rukem sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Padahal seandainya ada perhatian pemerintah kepada Rukem, pengelolaan atau manajemen Rukem akan lebih baik, kualitas SDM pengurus Rukem bisa ditingkatkan misalnya melalui pelatihan manajemen dan pelatihan pengurusan jenazah.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

a) Pembentukan Rukem lebih didasarkan kepada fardlu kifayah umat Islam untuk mengurus jenazah, meringankan beban warga yang tertimpa musibah sakit maupun musibah kematian.

b) Rukem merupakan kearifan lokal yang terdapat hampir diseluruh pelosok Kota Bandar lampung memiliki potensi besar dalam memelihara kerukunan intern umat Islam; ada pula Rukem yang memiliki fungsi untuk memelihara kerukunan antarumat beragama. Apabila Rukem ini direvitalisasi atau direka cipta *(institutional development)* akan memiliki potensi yang lebih besar bagi pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.

c) Wilayah Kota Bandar Lampung cenderung aman dari konflik termasuk konflik keagamaan. Berbeda dengan wilayah *hinterland* (daerah pinggiran) seperti Sukarame, Kota Sepang dan terutama Kecamatan Tanjung Senang yang lebih tinggi lagi tingkat konfliknya karena sering dijadikan sasaran penyiaran agama lain sehingga sering timbul ketegangan antarumat beragama. Kondisi yang cukup aman

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

merupakan faktor pendukung bagi pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.

2. **Rekomendasi**
   a) Pada umumnya RK hanya beranggotakan warga muslim, namun di Kelurahan Bukit Kemiling Permai memiliki anggota non muslim. Ini menunjukkan adanya upaya memelihara kerukunan antarumat beragama secara *bottom up,* yang perlu dikembangkan baik di Kota Bandar Lampung maupun di tempat lain.
   b) Rukem yang ada di hampir seluruh wilayah Kota Bandar Lampung hendaknya menjadi perhatian baik bagi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan terutama bagi Pemerintah Kota untuk dapat direvitalisasi dan direkacipta sebagai media yang efektif bagi upaya pemeliharaan kerukunan baik internal umat Islam maupun eksternal antarumat beragama.
   c) Wilayah Kota Bandar Lampung yang cenderung aman dari konflik termasuk konflik keagamaan hendaknya dapat terus dipelihara terutama dengan merevitalisasi atau merekacipta Rukem sebagai kearifan lokal agar lebih dapat ditingkatkan perannya dalam upaya pemeliharaan kerukunan baik intern umat Islam maupun antarumat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Pengajian Nurul Iman, *Anggaran Dasar Kerukunan Pengajian Nurul Iman,* Kel. Surabaya Kedaton Tanjungkarang, 1984.

Pengajian dan Kerukunan Belasungkawa Nurul Iman A, *Draft Anggaran Dasar, 2013.*

Rukun Kematian (RKM) Masjid Al-Islah , *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga,* Rukem (RKM) Masjid Al-Islah, Perum Bukit Kemiling Permai, Kemiling Bandar Lampung, 2013.

BPS Kota Bandar Lampung, *Kota Bandar Lampung dalam Angka 2012.*

Kerukunan Pengajian Nurul Iman, RT1, RT2 Lingkungan IV Kelurahan Surabaya Kedaton Kota

Madya Dati II Bandar lampung, 1985.

Pengajian Nurul Iman A & Kerukunan Belasungkawa Kelurahan Surabaya Kedaton Bandar

Lampung, *Susunan Kepengurusan Pereode 2010-2015.*

---------- , *Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kerukunan Belasungkawa & Pengajian Nurul Iman A,* 2010.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR INFORMAN

1. Drs. HS Riyadi, Kepala Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung
2. Drs. Jamaluddin, Kabid KUB Kanwil Kemenag Prov. Lampung.
3. Drs. Hilaluddin, Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung
4. Drs. H. Jalaluddin, Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung
5. Djoko Irawan, staf Kesbangpol Kota Bandar lampung.
6. Sudirman, staf Kesbangpol Kota Bandar lampung.
7. Drs. Khoiruddin Tahmid, Ketua FKUB Kota Bandar lampung
8. Rohaida, Sekretaris Kelurahan Kemiling Kota Bandar Lampung
9. Drs. H. Edy Suryadi, Ketua Rukem Al Iman Lingkungan 3 Kel. Surabaya
10. Maria Theresia isteri Edy Suryadi.
11. Drs. Sutrisno Noor, Sekretaris Rukem Al Iman Lingkungan 3 Kel. Surabaya
12. Halusi Mukri, Wakil Ketua Rukem Al Islah Perum Bukit Kemiling Permai Kel. Kemiling

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

VII

PERAN BKSAUA/FKUB DAN KELOMPOK KEAGAMAAN LOKAL DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh: Akmal Salim Ruhana

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Minahasa Utara (Minut) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara 0 derajat 25′ - 1 derajat 59′ Lintang Utara dan 124 derajat 20′-125 derajat 59′ Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, sebelah Barat dengan Laut Sulawesi dan Kota Manado, sebelah Timur dengan Laut Maluku dan Kota Bitung serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa. Luas wilayahnya adalah sekitar 1.059.244 km^2 dengan garis pantai sepanjang 292,20 km, memiliki pulau sebanyak 46 buah dan 1 pulau terluar yaitu Pulau Mantehage.

Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 adalah sebanyak 188.467 jiwa, terdiri atas laki-laki berjumlah 95.879 jiwa (50,87%) dan perempuan berjumlah 92.588 jiwa (49,13%), dengan tingkat kepadatan pendudk 178/km^2.

Persebaran penduduk di setiap kecamatan cenderung hampir merata di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten

Minahasa Utara. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kalawat yaitu 26.624 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 682,12/km², sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Likupang Selatan yaitu 5.107 jiwa namun tingkat kepadatan penduduknya menduduki peringkat kedua yakni 432,03/km². Kecamatan Likupang Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 16.503 jiwa, memiliki tingkat kepadatan paling rendah yakni 56,74/ km².

Jumlah penduduk di setiap kecamatan selengkapnya berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Penduduk di Kabupaten Minahasa Utara per Kecamatan Tahun 2010

No.	Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Kema	78,755	7.695	7.285	14.980	190,21
2.	Kauditan	108,202	11.825	11.733	23.585	217,98
3.	Airmadidi	86.660	13.480	13.112	26.592	306,85
4.	Kalawat	39,031	13.391	13.233	26.624	682,12
5.	Dimembe	166,433	11.508	11.105	22.613	135,87
6.	Talawaan	82,508	8.981	8.505	17.486	211,93
7.	Wori	90,704	9.163	8.803	17.966	198,07
8.	Likupang Barat	104,289	8.761	8.250	17.011	163,11
9.	Likupang Timur	290,841	8.462	8.077	16.503	56,74
10.	Likupang Selatan	11,821	2.622	2.485	5.107	432,03
Jumlah		1,059,244	95.879	92.588	188.467	177,93

Sumber : Hasil Olah Cepat Sensus Penduduk 2010, BPS.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Minahasa Utara 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 2,41% dan yang paling menonjol pada tahun 2010 sebesar 6,79 %. Pertumbuhan penduduk rata-rata selang 5 (lima) tahun terakhir di Kecamatan Talawaan sebesar 10,05 % dengan kepadatan penduduk 211,93/km², sedangkan terkecil di Kecamatan Dimembe sebesar1,75 %, dengan kepadatan penduduk 135,87/km².

Suatu keadaan damai atau konflik bersifat multi dimensi. Jarang sekali suatu konflik yang hanya disebabkan oleh variabel tunggal, demikian halnya kondisi damai. Karenanya, untuk mengetahui sebab-musabab suatu kondisi konflik atau damai yang lebih holistik, berbagai dimensi yang mungkin kita duga ikut memainkan peran, perlu digali. Baik yang berkaitan dengan aspek makro dan bersifat tidak langsung (pendorong), juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan aspek situasi politik ekonomi sosial dan budayanya.

Mengenal orang dan budaya Minahasa Utara cukup dengan mengenal budaya orang Minahasa, karena memang mayoritas penduduk Minut bersuku Minahasa. Menurut Koentjaraningrat, orang Minahasa, menyebut diri mereka orang Manado atau *Touwenang* (orang Wenang), orang Minahasa, dan juga Kawanua (Koentjaraningrat, dalam ensiklopedia bebas *wikipedia.com* dengan kata kunci "orang Minahasa", diakses pada 6 Mei 2013).

Masyarakat asli Minahasa terbagi ke dalam 8 sub-etnik atau suku bangsa, yakni: 1. Tonsea (di sekitar Timur Laut Minahasa); 2. Tom bulu (di sekitar Barat Laut danau Tondano); 3. Tontemboan/Tompakewa (di sekitar Barat Daya Minahasa); 4. Toulour (di bagian Timur dan pesisir danau Tondano); 5. Tonsawang (di bagian tengah dan Selatan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Minahasa); 6. Pasan atau Ratahan (di bagian Tenggara Minahasa); 7. Ponosakan (di bagian Tenggara Minahasa); dan 8. Bantik (di beberapa tempat di pesisir Barat Laut Utara dan Selatan kota Manado).

Dalam kehidupan beragama, penduduk Minahasa Utara pada tahun 2012 (menurut data pada Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara) mayoritas beragama Kristen, yakni mencapai140.986 jiwa (73,90%). Kemudian, sebanyak 36.529 jiwa (19,15%) beragama Islam, lalu 13.133 jiwa (6,88%) beragama Katolik, 61 jiwa (0,03%) beragama Buddha, 52 jiwa (0,03%) beragama Hindu, dan 20 jiwa (0,01%) memeluk agama Khonghucu.

Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan rumah ibadat, terdapat 484 gereja Kristen, 58 masjid, dan 55 gereja Katolik. Sedangkan pemeluk agama Hindu, Buddha dan Khonghucu melakukan ibadat bergabung dengan umat di kabupaten lain—selain menggunakan tempat ibadat keluarga di lingkungan rumah masing-masing.

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, Minahasa Utara memiliki banyak kelompok keagamaan Kristen atau denominasi hingga 28 buah denominasi. Mulai dari denominasi besar seperti Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), hingga gereja-gereja lokal dan kecil di seantero pelosok kebupaten. Di kalangan Islam juga banyak ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Demikian juga ada kelompok-kelompok keagamaan Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Dalam kaitannya dengan kerukunan umat beragama, meski pernah terjadi beberapa kasus keagamaan, pada umumnya kondisi kerukunan beragama di Minahasa Utara cukup baik. Sebagaimana di daerah lain di Sulawesi Utara,

masyarakat mengaku kondisi kerukunan yang cukup baik dan bahkan dibangga-banggakan sebagai model. Merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang melihat kerukunan di Sulawesi Utara secara umum, kondisi ini dihasilkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal.

Secara internal, ada faktor historis yang telah secara tidak sadar melembagakan tradisi damai di dalam masyarakat Minahasa Utara[1]. Sebagaimana kabupaten/kota lain di Sulut, kabupaten ini telah sejak pembentukannya memiliki konstruk kependudukan yang beragam dari segi suku, agama, dan ras serta secara alamiah hidup dalam keserasian. Pengalaman hidup bersama dalam damai itu secara turun temurun telah mewariskan 'budaya' damai yang terus menerus dijaga. Modalitas sosial ini ditopang oleh kondisi perekonomian dan pendidikan yang semakin baik. Berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemkab Minahasa Utara serta iklim investasi yang kian membaik, membuat pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2005, misalnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%, pada 2006 -2009 berturut-turut naik menjadi: pada tahun 2006 4,90%, pada tahun 2007 sebesar 5,61%, pada tahun 2008 sebesar 6,19% serta pada tahun 2009

[11] Kabupaten Minahasa Utara merupakan sebuah kabupaten otonom hasil dari pemekaran Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan UU No. 33 Tahun 2003 tertanggal 18 Desember 2003. Pemekaran itu sendiri mengacu pada aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang Persetujuan Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara dan Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa tanggal 24 Juli 2002. Lihat "Sejarah Minahasa Utara" dalam *www.minahasa.go.id*, diakses pada 5 Mei 2013.

sebesar 6,68%. Demikian selanjutnya. Sementara itu, angka harapan hidup rata-rata masyarakat Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2008 adalah 75.33 tahun, angka melek huruf rata-rata 99.68%, angka rata-rata lama sekolah 9.07 tahun dan pengeluaran perkapita rata-rata Rp. 622.710,- sehingga secara keseluruhan komponen penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini mencapai angka75.16 untuk IPM Minahasa Utara. Nilai IPM ini terus mengalami peningkatan, bahkan Nilai IPM Kabupaten Minahasa Utara ini menempati peringkat ke 56 Tingkat Nasional dan peringkat ke-3 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Dikutip dari *www.minahasa.go.id*, diakses pada 5 Mei 2013.).

Modal sosial lain yang dimiliki daerah ini adalah hidupnya kearifan lokal masyarakat. Budaya *mapalus* di dalam masyarakat Minahasa telah mewariskan kebiasaan yang mendukung kerukunan diantara masyarakat. Mapalus merupakan suatu sistem kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai suatu aktualisasi hakikat manusia sebagai makh luk kerja bersama ber-Ketuhanan dan taat pada Kaedah Sistem Nilai Masyarakat. *Mapalus* bukan sekadar suatu "kerjasama" (*cooperation*), yang bekerjasama hanya untuk kepentingan ekonomi, melainkan merupakan suatu hidup "kerja bersama" (*working togetherness*) dalam ekonomi, budaya, organisasi, dan manajemen kerja bersama, kemasyarakatan, keagamaan, pertahanan, dan keamanan (J. Turang, *Teori dan Praktek Mapalus*, 1989, dalam Sudjangi, *op.cit.* hlm. 428-429). Selain itu, slogan *torang samua basudara* yang telah ada sejak lama yang dikuatkan dan dipopulerkan lagi oleh A.E. Mangindaan (Gubernur Sulawesi Utara kala itu), juga merekatkan persaudaraan dan budaya kerjasama masyarakat, termasuk masyarakat Minahasa Utara. Sejalan dengan itu, lahirnya bentuk nyata aplikasi budaya

mapalus, yakni berupa rukun lingkungan, rukun marga, dan rukun sosial duka, telah menguatkan modalitas sosial masyarakat untuk rukun.

Adapun faktor eksternal yang menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama di Minahasa Utara adalah adanya kebijakan pemerintah yang membina, mengarahkan, dan memfasilitasi terwujudnya kerukunan. Selain itu, ada peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif dan proaktif mendukung kerukunan. Sejalan dengan itu, wujud nyata peran tokoh agama dan masyarakat itu terwujud dalam forum lintas agama Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA) dan/atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Selanjutnya akan dipaparkan secara lebih dalam peran terhadap kerukunan umat ber-agama dari forum BKSAUA/FKUB dan *local mechanism* berupa rukun lingkungan, rukun marga, dan rukun sosial duka. Pemahaman yang lebih dalam akan memberi kejelasan bagaimana peta peran-peran faktor di atas dalam kontribusinya bagi kerukunan di Sulawesi Utara pada umumnya, dan Minahasa Utara khususnya.

B. Peran BKSAUA Minahasa Utara dan Kelompok Lokal dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

1. Peran BKSAUA Minahasa Utara

Keberadaaan BKSAUA di Minahasa Utara tidak terlepas dari sejarah panjang upaya pemerintah daerah setempat (dan pemerintah pudat) dalam pemeliharaan dan pembinaan kehidupan beragama di Sulawesi Utara sejak masa silam. Untuk memahaminya, rentetan peristiwanya

secara kronologis dapat disimak matrik berikut: [2]

>1966	Terjadi pertentangan antarumat beragama di berbagai daerah yang dirasakan efeknya terhadap hubungan harmonis antarumat
29-30 November 1967	Diadakan Musyawarah Alim Ulama Antar Umat Beragama se-Provinsi Sulawesi Utara, yang diprakarsai Pemerintah Provinsi
1968	• Gubernur Sulawesi Utara menganjurkan kepada para pemuka/tokoh agama untuk
3-7 Juli 1969	• Diadakan pertemuan para pemuka agama yang dihadiri oleh wakil-wakil umat beragama, menerima anjuran Pemerintah
25 Juli 1969	• Gubernur mengeluarkan SK tentang pembentukan Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Provinsi Sulawesi Utara. Dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
6 Oktober 1969	• BKSAUA mengadakan sidang dan menetapkan Peraturan Tata Tertib
1 November 1969	• Pemerintah membentuk Badan Ketahanan Wanita Antar Umat Beragama (BKWAUA) yang beranggotakan wanita lintas agama • Pemerintah juga menyebarluaskan informasi mengenai perudang- undangan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

[2] Kronologi peristiwa dan kebijakan kerukunan beragama di Sulawesi Utara disusun dari sejumlah sumber, antara lain: Sudjangi, *op.cit.* hlm. 430-442; Arifuddin Ismail, *op.cit.*, hlm. 61-64; dan komunikasi-pertelepon dengan Kepala Kankemenag Kabupaten Minahasa Utara dan WH, anggota FKUB Minut, pada 13 Oktober 2013.

1969-1976	• Periode I perkembangan kegiatan BKSAUA, periode penanaman, penumbuhan, dan pemantapan upaya-upaya saling menghargai dan toleransi antarumat beragama. Para pemuka agama menggali dari nilai- nilai ajaran setiap
1976-1983	• Periode II perkembangan kegiatan BKSAUA, mencanangkan program kerukunan umat beragama. Juga mengadakan Musda pada 30-31 Maret 1981. • BKSAUA dari Musda mengusulkan
1983-1990	• Periode III perkembangan kegiatan

	kerukunan umat beragama, dengan mencari sasaran kerjasama. • Ditemukan titik sasaran kerjasama, yakni menanggulangi masalah penyakit masyarakat: penyalahgunaan alkohol, miras, narkotika, WTS,
1990-1997	• Periode IV perkembangan kegiatan BKSAUA, upaya diintensifkan. • Ditegaskan pembangunan bangsa dari bawah, tugas dan kegiatan BKSAUA
2002-2005	• Sosialisasi program pemeliharaan kerukunan secara bertahap. Tahun 2002 penekanannya adalah tahun "Kasih". Tahun 2003 sebagai tahun "Kasih, tanpa

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

21 Maret 2006	• PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terbit. Dalam Pasal peralihan disebutkan agar forum serupa FKUB menyesuaikan selambatnya 2 tahun setelah PBM terbit. • Di Kabupaten Minahasa Utara, keberadaan BKSAUA dinilai tetap penting dan dipertahankan, sehingga kepengurusan
Oktober 2013	• Mempertimbangkan efeketivitas kerja BKSAUA dan FKUB (sebagaimana dituntut

Dari kronologi di atas, tampak bahwa BKSAUA Minahasa Utara dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan didasarkan pada SK Gubernur No. 91/KPTS/1969 tanggal 25 Juli 1969 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara—yang diperbaharui pada 7 Desember 1985. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa organisasi BKSAUA terdiri atas BKSAUA tingkat provinsi, BKSAUA tingkat kabupaten/kota, BKSAUA tingkat kecamatan, dan BKSAUA tingkat desa/kelurahan.

BKSAUA lahir dengan latar belakang adanya berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah yang menjurus pada pertentangan antarumat beragama. Maka keberadaanya dimaksudkan untuk membangun jembatan komunikasi antarumat beragama, menyelesaikan permasalahan antarumat beragama, dan menjaga kerukuan umat beragama.

Dalam konteks Kabupaten Minahasa Utara, pasca terbitnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, keanggotaan BKSAUA bergabung (satu tubuh) dengan FKUB. Sehingga biasa ditulis nama keduanya dengan tambahan tanda garis miring, BKSAUA/FKUB. Ketuanya saat ini adalah Pendeta Alexander Koloay, S.Th.—yang juga menjadi Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Minahasa

Utara. Dapat ditambahkan, bahwa ketika penelitian lapangan ini dilakukan, Pdt. Alexander Koloay menjabat tiga jabatan pimpinan sekaligus, yakni Ketua BKSAUA, FKUB, dan BAMAG. Pada saat laporan ditulis, ada informasi bahwa kepengurusan BKSAUA dan FKUB telah dipisah. Hanya saja, karena SK Bupati belum diterima maka data dimaksud belum dapat diakses dan dipaparkan dalam naskah ini.

BKSAUA/FKUB memiliki jadual rutin bertemu/rapat, yang difasilitasi Asisten Dua Bupati Minahasa Utara. Adapun kegiatan lainnya yang pernah dilakukan BKSAUA Minahasa Utara adalah melakukan kunjungan kerja ke Tomohan bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kementerian Agama Minut, pada Senin 27 Mei 2013. Dengan kunjungan kerja ini pihak Pemkab ingin mengetahui tentang cara pengelolaan bantuan sosial bagi para tokoh-tokoh agama sesuai dengan peraturan yang baru, PBM. Selain itu, rombongan dari Minut ini hendak belajar tentang peran FKUB dan BKSAUA Kota Tomohon dalam pembangunan, bagaimana Pemkot Tomohon menata program kerja BKSAUA dan FKUB serta rencana BKSAUA lainnya. Dalam kunjungan ini juga sekaligus dipaparkan tiga program besar Pemkab Minut yaitu "Program Sentuh Tanah, Program Sentuh Air dan Program Sentuh Budaya (Diolah dari *http://beritamanado.com/tomohon/pemkab-dan-bksaua-minut-belajar-pengelolaan-bansos-di-tomohon-2/184695/*. Diakses pada 4 Juni 2013).

BKSAUA/FKUB Minahasa Utara juga terus aktif melakukan pendampingan masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan—meski dalam kadar yang belum optimal. Terhadap problem-problem pendirian rumah ibadat, misalnya, BKSAUA turut mencari solusi dan mengantarai para pihak (Wawancara dan FGD dengan pengurus

BKSAUA/FKUB pada 12 Mei 2013 di ruang kerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara).

Misalnya dalam penyelesaian kasus penolakan warga sekitar atas rencana penaikan kubah masjid di Minahasa Utara. Dalam beberapa kegiatan dialog lokal, nasional, bahkan internasional, perwakilan FKUB Kabupaten Minahasa Utara kerap turut disertakan. Misalnya ketika diadakan Dialog Bilateral Indonesia-Jerman di Manado pada April2013, ketua dan beberapa anggota FKUB Minahasa Utara hadir sebagai peserta dialog.

Eksistensi BKSAUA memang telah lama dan masih tetap eksis berperan hingga sekarang — di saat Pemerintah menegaskan tuntutan eksistensi FKUB sebagai turunan lahirnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Pemerintah Daerah terus memfasilitasi kegiatannya dan masih merasa memerlukannya, karena keberadaaannya yang mencakup hingga ke desa-desa dan ada pendekatan budaya yang cukup mengakar. Sementara FKUB hanya sampai tingkat kabupaten/kota dan masih baru eksis. Kegiatan BKSAUA tingkat provinsi memang nampaknya lebih tampak dibanding eksistensi dan performa BKSAUA tingkat-tingkat bawahnya. Hal ini dapat dipahami karena problem terbatasnya dukungan untuk optimalitas kinerja, selain kurang luasnya ekspose pemberitaan jika dibandingkan BKSAUA tingkat provinsi.

2. Peran Kelompok-Kelompok Lokal

Di luar adanya lembaga terstruktur dan terorganisasi seperti BKSAUA dan FKUB, di dalam masyarakat Minahasa Utara (dan Sulawesi Utara pada umumnya), juga terdapat *local mechanism* (cara kerja perangkat/warga lokal) yang bekerja mendukung kerukunan dan kedamaian.

Diantaranya adalah apa yang disebut rukun sosial duka, rukun marga, dan rukun lingkungan. Rukun duka merujuk pada perkumpulan orang-orang yang bersepakat untuk mengelola manajemen pengurusan jenazah jika ada anggota kelompok yang meninggal, atau mendapat musibah tertentu. Rukun marga merupakan perkumpulan warga Minahasa yang satu marga, sama fam-nya. Bahwa pada suku Minahasa, setiap keluarga memiliki nama marga, misalnya: Supit, Sepang, Monoarfa, Wongkar, dan sebagainya. Sedangkan Rukun Lingkungan, yang dipimpin seorang Kaling (Kepala Lingkungan) adalah perkumpulan berdasarkan kewilayahan setingkat di bawah kelurahan/ desa. Di daerah lain, Rukun Lingkungan diistilahkan dengan Rukun Warga (RW) yang dipimpin seorang ketua RW.

Keanggotaan Rukun Sosial Duka terdiri atas warga desa yang sudah menikah, berkeluarga. Terdiri atas warga lintas agama dan suku/etnis di suatu wilayah. Jika satu ketika di suatu lingkungan ada warga yang meninggal, maka warga lain akan datang dengan membawa sejumlah uang yang disepakati dan satu liter beras, untuk diberikan kepada keluarga yang berduka. Kekerabatan satu lingkungan ini membuat diantara mereka semakin saling mengenal dan saling menghormati. Termasuk ketika keluarga yang berduka adalah pemeluk agama yang berbeda, maka warga akan memahami. Misalnya, ketika yang meninggal beragama Islam, maka warga lain yang datang menjenguk cukup ikut mengantar atau hadir di depan rumah dan tidak ikut prosesi pengajian atau takziah. Sebaliknya, jika yang meninggal merupakan warga yang beragama Kristen, dan ada prosesi tertentu dalam agama tersebut, maka warga lain yang beragama lain akan menghormatinya dengan keterlibatan pada batas-batas yang diperbolehkan. Rukun duka ini telah

membudaya dan melembaga dalam masyarakat Minahasa Utara sejak lama. Dikatakan Marta Wasak, Organisasi sosial yang ada di desa ini adalah organisasi rukun duka, perkumpulan muda-mudi, ibu-ibu majelis Taklim, gotong royong pada acara pemikahan, dan komite sekolah. Organisasi sosial rukun duka ini telah lama terbentuk secara turun temurun dan sampai saat ini tetap bertahan dan berjalan dengan baik. Organisasi ini diatur secara resmi oleh pemerintah desa di mana setiap anggota diwajibkan membayar uang Rp 3.000 serta membawa beras satu liter ketika ada salah satu anggota yang meninggal dunia. Semua warga desa ini yang sudah menikah otomatis menjadi anggota organisasi sosial rukun duka ini, sementara organisasi sosial lainnya, tidak semua warga desa menjadi anggotanya. Di bidang pendidikan terdapat organisasi komite sekolah yang melaksanakan kegiatan berupa pencarian dana guna pembangunan fisik sekolah (Baca Marta Wasak, "Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara", *Pacific Journal*, Januari 2012 Vol. 1 (7), Manado: Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, hlm. 1340.).

Biasanya, satu minggu setelah suatu peristiwa kematian, anggota rukun sosial duka dan famili keluarga almarhum akan berkumpul untuk ibadat bersama dan makan bersama. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjadi hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Masing -masing warga membawa makanan, kopi, teh, dan sebagainya, untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggal (Wawancara dengan Ibu A, seorang sekretaris Rukun Duka, pada 13 Mei 2013).

Rukun Duka juga ada keanggotaan dan kepengurusannya. Ada orang-orang yang dipilih atau ditunjuk sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengelolaan dan administra si rukun duka memang membutuhkan jabatan-jabatan tersebut. Ada juga acara-acara rapat dan pertemuan arisan, sebagai wahana untuk membahas masalah-masalah terkait jalannya rukun duka tersebut.

Selanjutnya, di Minahasa Utara juga ada Rukun Marga, atau juga disebut Rukun Keluarga. Ini merupakan perkumpulan yang terbentuk karena kesamaan marga/family. Bahwa orang Minahasa pasti memiliki nama marga, seperti: Tilaar, Sepang, Monoarfa, dan sebagainya. Hal ini sebagai identitas satu klan atau keluarga besar, biasanya dari satu kakek atau di atasnya. Adanya kelompok Rukun Marga ini dimaksudkan agar ada wahana saling mengenal sebagai satu turunan. Pertemuannya biasanya dikemas dalam suatu kegiatan arisan atau acara pesta tertentu.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Eksistensi rukun marga cukup kuat karena ikatan silsilah ini —baik biologis maupun persaudaraan keluarga— lebih menyentuh ke hal primordial setiap manusia, yang melintasi batas agama dan partai sekalipun. Misalnya, ketika dua orang berkenalan dan saling menyebut nama, dan ternyata sama marganya, maka mereka akan langsung merasa sebagai saudara dekat yang saling menjaga dan menyayangi. Biarpun berbeda agama dan statusnya, namun biasanya ada ikatan yang lebih kuat karena persaudaraan marga tersebut.

Sementara itu, rukun lingkungan merupakan perkumpulan berdasarkan ikatan kewila- yahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan. Karena

batasannya lingkungan kewilayahan administratif, maka Rukun Lingkungan lebih mencakupi rukun -rukun lainnya, dalam skala wilayah tertentu. Posisinya sebagai perangkat pemerintahan tingkat di bawah keluraha/desa, menjadikan kepala rukun lingkungan lebih sebagai perwakilan pemerintah di tingkat bawah. Meski demikian, ikatan yang terjalin diantara warga lingkungan menjadi terikat dan terrefleksi sebagai kesatuan identitas kewilayahan tertentu.

3. Ikatan *Multilayers*

Mencermati gambaran di atas, tampak bahwa integrasi diantara warga dan terciptanya kerukunan di dalam masyarakat Minahasa Utara terbentuk karena adanya ikatan yang berlapis (*multilayers*). Ada sejumlah ikatan yang dimiliki oleh seseorang dalam satu waktu bersamaan. Hal itu dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

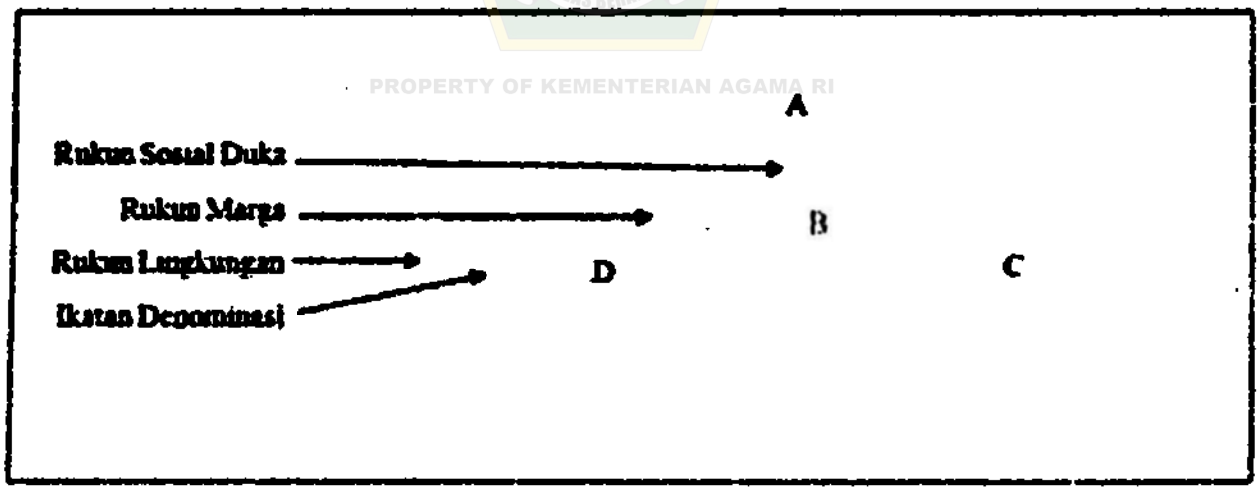

Seorang A, misalnya, satu marga dengan B dan sama-sama terikat dalam Rukun Marga. Pada saat yang bersamaan, mereka juga terikat dalam satu Rukun Lingkungan. Demikian juga, B dengan D sama-sama satu denominasi dan terikat dalam Ikatan Denominasi tertentu. Pada saat yang sama

berada dalam satu Rukun Lingkungan. Artinya satu orang bisa berada dalam beberapa lapis/irisan. Bahkan, B terlibat dalam empat irisan: ia terikat dalam semua rukun atau ikatan yang ada. Hal ini yang dimaksud dengan ikatan *multilayers* tersebut. Efeknya, seseorang akan terikat dalam banyak ikatan. Jika dalam satu dan lain kasus A ada masalah dengan B, misalnya, maka bisa lebih memungkinkan banyak bertemu dalam beberapa *layers* itu, dan mendapat pembinaan yang memadai dari ikatan-ikatan yang ada. Misalnya, dapat pembinaan dari pendeta karena sedenominasi, juga dari Kaling karena satu lingkungan, dan dari Tetua Marga karena ternyata terkait dalam silsilah keturunan yang sama. Dengan demikian, jarak sosial akan semakin dekat—terlebih diperkuat adanya forum-forum lintas seperti BKSAUA dan FKUB.

Hal ini sesungguhnya mengonfirmasi temuan Versney soal jarak sosial antarwarga yang dipengaruhi jaringan warga dalam organisasi-organisasi atau ikatan-ikatan (Ashutosh Varshney, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. New York: Cambridge University Press, 2003).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Bahwa jaringan warganegara, baik antar etnik maupun intra etnik bisa dirinci menjadi dua macam yaitu keterlibatan asosiasional (associational *forms engagement*) dan keterlibatan sehari-hari (*everyday forms engagement*). Dari dua bentuk keterlibatan tersebut, Varshney membuktikan bahwa bentuk keterlibatan asosiasional lebih efektif untuk mengatasi ketegangan etnik. Jika ada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, budaya, dan sosial yang terbentuk dari dua komunitas, maka perdamaian akan terwujud dengan kokoh. Sedangkan keterlibatan sehari-hari dalam hubungan ketetanggaan misalnya, sungguhpun

mempunyai banyak manfaat, namun tidak bisa menjadi dasar perdamaian bagi organisasi organisasi warga yang kokoh. Lebih lanjut Versney menyatakan bahwa jaringan warga antar-komunitas yang terorganisir tidak hanya mampu menahan keterkejutan komunitas akibat pembagian wilayah, perang saudara, dan pelecehan tempat ibadah, tetapi juga bisa memaksa para politisi lokal untuk melaksanakan agendanya. Organisasi-organisasi warga, dipandang dari segi tujuan praktis, menjadi semacam kepanjangan tangan dari pemerintah lokal. Sinergi yang tumbuh antara pemerintahan lokal dengan organisasi warga lokal, sangat efektif dalam memelihara stabilitas dan mencegah munculnya kerusuhan. Sinergi ini juga dapat menghapus rumor, mengatasi konflik dan ketegangan-ketegangan. Ketika terjadi suatu isu selepas kasus pelemparan sebuah masjid oleh orang yang tidak dikenal, misalnya, rumor bahwa telah terjadi "penyerangan" terhadap rumah ibadat tidak dapat menjalar liar karena segera dikendalikan dengan penjelasan resmi dari anasir pimpinan kelompok dalam ikatan-ikatan, baik rukun lingkungan maupun rukun marga.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

4. Peluang dan Tantangan

Efektifnya peran ikatan-ikatan dan forum lintas agama ternyata menghadapi peluang dan tantangan sekaligus. Sejumlah faktor memberi peluang mendorong efektivitas perannya, yakni, antara lain, dukungan dari Pemerintah daerah yang sangat baik mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya masyarakat memelihara kerukunan umat beragama. Dukungan baik dalam bentu k anggaran, fasilitasi ruangan, maupun dorongan program dan kebijaka di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Yang lalu, misalnya, Pemkab Minahasa Utara mengajak serta BKSAUA

Minut untuk belajar ke BKSAUA Tomohon terkait beberapa hal yang sudah berjalan baik di sana.

Selain itu, adanya lingkungan sosial yang sangat mendukung terlaksananya peran kelompok-kelompok ini, menjadi faktor pendukung efektifnya peran kelompok-kelompok ini. Bahwa masyarakat memang mau dan cenderung pada kerukunan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan sejatinya hanya memantik dinamika kelompok masyarakat saja.

Adapun sejumlah faktor yang menjadi penghambat terlaksananya peran kelompok- kelompok ini, antara lain, masih adanya problem kelembagaan antara BKSAUA dan FKUB, serta BAMAG. Menimbang kinerja dan ruang lingkup kerja yang berbeda, penyatuan ketiga entitas dalam satu tangan dalam tingkat tertentu akan membatasi capaian yang diharapkan. Meski belakangan diketahui telah ada upaya untuk memisahkan BKSAUA dengan FKUB, namun masih perlu dilihat praktik pelaksanaan kerjanya nanti, apakah tumpang tindih atau sinergis- komplementatif.

Di samping itu, secara substansial masih perlu ditegaskan prestasi-prestasi kinerja soal kerukunan yang telah diperoleh sebagai nyata dan fakta sesungguhnya. Hal ini penting ketika merujuk pada temuan data kuantitatif yang diperkuat informasi kualitatif dari Rais dan Syamsurizal. Rais misalnya menyebut kerukunan di Sulawesi Utara yang tercipta selama ini masih bersifat elitis-formalistik (Muhammad Rais, 2012:16). Bahkan H, aktivis kerukunan di Minahasa Utara menggunakan kata "kerukunan semu" (Wawancara pada 10 Mei 2013). Syamsurizal juga menemukan indikasi senada. Bahwa meski indeks kerukunan di Bolmong, Bolmut, dan Kotamobagu (tiga kabupaten lokusnya) sangat baik (0,77) namun ditengarai hal itu masih

di permukaan. Karena ternyata di *grassroot* diketahui masih ada rasa saling curiga dan perasaan dominasi satu kelompok agama pada agama lain (Syamsurizal, 2012:72-73).

Hal-hal ini juga dirujukkan pada masih adanya kasus-kasus keagamaan di Minahasa Utara (dan Sulut) yang meski sudah dianggap selesai namun nampaknya belum benar-benar tuntas.

Penelusuran informasi lapangan memang menemukan ada sejumlah kasus keagamaan yang pernah terjadi di Minahasa Utara. Hal itu antara lain kasus penaikan kubah masjid di Telawaan Bantik—yang saat ini sudah selesai. Berawal dari kebijakan Pemda yang memperbolehkan penggunaan tempat ibadat (mushola) asal tidak menggunakan simbol. Dalam perkembangannya, masyarakat berencana memasang kubah dan hal ini ditolak warga karena dinilai menaikkan status tempat ibadat tersebut. Masalah ini telah selesai dengan penjelasan bahwa kubah bukan simbol islam. Bahwa ada juga gereja yang menggunakan ornamen kubah, namun bedanya di atasnya menggunakan salib, adapun mushola ini menggunakan bulan sabit di atasnya. Selain itu, yang mungkin dinilai belum selesai adalah kasus pendirian masjid di Perum Rizki dan di Desa Kaima, yakni pembangunan terhenti karena dinilai kurangnya persyaratan. Lalu pendirian masjid di Airmadidi Atas, yang menuntut agar memenuhi persyaratan sebagaimana PBM, dan hal itu sekarang sudah selesai. Terakhir, kasus di Gria Mapanget ada konflik masalah penggunaan pengeras suara, namun hal ini sudah diselesaikan. Adanya kasus-kasus ini, meski sudah dinyatakan selesai (dan hampir tidak pernah ada di media) namun bagi beberapa pihak menjadi ganjalan bagi status kerukunan sejati yang dibangga-banggakan itu. Karenanya,

hal ini menjadi tantangan peran kelompok-kelompok pemelihara kerukunan ini.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) BKSAUA sebagai organisasi para pemuka agama bentukan pemerintah telah cukup eksis dan berperan dalam pemeliharaan kerukunan hingga sekarang, bersama satu-tubuh dengan FKUB. Strukturnya yang berada hingga level desa/kelurahan dan dukungan kuat pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasinya, membuat BKSAUA eksis dan berperan. Adapun kelompok seperti rukun duka, rukun marga, dan rukun lingkungan, juga hidup dan efektif berperan di masyarakat dalam memelihara keharmonisan masyarakat. Forum-forum m*ekanisme lokal* ini bergerak seiring dan beririsan satu sama lain (*multilayers*), kian menguatkan integrasi masyarakat.

b) Peran BKSAUA dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, antara lain, menjemba tani komunikasi tokoh antarumat beragama, menyelesaikan kasus-kasus keagamaan yang terjadi, memberikan bahan pertimbangan kepada Pemerintah terkait kerukunan, d an bersinergi bersama lembaga lain dalam memelihara kerukunan. Adapun kelompok rukun, mendekatkan jarak sosial warga dengan aktivitas-aktivitas asosiasional berupa pertemuan arisan warga satu marga, satu lingkungan, atau kelompok sosial duka.

c) Faktor yang mendukung peran-peran di atas adalah: adanya dukungan dan fasilitasi yang memadai dari pemerintah setempat, dan adanya kemauan segenap warga atas kerukunan. Sementara hal yang kurang mendukung peran ini adalah adanya problem kelembagaan (penyatuan BKSAUA dan FKUB) akan mempengaruhi kinerja dan performa perannya. Lalu, masih adanya suara sumbang terkait kerukunan hakiki di Minahasa utara, yang antara lain disebabkan masih adanya sejumlah kasus keagamaan yang belum benar-benar tuntas tertangani.

2. Rekomendasi

Dari paparan di atas, direkomendasikan berikut:

a) Agar dilakukan pemberdayaan BKSAUA/FKUB (serta membuatnya terpisah dari segi kelembagaannya). Dalam hal ini Kankemenag-Kesbanglinmas dapat memberi "perhatian" yang lebih memadai, baik dari segi pendanaan maupun fasilitasi lainnya.

b) Pada dasarnya, masyarakat cenderung pada kerukunan/ kedamaian. Ada mekanisme lokal dalam masyarakat yang menciptakan keseimbangan (baca: kerukunan)— sebagaimana diindikasi Merton. Maka perlu mendorong peran-peran *bottom up* seperti ini dalam upaya pemeliharaan kerukunan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mursyid, 2012, *"Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Minahasa Utara,"* dalam Yusuf Asry (editor), *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/ Perselisihan Rumah Ibadat Tahun 2012*, Jakarta: Kementerian Agama RI.

AP, Abdullah, 1995/1996, *"Kerukunan Hidup Beragama: Studi Kasus di Kotamadya Manado"*, dalam Sudjangi (Penyunting), *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Balitbang Agama, Departemen Agama RI.

Berlo, D.K. , 1964, *Process of Communication*. New York: Holt Rhinehart.

Ismail, Arifuddin, 2005, *"Torang Samua Basudara*: Studi Kasus Pasca Konflik di Manado," dalam Jurnal *Al-Qalam*, Nomor XVI Tahun XI. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.

Koentjaraningrat, 2007, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Lonto, Lexi A, 2001, *"Peran Elite Agama dalam Membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kotamadya Manado", tesis*, Yogyakarta: UGM.

Profil FKUB Provinsi Sulawesi Utara, tt.

Rais, Muhammad, 2012, *"Sulut Sulit Disulut: Antara Cita dan Fakta"* dalam Jurnal *Al-Qalam, Vol. 18 Nomor 1*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.

Ruhana, Akmal Salim, dkk., 2011, *"Bina Damai Etnorelijius di Kota Manado," makalah,*.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudjangi, *"Peta Kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara"* dalam Achmad Syahid dan Zainuddin Daulay (Editor), *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Syamsurizal, 2012, *"Sisi Gelap Toleransi Beragama di Sulawesi Utara: Menyingkap Problem Kerukunan Beragama di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamubagu,"* dalam Jurnal *Al-Qalam*, Vol. 18 Nomor 1. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar, Varshney.

Ashutosh, 2003, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. New York: Cam-

bridge University Press.

Wasak, Marta, 2012, *"Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara"*, *Pacific Journal*, Januari Vol. 1 (7), Manado: Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Internet:

http://beritamanado.com/tomohon/pemkab-dan-bksaua-minut-belajar-pengelolaan-bansos-di- tomohon- 2/184695/.

http://www. jurnas.com/mobile-news/226803.

http://www.minahasa.go.id. http://wikipedia.com.

VIII
PERAN FORUM SILATURRAHIM ORMAS ISLAM (FSOI) DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Oleh: Mursyid Ali

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Fenomena Sosio Kultural

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, memiliki wilayah seluas 167,91 kilometer bujur sangkar. Secara administratif, wilayahnya terbagi menjadi 30 kecamatan, 151 kelurahan, serta 1.559 RW. dan 9.655 RT.

Jumlah penduduknya secara keseluruhan tercatat sebanyak 2,364,312 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 1.210.912 jiwa atau (51,22%) dan perempuan sebanyak 1.153.400 jiwa atau (48,88%) dari jumlah penduduk. Mereka terdiri atas 686.400 rumah tangga dengan jumlah anggota rumahtangga per-keluarga rata-rata sebanyak 3,44 orang.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian, sebagian besar penduduk Kota Bandung berkiprah di bidang perdagangan yakni sebanyak 333.696 orang atau (35,92%) dari jumlah penduduk. Sedangkan andalan hidup yang paling kecil adalah bidang gas, listrik dan air minum yang jumlah seluruhnya hanya sebanyak 5.688 orang atau (0,61%). Mata pencaharian warga setempat secara lengkap dapat disimak Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Mata Pencaharian Penduduk Kota Bandung
Tahun 2009[1]

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Prosentase
1	Perdagangan	333,696	35,92
2	Jasa	261,648	28,16
3	Industri	147,888	15,92
4	Angkutan dan Komunikasi	66,992	7,21
5	Konstruksi	40,448	4,35
6	Kenangan	24,648	2,65
7	Pertanian	7,548	0,82
8	Pertambangan dan Mineral	4,424	0,48
9	Listrik, Gas dan Air Minum	5,688	0,61
10	Lainnya	36,024	3,88
Total		929,040	100,00

BPS, Jawa Barat Dalam Angka, 2008.

2. Tatar Budaya

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Disimak dari tataran budaya, Nina Lubis Ketua Pusat Kebudayaan Sunda UNPAD mengelompokkan Jawa Barat menjadi lima wilayah budaya, masing-masing adalah: Pamalayon, Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Priangan.

Tataran Pamalayon meliputi Bekasi dan Depok, didominasi oleh etnis Melayu Betawi. Etnis ini berbahasa Melayu dialek Betawi, budaya lebih terbuka, merupakan campuran multi etnis karena imbas dari Jakarta. Tatar B ogor menggunakan bahasa Sunda relatif kasar dan tidak mengenal tingkatan bahasa. Karakter masyarakatnya relatif terbuka, percaya diri, egaliter dan progresif. Tatar budaya Purwakarta mencakup wilayah Purwakarta, Subang dan

Karawang, yang dahulu merupakan tanah partikelir yang dikuasai swasta. Tatar budaya ini kultur Sunda dan Jawa relatif sama kuatnya. Di sisi Selatan kultur Sunda lebih dominan, sementara itu di pesisir dominan kultur Jawa. Ciri khas wilayah pesisir ini: progresif, terbuka, temperamental, keras dan kurang terafiliasi dengan Priangan.

Selanjutnya tatar Cirebon, meliputi Cirebon, Indramayu hingga Majalengka dan Kuningan. Menurut Abdullah Ali pakar sosiologi dan tenaga pengajar STAIN Cirebon, masyarakat Cirebon lebih didominasi Islam yang berfikiran pragmatis. Mayoritas aspirasi politis mereka disalurkan kepada parpol nasionalis dan bukan parpol Islam.

Adapun komunitas budaya terbesar dan terluas pengaruhnya di Jabar adalah Tatar Priangan. Proporsi etnis Sunda di wilayah ini lebih dari 90% dan lebih dari separuh wilayah Jabar. Kelompok budaya Priangan ini meliputi: Priangan Barat (Cianjur dan Sukabumi), Priangan Tengah (Bandung dan Sumedang) dan Priangan Timur (Garut, Tasikmalaya dan Ciamis). Karakter budaya priangan ini antara lain: penggunaan bahasa Sunda yang halus, kesenian lebih berkembang, serta pengaruh Mataram dan Kolonial Belanda, relatif lebih besar dibandingkan daerah Jabar lainnya lantaran menjadi Ibukota pemerintahan (Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2009)

Bandung yang dikenal sebagai Kota Kembang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Bandung menawarkan beberapa alternatif yang dapat dinikmati, seperti: wisata alam yang elok, wisata belanja dan wisata kuliner. Tiap akhir pekan puluhan ribu wisatawan dalam dan luar negeri memadati Kota Bandung.

Penduduk Kota Bandung yang ramah memiliki kreativitas tinggi juga menjadi daya tarik tersendiri. Bandung dikenal sebagai pelopor tren terbaru seperti dalam hal kuliner, mode maupun musik. Banyak kelompok musik dan penyanyi berkualitas ada atau berasal dari Bandung.

Disimak dari sudut etnik dan kebudayaan, penduduk Kota Bandung merepresentasikan segenap etnik dan budaya di Indonesia sepert: Jawa, Minang, Batak. Namun etnik kebudayaan dan bahasanya adalah Sunda. Ke- Sunda-an ini menjadi basis dan identitas kebudayaan Kota Bandung. Kearifan lokal menjadi ciri dan karakter lembaga pranata, kelompok dan individu masyarakat Kota Bandung dalam hidup keseharian mereka.

Tingkat keberagaman etnik, budaya dan agama yang tinggi dalam suatu wilayah yang sempit sangat memungkinkan munculnya sentimen-sentimen kesukuan, kedaerahan atau keagamaan yang dapat memicu timbulnya konflik. Karena itu berbagai pertimbangan mendalam dan hati- hati pada tingkat filosofis, strategis dan praktis harus dilakukan oleh setiap komponen masyarakat agar terhindar dari berbagai konflik kultural dan agama dalam masyarakat.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Selain itu Kota Bandung memiliki beberapa perguruan tinggi terkemuka seperti ITB, UNPAD dan UPI, serta pusat-pusat penelitian yang telah banyak menghasilkan SDM yang berkualitas dan menjadi tokoh nasional bahkan internasional.

3. Keagamaan

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, pembangunan di bidang kehidupan beragama, dikembangkan dan diarahkan untuk peningkatan akhlaq demi kepentingan bersama bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, serta rukun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai upaya pembinaan dilakukan oleh para tokoh dan pimpinan masing-masing kelompok keagamaan melalui berbagai media, seperti: aktivitas keagamaan dirumah ibadat, sekolah, ormas keagamaan, ceramah, diskusi dan dialog, peringatan hari besar keagamaan, buku kepustakaan, media massa dan berbagai aktivitas sosial keagamaan terkait dengan upacara lingkaran hidup di tempat-tempat pemukiman sampai ke tingkat RW. dan RT.

Berkenaan dengan masalah penganut agama, sebagian besar penduduk Kota Bandung yakni sebanyak 2.576.540 jiwa (81,71%) beragama Islam. Sisanya sejumlah 479.540 jiwa (15,21%) beragama Kristen, 68.027 jiwa (2,15%) beragama Katolik, 18.567 jiwa (0,58%) beragama Budha dan sebanyak 10.205 orang (0,32%) penganut Hindu.

Sementara itu, jumlah rumah ibadat untuk masing-masing kelompok agama tercatat 2.186 m asjid, 311 gereja kristen, 24 gereja katolik, 30 rumah ibadat Buddha dan 2 rumah ibadat Hindu.

Tujuh program prioritas yang dicanangkan pemerintah Kota Bandung meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olahraga dan agama. Dalam bidang agama, sasaran utama yang ingin di wujudkan adalah Bandung sebagai Kota Agamis. Menurut Walikota Bandung, dalam konsep Bandung Agamis, semua agama diakui eksistensinya. Bandung agamis berarti menjadikan Bandung sebagai rumah bersama yang nyaman, damai dan tenteram bagi semua pemeluk agama. Mengayam kebersamaan menjadi satu kekuatan dan menjadikan Bandung sebagai rumah bersama yang nyaman, jauh terasa lebih menjanjikan.

Salah satu muatan nilai terpenting dari Bandung Agamis adalah kota dengan masyarakat yang dinamis, menjunjung

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

tinggi nilai ajaran agama sebagai landasan etika dan moral. Selain itu, makna pokok dari visi agamis adalah terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup intern umat beragama, antarumat beragama, antaretnik serta antarumat beragama dan antaretnik dengan pemerintah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, Bandung Agamis memiliki nilai universal yang dapat memelihara keutuhan tauhid yang ditanamkan dalam nilai-nilai pendidikan, kesehatan, kemakmuran ekonomi, lingkungan hidup, seni, budaya dan olahraga sebagai salah satu upaya dari proses membangun peradaban manusia. Melalui program Bandung Agamis, seluruh potensi keagamaan ada optimalisasi kinerja dakwah agar Bandung terhindar dari penyakit masyarakat, termasuk kemaksiatan yang semakin kronis.

B. Forum Silaturrahim Ormas Islam (FSOI)

1. Latar Belakang Berdiri

FSOI merupakan kelompok gabungan ormas-ormas Islam yang ada di Kota Bandung, terbentuk pada tanggal 01 September 2002, atas dasar kesepakatan dan keinginan ormas- ormas Islam bersama-sama dengan Pemda setempat yang diwakili oleh Sekda selaku fasilitator.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Menurut penuturan para narasumber, beberapa faktor yang menjadi latarbelakang berdirinya FSOI ini antar lain:

a) Adanya tekad kelompok muslim menjadikan Bandung sebagai Kota Agamis, terbebas dari cengkeraman segala bentuk kemaksiatan seperti perjudian, minuman keras, prostitusi, pornografi, pornoaksi dan bentuk kemaksiatan lainnya;

b) Fenomena konflik bernuansa agama dan konflik sosial lainnya, masih acapkali muncul walaupun dalam skala kecil, tidak sampai berkembang menjadi konflik terbuka;

c) Efektivitas sinergisitas kelompok muslim secara lebih luas;

d) Meningkatkan partisipasi umat dalam berbagai masalah sosial, budaya, kemanusiaan, keagamaan, khususnya kerukunan hidup beragama;

e) Membantu pemerintah setempat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.

2. Karakteristik FSOI

FSOI mempunyai karakteristif berikut:

a) FSOI merupakan gabungan berbagai kelompok maupun ormas muslim yang ada di Bandung. Anggota-anggotanya meliputi: NU, Muhammadiyyah, PERSIS, MUI, PUI, MA, DMI, ICMI, DDII, Forum Ukhuwah Islamiyah, al- IRSYAD,Parmusi dan Alwasliyah;

b) FSOI merupakan kelompok lokal dan independen. Tidak mempunyai ikatan organisasitoris dengan organisasi lain di luar Bandung, dan tidak terikat dengan kepentingan kelompok politik praktis tertentu;

c) Tidak memiliki AD/ART, semua anggota mempunyai kedudukan yang sama. Keputusan diambil atas dasar musyawarah mufakat.

3. Peran FSOI

a) Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kelompok;

b) Sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota, antar kelompok dengan pemerintah dan dengan kelompok lain di luar FSOI;

c) Melakukan kontrol sosial terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat;
d) Membantu pemerintah dalam bentuk pemikiran, gagasan dan aksi dalam rangka penyelesaian berbagai masalah yang timbul;
e) Membantu upaya perwujudan, pemeliharaan, dan peningkatan kerukunan hidup beragama dan keutuhan bangsa, bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat setempat;
f) Mendukung dan membantu pemerintah merealisasikan program Bandung Kota Agamis dan program prioritas lainnya.

4. Bandung Agamis

Sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan Bandung Kota Agamis, terhitung mulai tanggal 18 April2007, Walikota Bandung secara resmi menutup Saritem, zona hitam sekaligus lokalisasi yang paling legendaris dan telah beroperasi sejak ratusan tahun yang lalu. Penutupan Saritem ini merupakan pertanda awal yang paling jelas dari tekad Pemrintah Kota Bandung untuk menyukseskan Program Bandung Agamis. Penutupan Saritem ini telah dilakukan beberapa kali, namun selalu gagal. Baru pada waktu Walikota Bandung dijabat Dada Rosada, masalah Saritem bisa dituntaskan dan ditutup secara permanen.Menurut Walikota, keberanian dan keberhasilannya menutup permanen Saritem, karena didukung oleh para Ulama yang tergabung dalam ormas-ormas Islam.

Disadari bahwa penutupan Saritem ini bukannya tanpa resiko. Banyak hambatan yang dihadapi terutama dari pihak-pihak yang selama ini mengenyam keuntungan dari kehadiran usaha haram tersebut. Warga Saritem

digerakkan untuk berdemonstrasi melakukan perlawanan, bahkan Walikota mendapat ancaman pembunuhan lewat SMS.

Untuk tingkat jangka panjang, pemerintah menyiapkan desain perubahan fungsi kawasan Saritem secara menyeluruh. Di kawasan Saritem ini sudah berdiri Pesantren "Darut Taubah" atas gagasan seorang Kiai sepuh Imam Sonhaji yang dijuluki sebagai Kiai Germo (Gerakan Moral). Pemda merencanakan pembangunan Kantor FKUB dan Pusat Dakwah, termasuk menata Saritem menjadi kawasan wisata kuliner, wisata belanja hingga wisata religi.

Sehubungan dengan momentum Bandung Agamis ini, FSOI, bersama dengan Majelis Generasi Muda Islam, FKUB dan unsur organisasi agama kota Bandung merilis pernyataan sikap bersama yang secara tegas menolak berbagai bentuk kemaksiatan, sekaligus menuntut segala bentuk kemaksiatan dihentikan.

Dalam Deklarasi Bandung Bebas Maksiat pada tanggal 10 September 2007, ditegaskan bahwa Bandung bebas dari perjudian, minuman keras, prostitusi, pornografi, pornoaksi dan bentuk kemaksiatan lainnya.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Selain itu para tokoh FSOI bersama para tokoh agama lainnya yakni: Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu pada tanggal 10 November 2007, merilis Deklarasi Sancang, bertempat di Kantor Wilayah NU Jawa Barat, yang memuat hal-hal berikut:

a) Kami umat beragama Kota Bandung adalah bagian dari Bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan;
b) Kami umat beragama Kota Bandung menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
c) Kami umat beragama Kota Bandung selalu berjuang untuk tegaknya hukum dalam mewujudkan

kesejahteraan, keadilan, dan kerukunan hidup demi mencapai kebahagiaan bersama;

d) Kami umat beragama Kota Bandung selalu mengembangkan sikap toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati;

e) Kami umat beragama Kota Bandung selalu bekerjasama untuk berperan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan.

C. Beberapa Kasus

Sejumlah kasus yang mengundang konflik keagamaan dan sosial yang pernah mencuat di Kota Bandung antara lain sebagai berikut:

1. Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP)

   Keberadaan dan aksi-aksi kelompok AGAP yang gencar menelusuri laporan masyarakat tentang kasus-kasus yang mereka curigai sebagai upaya kristenisasi, dianggap cukup mencemaskan, terutama bagi kalangan gereja dan kelompok Kristen. Kelompok ini pernah menjadi isu nasional tatkala media massa memberitakan AGAP melakukan aksi *"sweeping"* terhadap warga Denmark yang ada di Kota Bandung, terkait dengan pemuatan karikatur Nabi Muhammad dalam salah satu koran yang terbit di Denmark yang mereka pandang sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap umat Islam (2005).

2. Pondok Nabi

   M.S. (nama singkatan seorang pendeta) berkeyakinan mendapat titah langsung dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Dia yakin kiamat akan terjadi tanggal 10 Nopember 2003

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

dan proses kehancuran akan berlangsung sampai tiga setengah tahun dalam dimensi waktu manusia. Tempat tinggalnya dijadikan tempat berhimpun orang-orang yang dipilih Tuhan untuk naik langsung ke surga.Tempat ini kemudian dikenal sebagai "Pondok Nabi". Dari pondok ini M.S. menyebarkan sabda-sabdanya seperti: " Saya diutus Allah. Dia (Allah) menyuruh saya memberitahu semua orang agar jangan binasa. Sebelum kiamat datang pukul tiga sore 10 Nopember 2003, bertobatlah semua". Ternyata kemudian yang terjadi bukan kiamat, bukan malaikat datang menjemput dan mengangkat ke surga, tapi serombongan polisi mengangkut dua belas pimpinan jemaat ke tahanan. Sementara sekitar tiga ratus anggota jemaat yang yakin dengan datangnya hari kiamat seperti disabdakan M.S., dievakuasi ke gereja, kemudian dipindahkan ke tempat lain yang lebih memadai.

Kemudian melalui proses pengadilan setempat M.S. didakwa dan dianggap terbukti melakukan penodaan agama (Ps. 156a KUHP) yang akhirnya di hukum empat tahun penjara.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

3. Konflik Internal HKBP

Menurut Rtn. (nama singkatan seorang jemaat) kepengurusan HKBP Bandung terbelah dua sejak tahun 1992. Pada tahun 1998, dalam sinode ditawarkan tiga opsi penyelesaian: *Pertama,* perdamaian kedua kubu. *Kedua,* pemekaran. *Ketiga,* penggunaan gereja secara bergilir. Bila satu kelompok menggelar kebaktian pagi hari, maka waktu ibadah kelompok satu lainnya pada siang hari. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 14 Oktober 2007, terjadi ketegangan antara dua kubu. Pada saat

jemaat kelompok yang satu melakukan kebaktian di gereja, jemaat kelompok lainnya memaksa masuk ke ruangan yang sedang dipakai. Lantas terjadi kericuhan dan aksi kekerasan berupa banting kursi. Konflik internal HKBP ini, kemudian dicari penyelesaian melalui proses pengadilan setempat.

4. Kelompok agama yang dianggap menyimpang

Di kalangan umat Islam, perbedaan penafsiran dan perbedaan pengamalan agama yang bersumber dari kitab suci yang tidak sesuai dengan paham agama yang dianut kelompok arus utama, tidak jarang berdampak terhadap munculnya konflik sosial yang melibatkan massa. Akibatnya, rentan bagi timbulnya gangguan kerukunan umat beragama, seperti: kasus Ahmadiyah, kelompok Ahmad Sayuti yang menganggap dirinya Nabi (Kopo-Regol) dan kasus Musadiq.

Dilingkungan kelompok Kristen juga terdapat aliran yang relatif agresif menyebarkan pahamnya kepada kelompok lain, baik sesama Kristen yang berbeda aliran/sekte, ataupun kepada warga yang beragama lain. Kelompok ini dipandang memiliki militansi relatif tinggi dalam upaya merekrut jemaat baru. Membangun gereja baru merupakan salah satu usaha dan aktivitas kelompok ini untuk mewadahi peribadatan jemaatnya. Sebagian kelompok muslim memandang aktifitas seperti ini sebagai upaya kristenisasi dan arogan (Hamdar Ar-Roiyyah, 2006).

5. Rumah Ibadah

Dari laporan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dinyatakan bahwa masih sering terjadi penggunaan tempat tinggal atau ruko yang

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

difungsikan sebagai tempat ibadat, serta menghadirkan jemaat dari luar lingkungan. Hal ini dipandang oleh mayoritas muslim setempat sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 &8 Tahun 2006. Sementara kalangan Kristen beranggapan hal seperti ini dilakukan karena terpaksa, lantaran di lokasi terkait belum ada gereja untuk kebutuhan beribadat bagi jemaatnya.

Selain itu dilaporkan pula, adanya kelompok Kristen yang berdakwah terhadap warga lain yang sudah beragama melalui berbagai cara seperti penyebaran buku serta selebaran, bantuan pangan dan pengobatan. Dakwah seperti ini dianggap sebagai pemurtadan dan upaya Kristenisasi terselubung yang dapat mengganggu kerukunan (Para Kepala KUA, Hasil Wawancara).

6. Penyelesaian Konflik

Beberapa langkah yang lazim ditempuh terkait dengan berbagai konflik yang muncul, yaitu: a) Pendekatan secara kekeluargaan; b) Dialog antar para tokoh agama dan pemuka masyarakat setempat; c) Memanfaatkan jasa FKUB; d) Proses pengadilan; e) Menyerahkan persoalan konfdlik kepada pemerintah setempat.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

D. Analisis

1. Sinergitas Kelompok Muslim

Salah satu latar belakang terbentuk dan lahirnya FSOI pada tanggal 1 September 2002, adalah adanya keinginan yang kuat dari kalangan tokoh muslim Kota Bandung untuk meningkatkan kebersamaan, kerjasama, dan sinergitas

segenap potensi umat dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Ormas-ormas Islam selama ini dipandang oleh para narasumber lebih banyak berjalan sendiri-sendiri, dan cenderung lebih menonjolkan orientasi kelompok dan kurang mengesankan beraktivitas untuk kepentingan umum masyarakat muslim dan bangsa. Kelompok arus utama yang didominasi oleh NU dan Muhammadiyah dipandang oleh para tokoh di luar NU dan Muhammadiyah sebagai kurang memperhatikan mereka dan dianggap sering mengabaikan aspirasi dan kepentingan umat secara keseluruhan. Padahal andaikata ormas-ormas dan para tokoh muslim bersinergi, maka potensi kelompok muslim yang sangat signifikan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa, khususnya peningkatan upaya pemberdayaan ekonomi umat.

2. Bandung Agamis

Untuk mepersempit ruang gerak praktik-praktik kemaksiatan di Kota Bandung, pada tanggal 10 September 2007, FSOI merilis pernyataan sikap bersama, menolak dan menuntut segala bentuk kemaksiatan agar dihentikan. Bebas dari perjudian, minuma keras, prostitusi, pornografi pergaulan bebas dan bentuk kemaksiatan lainnya. Deklarasi FSOI ini juga mendukung kebijakan Walikota Bandung yang menutup lokalisasi Saritem secara permanen. Orang atau kelompok yang merasa dirughikan dengan penutupan Saritem ini melakukan perlawanan bahkan Walikota mendapat ancaman pembunuhan lewat SMS. Namun hal ini tidak menyurutkan langkah Pemda dan ormas-ormas setempat. Proses penyelesaian Saritem ini harus diikuti, ditindaklanjuti dengan realisasi program Pemda Kota

Bandung membangun bekas lokalisasi menjadi kompleks perkantoran FKUB, Lembaga Pendidikan dan dakwah, termasuk kawasan wisata religi. Dengan demikian Citra Saritem dengan lingkungannya yang gelap dan hitam berubah menjadi nyaman dan agamis, sekaligus dapat memberikan peluang usaha bagi kelompok ekonomi lemah.

3. Deklarasi Sancang

Untuk memelihara Bandung menjadi tempat yang nyaman bagi umat beragama, para pimpinan agama yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu berembuk dan menyepakati "Deklarasi Sancang" yang dirilis dalam acara Halal Bihalal lintas agama pada tanggal 10 November 2007 di jalan Sancang. Secara sosiologis, deklarasi tersebut bertolak dari kondisi objektif setempat yang acapkali muncul konflik bernuansa etnis, ras dan agama. Gagasan ini menguat setelah umat Islam berkunjung ke sejumlah gereja pada tanggal 25 Desember 2006. Saat itu kelompok muslim membagikan bunga dan menyampaikan salam damai.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Pada sisi lain, deklarasi ini juga mebuktikan bahwa agama bukanlah sekat dan tembok yang memisahkan dan memilah-milah umat. Sebaliknya agama merupakan pendorong saling mengasihi dalam semangat persaudaraan. Pendeta Alb. Pt. berharap deklarasi ini merupakan langkah awal membangun kembali persaudaraan antarumat beragama. Dia juga berharap agar segala bentuk konflik dan prasangka bisa dihilangkan dan pupus. Masyarakat Bandung yang memiliki keyakinan dan nuansa keagamaan yang kental, merupakan salah satu potensi yang dapat digali dan dikembangkan menjadi kekuatan, kemampuan dan daya

untuk membangun kebersamaan, kepedulian sosial, kerjasama sosial kemanusiaan, bagi upaya perwujudan bangunan masyarakat yang nyaman, aman, sejahtera dan rukun.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Mengacu kepada berbagai informasi yang berhasil dihimpun, setelah dikoreksi, diklasifikasi, dilihat saling keterkaitannya, dianalisis dan di interpretasi, maka dapat ditarik beberapa simpul pokok yang dipandang penting sebagai hasil kajian secara keseluruhan, sebagai berikut:

a) Forum Silaturrahim Ormas Islam (FSOI) Kota Bandung yang dijadikan sasaran kajian ini terbentuk sejak tanggal 1 September 2002, beranggotakan Ormas-ormas Islam setempat dengan ciri- ciri: i) ruang lingkup aktivitas terbatas di Kota Bandung (lokal); ii) Tidak ada hubungan dan ikatan organisasi dengan kelompok atau organisasi lain; iii) Independen, tidak ada hubungan dan ikatan dengan kelompok kepentingan politik praktis; iv)) Berkiprah di bidang *"Amar Makruf dan Nahi Munkar"* dilingkungan masyarakat Kota Bandung.
b) Latar belakang dibentuk dan berdirinya FSOI ini merupakan rasa ketidakpuasan atau koreksi terhadap beberapa kenyataan obyektif dalam masyarakat setempat antara lain: i) Berkembangnya beragam bentuk kemaksiatan seperti perjudian, minuman keras, pelacuran, pornografi, pergaulan bebas, dan bentuk maksiat lainnya; ii Kecenderungan ormas Islam bergerak sendiri-sendiri, tidak bersinergi; iii) Fenomena konflik bernuansa agama dan konflik sosial lainnya, masih

acapkali muncul di Kota Bandung, walaupun ekskalasinya relatif kecil, tidak sampai mengakibatkan terjadinya konflik terbuka.

c) Beberapa peran dan aktivitas yang dilakukan FSOI meliputi: i) Sarana komunikasi timbal-balik dan mediasi antar Ormas-ormas Islam, antara Ormas Islam dengan pemerintah dan antara kelompok muslim dengan kolompok non-muslim; ii) Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya; iii) Melakukan aksi-aksi sosial kontrol terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat; iv) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah mencari pemecahan terhadap berbagai masalah soial keagamaan yang muncul; v) Menumbuhkembangkan suasana kondusif bagi terpelihara dan peningkatan kerukunan hidup beragama, toleransi, kerjasama sosial kemanusiaan dan keutuhan berbangsa dan bernegara.

d) Bentuk-bentuk konflik yang pernah muncul di lingkungan kehidupan umat beragama setempat antara lain: i) Aksi-aksi protes dan *sweeping* yang dilakukan kelompok Aliansi Gerakan Pemurtadan (AGAP) terhadap warga Denmark yang ada di Bandung terkait dengan pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW.; ii) Kasus "Pondok Nabi" dengan tokohnya Pendeta M.S. yang mengaku utusan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran dan mengangkat mereka ke surga, terkait dengan datangnya hari kiamat; iii) Konflik internal HKBP di Bandung; iv) Aksi-aksi demo kolektif yang disertai prilaku anarkis dan kekerasan; v) Kasus rumah ibadat dan penyiaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Beberapa upaya yang ditempuh dalam penyelesaian kasus konflik yang muncul meliputi: i) Pendekatan secara kekeluargaan; ii) Dialog antartokoh keagamaan dan pemuka masyarakat; iii) Dialog melalui FKUB; iv) Proses pengadilan; v) Menyerahkan kepada pemerintah.

2. Rekomendasi

Untuk mencegah, memelihara dan meningkatkan integrasi sosial dan kerukunan umat beragama, diperlukan langkah-langkah konkrit yang lebih terarah dan berkesinambungan, antara lain:

a) Peningkatan fungsi dan peran FSOI, lembaga-lembaga keagamaan dan kearifan budaya lokal;
b) Meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat;
c) Menggalakkan dialog multikultural dan kerjasama kemanusiaan lintas agama, budaya, dan profesi;
d) Meningkatkan efektifitas FKUB;
e) Pengembangan wawasan dan pelaksanaan nilai-nilai kerukunan melalui kegiatan kurikuler di sekolah- sekolah;
f) Sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan terkait kerukunan secara lebih luas dan berkesinambungan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR PUSTAKA

Ajib Rosidi, 2011, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda,* Kiblat, Majalah.

Balitbang Agama, 2001, *Sistim Siaga Dini,* Balitbang Agama, Kemenag RI., Jakarta.

Balitbang dan Diklat Kementrian Agama, 2009, *Potret Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat,* Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat, Jakarta.

BPS Provinsi Jawa Barat, 2010, *Jawa Barat Dalam Angka,* Pemda Provinsi Jawa Barat, Bandung

Erik From, 1985, *Man Himself* (terjemahan), Akademika Kelompok Pengkaji Masalah Kemanusiaan.

George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2004, *Modern Sociological Theory,* Prenada Media.

Hugh Miall et al, 1999, *Contemporary Conflict Resolution,* Policy Press.

Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, 2010, *Data Keagamaan,* Kanwil Kemenag Prov. Jabar, Bandung.

Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam Untuk Aksi,* Mizan,. Bandung.

Margaret S. Herman (ed.), 1994, *Resolving Conflict Strategies for Local Government,* Washington DC, ICMA.

Mursyid Ali dkk, 2006; *Peta Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia,* Kementerian

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.

Nurcholis Madjid, 2000, *Islam Agama Peradaban*, Paramadina, Jakarta.

Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2004, *Bandung Agamis, Landasan Pendekatan, Indikasi dan Program Aksi*, Bandung.

Tim Puspar, 2004, *Wawasan Budaya untuk Pembangunan Menoleh kearifan Lokal*, Pilar Politika Jogja.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

IX
PERAN KELOMPOK MUSLIM MASJID AL-MUHTADIN PLUMBON DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL PROVINSI DIY

Oleh: Rita Pranawati

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kehidupan Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Budaya

Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, secara umum adalah merupakan daerah yang relatif aman dalam konteks kerukunan umat beragama. Selama ini di daerah Kabupaten Bantul dapat dikatakan belum pernah ada gesekan-gesekan yang cukup besar antarumat beragama yang melibatkan kelompok masyarakat dalam jumlah besar. Yang pernah terjadi selama ini hanyalah gesekan -gesekan kecil antar kelompok agama yang berbeda. Dalam konteks hubungan antarumat beragama, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat dalam penyelesaian gesekan- gesekan antarumat beragama sangat sentral. Unsur-unsur masyarakat tersebut menjadi kunci dalam upaya penyelesaian masalah antarumat beragama di kalangan masyarakat Bantul.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Di bidang ekonomi, sebagai daerah agraris Kabupaten Bantul selama ini terlihat tidak mengalami modernisasi yang pesat sebagaimana dialami Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta. Dalam pembangunan bidang ekonomi, termasuk bidang infrastruktur dan usaha mikro, Pemerintah Daerah Bantul menerapkan penguatan peran masyarakat lokal daripada menerima bantuan asing yang dianggap tidak pro

rakyat, misalnya bentuk-bentuk bantuan berupa minimarket dan supermarket.

Di bidang pendidikan, walaupun memiliki beberapa kampus besar seperti Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Kabupaten Bantul tidak mengalami perkembangan yang pesat sebagaimana Sleman sebagai akibat banyaknya kampus yang berkembang. Di Kabupaten Sleman terdapat berbagai universitas misalnya: Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Oleh karena itu tidak mengherankan jika secara sosiologis perkotaan, Bantul adalah daerah yang relatif stabil sebagai daerah agraris dan tidak mengalami perkembangan gejolak yang berarti menuju area industri maupun metropolis.

Dalam tataran budaya, masyarakat Bantul masih kuat memegang identitas dan budaya Jawa. Nilai-nilai budaya Jawa sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bantul termasuk dalam membangun kerukunan beragama. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2011 jelas tercantum nilai-nilai budaya Jawa khususnya Yogyakarta yang tanpa Perda pun sesungguhnya sangat melekat dalam budaya masyarakat Bantul. Beberapa nilai budaya Jawa yang erat kaitannya dengan menjaga diri untuk tidak memprovokasi orang lain termasuk dalam berhubungan dengan non muslim yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat Bantul antara lain: *ajining dhiri saka lathi lan pakarti* (sesungguhnya, harkat dan martabat seseorang lebih ditentukan oleh kata dan perbuatannya), *nandur kabecikan,*

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

ndhedher kautaman (orang harus senantiasa berusaha menanam kebajikan dan terus-menerus menyemai budi luhur sebagai keutamaan), *kèh tepané mring sagunging urip* (bertenggang rasa dan berbelas kasih kepada semua makhluk hidup (Perda Provinsi DIY No 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta).

Selain itu ada nilai-nilai yang lekat untuk hidup bermasyarakat, menjaga harmoni dan membangun kerukunan yang semuanya ada dalam kehidupan masyarakat dan diikutkan dalam Perda (Perda Provinsi DIY No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta). Nilai-nilai dimaksud misalnya: pentingnya masyarakat menjaga kasih sayang (*sih kinasihan; asih ing sesami)* di antara para anggotanya karena pertikaian mendatangkan kehancuran (*rukun agawé santosa, crah agawé bubrah*). Jika terdapat masalah, maka sebaiknya masyarakat perlu menyelesaikan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan (*ana rembug ya dirembug*). Masyarakat juga perlu membangun solidaritas dalam suka dan duka (*sabaya mati, sabaya mukti),* harus tolong-menolong, bantu-membantu tanpa mengharap balas (*sepi ing pamrih),* bekerja keras tanpa pamer *(ramé ing gawé),* agar permasalahan dapat selesai dengan baik. Prinsip lain dalam hidup bermasyarakat adalah menghormati orang lain dengan tata krama (*anggah-ungguh*), dengan bersedia memanusiakan orang lain (*nguwongké lan diuwongké*), yang akan menghasilkan empati dan timbal-balik (*tepa salira)* dan tentunya menyesuaikan dengan waktu, tempat, dan konteks (*angon mangsa, empan papan, duga prayoga*). Nilai-nilai tersebut melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bantul, untuk berhubungan baik dengan masyarakat umumnya serta antarumat beragama khususnya. Dengan demikian maka tidak mengherankan jika masyarakat Bantul

yang tidak mengalami industrialisasi massif namun tetap terdidik sebagaimana Jogja secara umum, menerapkan nilai-nilai Jawa dalam berhubungan dengan agama lain.

2. Komposisi Pemeluk Agama dan Kelompok Keagamaan

Dari sisi komposisi pemeluk agama, Islam menjadi agama mayoritas penduduk Bantul yang mencapai hampir 95,56%, disusul Katolik 2,44%, Kristen 1,86%, Hindu 0,09% dan Budha sebanyak 0,05%. Untuk Katolik dan Kristen terkonsetrasi di beberapa kecamatan yang sebagian besar berbatasan dengan kota Yogyakarta dan Sleman, yaitu Banguntapan, Sedayu, Kasihan, dan Sewon. Dua kecamatan non perbatasan yang memiliki penduduk Katolik dan Kristen adalah di Kecamatan Bantul Kota dan Bambanglipuro. Pemeluk Hindu terbanyak ada di Kecamatan Banguntapan dan Kasihan, sedangkan pemeluk Budha di Kecamatan Kasihan.

Di Kecamatan Plumbon, tempat masjid Al-Muhtadin berada, penduduk muslim adalah mayoritas; kemudian disusul Katolik dan Hindu dengan jumlah hampir seimbang. Hanya 3 kepala keluarga yang beragama Kristen.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

3. Potensi Intoleransi

Gesekan antar kelompok agama yang terjadi di Bantul masih dalam skala kecil. Para tokoh agama memiliki peran yang cukup signifakan untuk meredam percikan potensi intoleransi yang terjadi di Bantul. Beberapa masalah keagamaan yang pernah terjadi antara lain soal pendirian rumah ibadat yakni pendirian gereja Kristen di Baturetno Kecamatan Banguntapan dan di kota Bantul. Keduanya tidak memenuhi verifikasi dari Kantor Kemenag dan FKUB Kabupaten Bantul dalam hal jumlah jamaah

pengguna rumah ibadat dan kesediaan warga sekitar atas rencana pendirian rumah ibadat. Karena belum memenuhi syarat, maka para pemeluk agama yang bersangkutan legowo menerima ketetapan Kantor Kemenag dan FKUB Kabupaten Bantul yang tidak memberikan izin rencana pendirian rumah ibadat tersebut mengingat aturan tersebut diterapkan secara sama rata terhadap semua umat beragama yang akan mendirikan rumah ibadat. Beberapa masjid yang dibangun pada paska Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 8 & 9 Tahun 2006 juga diverifikasi oleh Pejabat terkait di Bantul, contohnya adalah masjid milik Universitas Ahmad Dahlan yang lulus verifikasi, serta rencana pendirian masjid di Banguntapan yang ternyata tidak lolos verifikasi.

Persoalan penggunaan rumah menjadi tempat pelaksanaan ibadah terkadang juga menjadi problem di Bantul karena kurangnya kepekaan dan toleransi baik penduduk maupun masyarakat yang melakukan ibadah. Sebagai contoh, misalnya di Wajo Sewon, kebaktian di rumah pada bulan puasa dianggap mengganggu jamaah masjid yang tadarusan. Kesepakatan penduduk dengan Ketua RT antara lain berupa pelarangan kepada warga Katolik agar tidak lagi melakukan kebaktian pada bulan puasa tersebut terkesan memojokkan warga Katolik walaupun dikatakan penandatanganan kesepakatan atas kesadaran. Hal ini berbeda dengan praktek misa di rumah-rumah di area Plumbon. Dengan kesadaran penuh, umat Katolik mengadakan misa setelah sholat Isya dan yang muslim juga menghormati misa tersebut. Begitu juga soal anjing yang pernah masuk masjid di Masjid Pager Bumi Plumbon. Melalui pendekatan dengan pengurus RT dan warga setempat akhirnya anjing tidak hidup secara liar. Kesadaran ini juga

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

dimiliki oleh Mw. (nama singkatan) seorang warga yang rumahnya terletak di samping masjid al-Muhtadin. Dialog, interaksi, dan *tepo seliro* menjadi kunci penyelesaian potensi konflik antarumat beragama di Kabupaten Bantul.

Gesekan lain yang pernah terjadi pada masa gempa tahun 2005 yaitu di Selopamioro. Ketika itu sekelompok pemeluk Katolik dari kota Salatiga memberikan bantuan dan mengadakan kebaktian di tempat umum yang di desa itu tidak ada pemeluk Katoliknya. Gereja setempat juga tidak mengetahui adanya kegiatan ini sehingga kehadiran kelompok ini tidak hanya ditolak oleh penduduk tetapi juga gereja sempat. Dialog antar warga, Gereja dari Salatiga, Gereja setempat, tokoh muslim, dan tokoh masyarakat memutuskan bantuan dari gereja Salatiga dihentikan. Aturan penyelenggaraan ibadah ketika gempa harus ada pemeluk agamanya menjadi kesepakatan dalam penyelesaian masalah di Selopamioro.

Gesekan lain terjadi pada saat erupsi Merapi tahun 2010 yaitu isu kristenisasi di Gereja Katolik Ganjuran Bambanglipuro. Para pengungsi muslim yang berasal dari Sleman berada di gereja Katolik Ganjuran. Dengan komunikasi dan dialog antara para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat, masalah tersebut tidak melebar. Hasil dialog memutuskan para pengungsi dipindahkan ke GOR Maguwoharjo yang masih menjadi area Sleman, tempat asal mereka dan sebagian pindah ke pesantren asy-Syifa di daerah Bantul. Di daerah Ganjuran ini juga pernah terjadi penolakan kelompok muslim terhadap retreat muda-mudi gereja Katolik Ganjuran di lapangan karena tidak memberitahu warga. Kasus ini diselesaikan oleh FKUB, tokoh muslim, Gereja Katolik Ganjuran dan pihak kecamatan, dengan membuat beberapa kesepakatan untuk

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

membuat ijin aktivitas keagamaan yang cukup besar dan berada di luar rumah ibadat.

Mekanisme dialog dan pelibatan tokoh agama menjadi kunci penyelesaian berbagai gesekan keagamaan ini. Kehadiran Forum Komunikasi Antarumat Beragama sebelum adanya FKUB sudah berjalan di Bantul sehingga berbagai masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kedekatan antartokoh agama juga menjadi kunci penyelesaian gesekan yang terjadi antarumat beragama.

4. Kelompok Keagamaan Pendukung Kerukunan Umat Beragama dan Potensi Penghambat Kerukunan

Beberapa kelompok keagamaan yang potensial untuk menghambat kerukunan antarumat beragama antara lain Front Jihad Islam (FJI). Front Jihad Islam memiliki peran sebagaimana Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia secara umum, namun FJI di Bantul tidak seagresif FPI di daerah lainnya. Di daerah Banguntapan ada pula kelompok Gerakan Anti Maksiat (GAM) yang merupakan *underbow* Pemuda Ka'bah yang melakukan razia panti pijat dan salon-salon, yang bersama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) juga pernah menyerang Lembaga Kajian Ilmu Sosial (LKIS) yang berkantor di seberang pura Jagatnatha. Tindakan main hakim sendiri oleh kelompok ini tentu menjadi potensi intoleransi tersendiri.

Ada pula Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang merupakan organisasi kemasyarakatan dan memiliki cabang di Provinsi DIY sempat membuat warga di daerah Kasihan meradang. Salah satu anggota Gafatar yang masih berusia 17 tahun meninggal dan dimakamkan di tanah yang dibeli dengan ijin untuk makam keluarga dengan cara yang tidak mengikuti ajaran agama tertentu, tetapi dengan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

membuat sejenis "aliran baru". Situasi ini membuat warga di Kasihan sempat resah dan akhirnya terjadi dialog antar pihak kecamatan, komunitas lintas agama dan Gafatar. Di beberapa kecamatan di kota Yogyakarta Gafatar juga ditolak dan hal ini dapat dilihat dengan jelas di spanduk-spanduk.

Satu gerakan Islam yang sering membuat gesekan dengan gerakan Islam lainnya adalah kehadiran Majelis Tafsir al-Qur'an (MTA) yang sudah mulai menyebar di daerah Bantul. Jamaah MTA sering secara keras bergesekan dengan komunitas muslim lainnya dalam mengingatkan paham keagamaan, misalnya soal perbedaan pandangan tentang Do'a Qunut dan tahlilan.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang telah lama mengakar di kalangan masyarakat Bantul menjadi penyeimbang sejati kehidupan keberagamaan di Bantul. Adaptasi yang teruji dari NU dan Muhammadiyah dengan budaya Jawa dalam menerapkan Islam telah terbukti mampu menjaga kerukunan hidup antarumat bergama di Bantul. Hal ini berbeda dengan ideologi-ideologi Islam lainnya yang hadir pada paska reformasi yang tidak dapat beradaptasi dengan budaya Jawa. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kabupaten Bantul banyak kita jumpai candi, namun tidak ada candi yang dirusak oleh umat Islam. Hali ini adalah merupakan salah satu bukti bahwa di Kabupaten Bantul umat Islam mampu menjaga kerukunan antarumat beragama. Begitu juga ketokohan para pimpinan ormas NU dan Muhammadiyah dapat menggandeng kelompok-kelompok non muslim untuk lebih menguatkan kerukunan. Di samping itu, kehadiran Keraton Yogyakarta dengan budaya Jawanya berperan dalam mewujudkan Jogja yang damai, berimbas terhadap kehidupan yang damai di kalangan masyarakat Bantul.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

B. Masjid al-Muhtadin Plumbon dan Perannya Dalam Kerukunan Umat Beragama

1. Fakta tentang Masjid

Salah satu riset tentang masjid dilakukan oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan hasil riset CSRC tentang masjid-masjid di Jakarta, masjid-masjid di Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pendidikan, diskusi keagamaan hingga training dan pelatihan (Ridwan al-Makassary dan Ahmad Gaus AF (Ed.), 2010). Sebanyak 98% takmir masjid menyatakan setuju bahwa masjid adalah tempat pengajaran keagamaan, termasuk didalamnya pengajaran tentang toleransi. Dari survei tersebut juga ditemukan bahwa 59% masjid tidak mempersoalkan materi pengajaran keagamaan yang disampaikan di masjid dan sisanya 41% memperhatikan materi pengajaran keagamaan. Selain itu, 83% takmir membebaskan materi kepada para khotib dan pembicara. Dalam hal ini, masih banyak masjid yang membebaskan materi keagamaan yang diajarkan di masjid yang dikelolanya dan belum memiliki visi akan dibawa kemana pengajaran keIslamannya, termasuk konsep toleransinya.

Masjid juga menghadapi infiltrasi radikalisme yang tidak mendukung kerukunan umat beragama. Infiltrasi radikalisme masjid-masjid di Jakarta diantaranya dilakukan melalui buletin Jumat gratis (Ridwan al-Makassary dan Ahmad Gaus AF (Ed.), 2010). Sebanyak 42% takmir pernah menerima buletin gratis diantaranya yang cenderung beraliran keras seperti dari HTI 7% dan buletin al-Furqan DDII (2%). Hanya 1% masjid yang menerima buletin Jumat milik Kemenag dan buletin *Shiratal Mustaqim* milik Center for

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Moderate Moslem (1%). Tentang isu toleransi, ada 63% masjid yang menyuarakan pentingnya menghormati keyakinan agama lain, dan ada 51% masjid menyampaikan non muslim memiliki kesetaraan hak. Lebih jauh riset CSRC di 10 masjid di Solo menemukan bahwa dalam derajat yang berbeda masjid telah terinfiltrasi radikalisme, adanya takmir yang tidak menghargai hak - hak non muslim disekitarnya, dan ada pula masjid yang tidak mengindahkan ceramah-ceramahnya mengingat ceramah tersebut didengar publik yang artinya belum menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* di masjidnya (Ridwan al-Makassary dan Ahmad Gaus AF (Ed.), 2010). Dari fakta tersebut diatas dapat dikatakan masih cukup banyak masjid yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya toleransi dan mempraktekan-nya dalam konteks kemasji dan dan kehidupan kemasyarakatan.

Selain itu, masih ada pula takmir masjid yang masih memiliki cita-cita mendirikan negara Islam walaupun telah hidup dalam bingkai negara Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Sebanyak 21% takmir masjid di Jakarta menyatakan wajibnya umat Islam mendirikan negara Islam yang artinya menegasikan keberaadaan kelompok lain. Sebanyak 31% takmir masjid di Jakarta juga menyetujui penerapan pidana Islam di Indonesia yang artinya tidak melihat keragaman Indonesia. Telisik lebih jauh tentang masjid dan peranannya dalam membangun kerukunan umat beragama masih relevan dan penting mengingat masih banyak takmir masjid yang membebaskan pengajaran keagamaan termasuk didalamnya dalam membangun kerukunan umat beragama.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

2. Profil Masjid al-Muhtadin Plumbon

Masjid al-Muhtadin Plumbon didirikan di atas tanah wakaf dari keluarga Harjodinomo. Pada awal didirikan, masjid tersebut masih berupa mushola, kemudian pada tahun 1986 direnofasi menjadi masjid dengan nama "Masjid al-Muhtadin", yang selanjutnya pada tahun 1997 memiliki yayasan Sabilul Muhtadin. Pada saat penelitian ini dilakukan, masjid tersebut sedang dalam tahap renovasi dibangun dua lantai.

Masjid al-Muhtadin merupakan masjid komunitas yang tidak membawa identitas Muhammadiyah maupun NU. Walaupun praktek peribadatannya sehari-hari banyak mengikuti tradisi NU, namun untuk praktek Jum'atan dan Tarawih mengikuti tradisi Muhammadiyah. Para pengurus-nya pun ada yang aktif di NU dan ada pula yang aktif di Muhammadiyah. Begitu pula para penceramah agamanya, penceramah yang berlatar belakang NU dan Muhammadiyah dilibatkan dalam kegiatan keagamaan di masjid al-Muhtadin. Setiap hari Jum'at pada saat menjelang sholat Jumat, para jamaah Jum'at diberi Bulletin terbitan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk melayani kebutuhan para jamaah, Masjid al-Muhtadin memiliki beberapa divisi, di antaranya:

a) Takmir Masjid

Takmir bertanggung jawab terhadap segala urusan dan aktivitas masjid. Aktivitas masjid yang dikelola takmir antara lain: sholat lima waktu, sholat Jum'at, pengajian Ahad pagi, Dzikir *Rotibul Hadad*, kajian kitab *Muhtarul Ahadits*, kajian kitab *Bulughul Marom*, Yasinan dan Tahlilan, pengajian tafsir *al-Quran* Ahad Pagi, pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu keliling bertempat

di rumah anggota jamaah secara bergilir, serta Pengajian Remaja Islam Masjid (RISMA). Sejak usai Idul Adha 1433 H yang lalu, RISMA tersebut tidak aktif lagi.

b) Madrasah Diniyah (MD) Takmiliyah al-Muhtadin

Madrasah ini berada satu areal dengan Masjid al-Muhtadin. Madrasah ini memiliki murid kurang lebih 140 murid yang terdiri atas 7 kelas. Madrasah ini mengikuti kurikulum Kementrian Agama, dengan jumlah guru madrasah 10 orang. Mereka berprofesi sebagai mahasiswa yang tinggal di Masjid al-Muhtadin sekaligus menjadi pelaksana Takmir Masjid dan Remaja Masjid al-Muhtadin.

c) Kelompok Bermain al-Muhtadin

Kelompok bermain al-Muhtadin yang berlokasi di areal masjid memiliki murid 20 orang. Para pengajar merupakan masyarakat yang tinggal disekitar Masjid al-Muhtadin.

d) KSU BMT Sabilul Muhtadin

KSU BMT Sabilul Muhtadin berdiri sejak tahun 2007 dan mulai menjadi tumpuan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

e) Madrasah Diniyah (MD) Takmiliyah al-Muhtadi UKS al-Muhtadin

Bidang ini belum terlalu berfungsi namun memiliki kegiatan pengobatan gratis jelang ramadhan yang diberikan kepada semua masyarakat.

f) Olahraga dan Kesenian al-Muhtadin

Bagian ini memiliki aktivitas utamanya di jelang ramadhan den gan melakukan pentas seni. Namun bidang ini tidak terlalu aktif sebagaimana bidang lain.

Masjid ini memiliki relasi yang baik dengan pemerintah daerah Bantul. Beberapa bantuan dari Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Perindustrian, dan Dinas Pendidikan informal dan menengah turut membantu berkembangnya masjid ini. Pada saat penelitian berlangsung, kepala dinas Koperasi dan Perindustrian melantik pengurus KJS BMT Sabilul Muhtadin di Masjid al-Muhtadin yang sedang memperbaharui kepengurusannya. Berita ini pun dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat. Relasi yang baik dengan pemerintah daerah dan media ini tidak lepas dari keberadaan Drs. H. Mas Harun Ghazali, MPdi, Ketua Yayasan Sabilul Muhtadin, yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Informal di Kabupaten Bantul, serta mantan Wakil Ketua Tanfidliyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masjid al-Muhtadin dikelilingi oleh penduduk non muslim termasuk rumah ibadah Pura Jagatnatha yang merupakan pura terbesar di Yogyakarta. Pura Jagatnatha memiliki kegiatan rutin baik *tileman* pada tanggal 1 & 15 Jawa, pengajaran agama Hindu pada hari Minggu, penyuluhan ibu-ibu pada hari Minggu sore, serta menjadi pusat perayaan Galungan, Nyepi, dan hari besar Hindu lainnya untuk umat Hindu di Yogyakarta. Selain itu, masyarakat Hindu juga mengadakan sembahyangan keliling dari rumah ke rumah di sekitar Plumbon. Di sekitar masjid dan pura terdapat masyarakat Katolik yang menginduk ke Gereja Katolik Baciro. Umat Katolik juga menyelenggarakan kebaktian dari rumah ke rumah di wilayah sekitar masjid.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

3. Peran Masjid al-Muhtadin Dalam Kerukunan Umat Beragama

a) Bentuk Keterlibatan dalam Kerukunan

Peran komunitas keagamaan dalam hal ini Masjid al-Muhtadin Plumbon terlihat dalam beberapa kategori berikut:

i) Pelayanan

Masjid al-Muhtadin Plumbon melalui pengurus dan komunitas jamaahnya memberikan beberapa pelayanan kepada masyarakat di sekitarnya yang terdiri atas berbagai pemeluk agama. Di antara pelayanan yang diberikan antara lain:

Pertama, pelayanan sosial: berbagai fasilitas masjid seperti tenda, kursi, tikar, dapat dipinjam oleh warga lintas agama. Prinsip yang dipakai adalah selama fasilitas itu dibawa sendiri dan dikembalikan dalam keadaan baik ke masjid semua warga berhak memanfaatkannya. Warga hanya memberi infak sekedarnya dan bertanggung jawab terhadap pihak pekerja yang membawa tenda. Pura jagatnatha pernah juga meminjam tenda dan kursi dari masjid. Selain itu, pada saat kurban, semua masyarakat mendapat daging kurban walaupun ada sebagian masyarakat Hindu yang kurang berkenan karena mereka tidak makan daging sapi. Bahkan ada warga Hindu yang terlibat dalam proses pemotongan daging dan pembagian daging kurban. Masjid juga menjadi pusat informasi kematian bagi seluruh warga apapun agamanya termasuk infromasi pelayanan kesehatan gratis di pura. Selain itu, ketika ada aktivitas di Pura dan mmebutuhkan kamar mandi lebih, para peserta

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

training di pura juga memanfaatkan kamar mandi masjid.

Kedua, pelayanan kesehatan: ketika masjid menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis, ada warga non Muslim yang mengikuti kegiatan sosial ini. Begitu pula ketika pura menyelenggarakan kesehatan gratis, warga muslim juga dapat menikmatinya.

Ketiga, pelayanan ekonomi: setiap ada pasar murah pada menjelang ramadhan, semua umat beragama dapat berbelanja di pasar murah ini tanpa membeda-bedakan agama. Setian orang dengan agama yang berbeda dapat melakukan jual-beli di pasar murah tersebut dan mereka diperlakukan secara sama. Selain itu, menyikapi kebutuhan pinjaman dari warga non muslim, para anggota BMT dengan sepengetahuan pengurus meminjamkan namanya untuk proses pinjam warga non Muslim. KSU pada prinsipnya tidak menolak nasabah non Muslim karena hal ini merupakan urusan muamalah. Hal ini karena masyarakat non muslim belum menjadi anggota BMT sebagaimana syarat peminjaman serta para pengurus masih mempertimbangkan dengan sangat hati-hati karena tidak ingin menjadi isu islamisasi melalui BMT.

Keempat, pelayanan pendidikan: dalam kurikulum pendidikan yang diajarkan di dua lembaga pendidikan Yayasan Sabilul Muhtadin, yaitu MDA dan kelompok bermain diajarkan soal konsep dan praktek kerukunan umat beragama. Di Kelompok Bermain misalnya ada alat peraga berbagai rumah ibadah dan pengikutnya. Pada kehidupan sehari-

sehari, anak-anak baik yang Muslim dan non bermain bersama baik di masjid maupun di pura. Anak-anak pun saling berdiskusi ajaran agama mereka dan saling mengingatkan jika sudah masuk waktu ibadah. Proses ini tentu menjadi pondasi usaha saling memahami sekaligus pemupukan kerukunan umat ketika mereka dewasa.

ii) Regulasi

Komunitas Masjid al-Muhtadin memang tidak memiliki peran yang besar di level kecamatan maupun kabupaten. Hal ini mengingat bahwa FKUB di tingkat kecamatan relatif tidak aktif. Namun demikian, di dalam internal pengurus masjid memiliki regulasi yang bersifat konvensi yang terus- menerus diperbaharui sesuai dengan perkembangan hubungan antarumat beragama di Plumbon. Begitu pula di tingkat kampung juga memiliki aturan yang tidak tertulis yang selalu diperbaharui untuk tujuan kerukunan umat beragama.

Di dalam internal pengurus masjid ada beberapa regulasi yang dimaksudkan untuk menjaga kerukunan umat beragama. *Framework* bahwa Masjid al-Muhtadin terletak di daerah yang plural dan menjaga harmoni antarumat beragama menjadi salah satu visi dakwah masjid, disadari sepenuhnya oleh semua Pengurus Masjid al-Muhtadin. Kesadaran tersebut mereka wujudkan dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas keagamaan yang dilakukan masjid. Kontrol terhadap materi pengajian menjadi hal yang wajib dan beberapa kali hasil evaluasi masjid menganulir penceramah yang isi ceramahnya kurang menjaga harmoni antarumat beragama. Selain itu,

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

pengurus masjid juga mengontrol speaker yang suaranya diarahkan ke luar masjid; untuk materi-materi ceramah yang sifatnya doktrin keyakinan, suara mic tidak diarahkan ke luar dan para penceramah juga memiliki kesadaran untuk mematikan mic. Selain itu, pengurus masjid juga mengontrol semua aktivitas masjid agar tetap berorientasi kepada visi kerukunan antarumat beragama. Misalnya ketika ada warga Hindu yang terganggu jalan rumahnya untuk pasar murah, pengurus masjid mencari solusi, berdialog dengan warga agar tetap menjaga harmoni. Walaupun belum secara spesifik ada materi toleransi dan kerukunan yang secara khusus disampaikan, takmir masjid menyelipkan materi kerukunan dan toleransi dalam ceramah - ceramah di masjid. Takmir juga mengontrol materi kerukunan di MDA dan Kelompok Bermain.

Terkait dengan regulasi di luar masjid, para takmir masjid bergabung dalam organisasi kemasyarakatan baik di kepengurusan RT, RW, maupun pedukuhan. Di tingka RW dan pedukuhan misalnya, ada aturan bahwa masyarakat Hindu boleh berjualan makanan yang mengandung babi namun dengan mencantumkan bahwa mereka menjual makanan mengandung daging babi. Sikap toleransi kebutuhan daging babi dan sikap berterusterang (*asertif*) untuk mencatumkan menjual daging babi adalah sikap saling menghargai dan menjadi bekal kerukunan yang cukup kuat. Begitu pula dengan beberapa persoalan kecil yang muncul antar pemeluk agama disepakati untuk diselesaikan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

dengan dialog antar tokoh agama setempat sebagai usaha untuk menjaga harmoni. Sebagai contoh dalam kasus ini misalnya kasus sampah dari pura yang dibakar dan asapnya mengganggu warga muslim dan kerusakan taman warga akibat perayaan Nyepi, semuanya dapat diselesaikan secara dialog.

Regulasi internal masjid dan keterlibatannya membuat regulasi yang sifatnya lokal telah merekatkan hubungan antarumat beragama. Hubungan ini tidak sekedar saling memahami tetapi membuat mekanisme agar kebutuhan masing-masing dapat terpenuhi dan semua pihak saling menghargai keputusan bersama.

iii) Pemberdayaan

Aktivitas pemberdayaan yang sistematis dalam kerangka penguatan kerukunan umat beragama, dilakukan di Masjid al-Muhtadin. Secara pasif, berdasarkan undangan para takmir muda mengikuti kajian-kajian multikulturalisme dan kerukunan umat beragama yang diselenggarakan LKIS. Di antara takmir muda yang merupakan mahasiswa, juga ada yang mengunjungi rumah ibadat umat Hindu yakni pura untuk memahami lebih lanjut tentang aktivitas di pura. Selain itu, para takmir muda juga banyak terlibat dalam kegiatan masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk menginternalisasi nilai-nilai toleransi melalui turun ke lapangan. Sekalipun Ketua Takmir Masjid al-Muhtadin (Masharun Ghazali) pernah ikut serta mengisi acara kajian - kajian di FKUB provinsi, namun hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan lebih dilihat

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

sebagai Wakil Ketua Tandfidziyah NU daripada Ketua Takmir Masjid al-Muhtadin.

Berbagai organisasi formal yang fokus dalam kerukunan umat beragama yang ada di Yogyakarta tidak pernah melibatkan secara aktif pihak Pengurus Masjid al-Muhtadin. FKUB Kabupaten Bantul belum secara masif melibatkan area-area rentan konflik agama karena merupakan daerah plural. Hal ini juga dikarenakan FKUB masih bersifat lebih banyak formalitas sehingga ketika mengalami persoalan dana, aktivitasnya mandeg. Selain itu, secara umum aktivitas FKUB lebih banyak reaktif ketimbang terencana. Penyuluh agama di wilayah Banguntapan juga tidak menyentuh Takmir Masjid al-Muhtadin karena dianggap tidak pernah ada masalah. Para pegiat kerukunan umat beragama lebih banyak melibatkan para pemangku pura karena lebih melihat pura Jagadnatha sebagai pura terbesar di Yogyakarta. Padahal sesungguhnya masjid juga memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan kerukunan umat beragama.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Pemberdayaan alamiah terjadi di kalangan masyarakat Plumbon dan komunitas masjid. Secara natural kenyataan hidup yang beragam sejak mereka kecil, bahkan dalam keluarga mereka, telah menjadikan masyarakat yang dibesarkan di wilayah Plumbon terus memupuk rasa penghargaan terhadap agama lain. Tidak semua masyarakat Indonesia pernah merasakan hidup di lingkungan plural yang secara alami akan membuat seseorang lebih menghargai perbedaan, memiliki sikap hati-hati dan terus berusaha menjaga kerukunan. Pergaulan sekian

tahun dalam masyarakat yang plural tentu menanamkan cara-cara bagaimana mereka menciptakan mekanisme keseimbangan bagi para penduduknya. Apalagi ditunjang oleh budaya Jawa yang berusaha memanusiakan manusia, *tepo seliro*, menjaga lidah dan perasaan.

b) Kegiatan –Kegiatan Terkait P emeliharaan Kerukunan

Interaksi, kolaborasi, dan *sharing values* untuk aktivitas kemanusiaan menjadi kunci kerukunan umat beragama di Plumbon. Aktivitas budaya dan aktivitas komunitas masjid di kalangan masyarakat lintas iman, serta aktivitas gotong-royong menjadi kunci kerukunan komunitas antaragama di Plumbon.

Beberapa aktivitas riil yang dimaksudkan untuk menjaga kerukunan misalnya upacara "nyadran" yaitu upacara bersih makam dan berdo'a di makam leluhur sebelum bulan Puasa. Tradisi yang lebih dekat ke tradisi Islam ini sangat lekat dengan budaya Jawa. Untuk menghargai bahwa nyadran sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Plumbon, prosesi berdo'a dilakukan oleh perwakilan kelompok agama baik Islam, Katolik maupun Hindu. Semua warga lintas agama membawa makanan untuk upacara nyadran dan warga yang lain juga memiliki kepercayaan bahwa warga agama lain tahu aturan makanan agama lain. Sehingga pada saat makan bersama, tidak ada keraguan untuk makan dari pemeluk agama lain. Begitu pula dengan aktivitas Syawalan yang sudah dianggap menjadi tradisi juga dirayakan bersama, warga non muslim menjadikannya tradisi untuk dirayakan bersama di balai RW dengan kerjasama yang kuat.

Aktivitas gotong-royong antar pemeluk agama juga merekatkan hubungan antarumat beragama. Misalnya ketika

ada upacara Nyepi dan hari raya umat Hindu, warga muslim membantu parkir dan keamanan. Begitu pula jika warga apapun agamanya memiliki hajat, tetangga yang lain yang sama maupun beda agama membantu bahkan dalam menyediakan makanan. Begitu juga ketika terjadi kematian salah seorang warga, mekanisme komunitas memberikan kesamaan hak untuk mendapatkan santunan dari RW sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kemudian penyediaan makam disiapkan RW dengan bantuan warga. Warga akan membantu dengan kesadaran, kecuali jika ada hal-hal yang sifatnya individual keagamaan yang tidak bisa dibantu, misalnya memandikan, ibadah, dan upacara keagamaan. Makam yang terdapat di tengah-tengah antara masjid dan pura adalah makam umum yang tidak membedakan apapun agamanya.

Komunikasi yang efektif dengan mengedepankan dialog untuk membangun keterbukaan, kepercayaan, dan menjaga kerjasama adalah kunci keberhasilan kerukunan umat beragama di Plumbon yang salah satunya didukung oleh komunitas masjid. Kepemimpinan oleh pemeluk agama apapun juga tidak menjadi masalah di Plumbon, mengingat bahwa tingkat kepercayaan antar masyarakat sudah cukup tinggi. Sebagai contoh, misalnya ketua RT di wilayah RT tempat Masjid al-Muhtadin berada adalah pemeluk Hindu.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

c) Hambatan dalam Upaya Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

i) Faktor internal

Beberapa hambatan internal untuk menjaga kerukunan umat beragama di masjid al-Muhtadin antara lain tidak adanya usaha peningkatan sumber daya manusia secara sistematis untuk memahami dan menjaga

kerukunan. Masjid lebih mengupayakan usaha kultural untuk menjaga *framework* kerukunan umat beragama. Usaha kultural ini memiliki kekuatan mengakar di masyarakat namun jika ditantang oleh ideologi Islam lain yang tidak sepaham dengan keyakinan kultural tersebut akan mengalami goncangan. Hal ini karena sebagian takmir dan warga tidak memiliki konsep yang matang tentang sikap menjaga kerukunan yang mereka yakini. Selain itu, memberikan pemahaman khusus tentang nilai toleransi yang mereka anut akan semakin menguatkan kerukunan umat beragama di Plumbon. Oleh karena itu, p enting kiranya secaa khusus takmir memasukkan sesi pengajian dengan tema kerukunan umat beragama.

Hambatan yang adalah dari para pendatang yang tidak memiliki pengalaman hidup dalam situasi plural. Secara konsep mereka terkadang memiliki pemahaman yang berbeda misalnya mengapa muslim di Plumbon bersedia makan yang dimasak masyarakat Hindu? Membantu non Muslim dalam kematian? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Jika tidak ada usaha *mainstreaming* semangat kerukunan umat beragama yang menjadi salah satu visi masjid ini tentu kehadiran para pendatang akan menjadi penghambat usaha menjaga kerukunan umat beragama.

ii) Faktor eksternal

Adanya ideologi non moderat adalah salah satu ancaman eksternal yang hadir di Masjid al Muhtadin. Misalnya beberapa kelompok HTI yang berusaha menggunakan masjid, menawarkan pengajian, adalah contoh bahwa takmir masjid harus selalu waspada terhadap ideologi non moderat yang dapat mengganggu

terhadap ideologi non moderat yang dapat mengganggu usaha menjaga kerukunan umat beragama. Begitu juga kelompok garis keras baik FJI dan MMI yang menyerang LKIS yang tempatnya tidak jauh dari masjid, serta Gerakan anti Maksiat yang ada di wilayah Banguntapan dapat menjadi faktor penghambat untuk menjaga harmoni yang telah terbangun di masjid ini. Misalnya gerakan razia yang biasa dilakukan oleh Gerakan Anti Maksiat bisa jadi dapat merusak rumah makan yang menjual babi yang kehadirannya adalah hasil konvensi antar warga.

Selain itu juga para pendatang yang hanya tinggal sementara (kos atau kontrak) juga menjadi penghambat usaha menjaga kerukunan. Warga baik muslim maupun non muslim sering mengeluhkan bahwa para pendatang kurang menghormati tata krama di tempat tinggalnya kini. Sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kerukunan umat beragama di wilayah yang plural ini. Misalnya penyewa rumah dekat masjid yang kebetulan memeluk agama Kristen masih terus menerus bermain gitar ketika adzan magrib padahal kalau penduduk asli akan berhenti dan memberikan kesempatan kepada muslim beribadah.

Inisiatif sistematis untuk melakukan mainstreaming gerakan kerukunan umat beragama masih belum menyentuh masjid Al-Muhtadin khususnya dan Plumbon pada umumnya. Pemerintah, dalam hal ini FKUB, masih belum melakukan inistaif skematis untuk membekali baik muslim (takmir) maupun tokoh agama di tingkat lokal untuk berperan aktif alam menjaga kerukunan umat beragama. Hal ini mengingat bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya persoalan yang

dapat selesai dalam sehari, tetapi merupakan usaha yang harus dijaga secara terus menerus. Begitu juga keberadaan Forum Pendampingan dan Penguatan Kedamaian (FP2K) Yogyakarta yang merupakan forum hasil bentukan alumni workshop perdamaian yang diselenggarakan Litbang Kemenag dan berpusat di Banguntapan (walaupun levelnya propinsi) ternyata belum menyentuh masjid Al-Muhtadin khususnya dan masyarakat Plumbon pada umumnya.

d) Faktor Pendukung dalam Upaya Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

i) Faktor internal

Sikap sebagain takmir yang terbuka dalam memandang masalah kerukunan umat beragama telah membantu sebagian takmir lain untuk berproses menjadi lebih terbuka. Hal ini dapat dirasakan hasilnya dari sikap jamaah yang sebagian besar sudah lebih terbuka terhadap perbedaan di lingkungannya, utamanya untuk para pendatang. Keterlibatan takmir yang merupakan penduduk asli semakin menguatkan pentingnya menjaga kerukunan yang dimotori masjid. Perubahan sikap yang tidak tiba-tiba ini tentu menjadi pendukung langgengnya usaha menjaga kerukunan umat beragama di Plumbon.

Selain itu, model masyarakat Plumbon yang merupakan model masyarakat Jawa yang *tepo seliro*, bersikap arif bijaksana, memiliki tingkat pendidikan yang baik, menjunjung tinggi hukum negara Indonesia, menjadikan kerukunan antar umat beragama bukanlah hal yang sulit dicapai.

ii) Faktor eksternal

Kesadaran *leadership* dari seorang dukuh yang

menyadari pluralitas warganya menjadi salah satu kunci keberhasilan menjaga kerukunan di masyarakat Plumbon. Upacara Nyadran yang dikemas menjadi upacara budaya telah merekatkan semua pihak dan menjadi salah satu model kerukunan antar umat beragama dalam skala yang kecil dan dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar. Usaha merekatkan masyarkat lintas iman dalam situasi yang tidak selalu formal juga menjadi penguat rasa saling percaya dan terbuka atas tokoh agama dan diikuti oleh warganya.

Selain itu, kultur masyarakat Jawa yang kental di masyarakat Plumbon dan otoritas keraton Yogyakarta *Hadiningrat* masih menjadi bagian dari identitas jamaah masjid Al-Muhtadin dan warga Plumbon secara umum. Nilai-nilai keraton yang mengutamakan kedamaian, gotong royong, menjaga perasaan dengan ucapan dan tingkah laku masih menjadi nilai yang dianut sehingga kerukunan antar umat beragama bukanlah hal yang sulit dicapai bagi komunitas lintas iman di Plumbon.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

e) Pandangan Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Masjid Al-Muhtadin dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Secara umum baik Kemenag, Penyuluh agama, para tokoh FKUB, dan pemerintah mengetahui adanya model kerukunan umat beragama yang cukup baik di desa Plumbon yang melibatkan komunitas tiga agama, Hindu, Islam dan Katolik. Mereka sering mendengar dan sebagian melihat langsung bahwa peran masjid tidak dapat diabaikan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Plumbon selain dua komunitas lainnya. Hal ini mengingat bahwa kerukunan itu pasti diciptakan oleh

anggota kelompok secara m erata dan adil. Plumbon dikenal sebagai model masyarakat yang plural dan dapat menjaga kerukunan umat beragama. Selain itu, ketokohan ketua yayasan yang memiliki pengaruh baik di pemerintah daerah Bantul maupun mantan wakil ketua tandfidziyah PW NU DIY menjembatani ide-ide kerukunan itu kepada warga, meskipun prakteknya banyak dilakukan oleh takmir.

Masjid dan jamaahnya sebagai salah satu institusi dan komunitas agama yang hidup di Plumbon diakui oleh masyarakat menjadi salah satu pendukung kerukunan. Baik warga Hindu, Katolik, maupun pengampu pura merasakan bahwa selama ini pihak masjid tidak mendiskriminasikan kelompok agama lain. Baik secara institusi maupun individu, para takmir dan jamaah menjadi bagian yang menjaga kerukunan umat beragama di Plumbon. Sikap legawa, percaya, terbuka, kerjasama, adalah bukti bahwa masjid sebagai institusi dan jamaahnya senantiasa mengupayakan kerukunan. Adanya sedikit perbedaaan pandangan pada praktek kehidupan sehari-hari bukan berarti merusak upaya kerukunan, namun merupakan ujian bagi terwujudnya kerukunan apakah dapat terus langgeng atau retak. Dan selama ini, dialog dan keterbukaan yang didukung masjid sebagai institusi dan para jamaah masih menjadi kunci pemeliharaan kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat Plumbon.

Beberapa saran untuk Masjid al-Muhtadin adalah adanya usaha yang sistematis untuk membekali para takmir dalam memahami kerukunan umat beragama. Isu kerukunan umat beragama yang dipromosilan oleh Muslim khususnya masjid masih penting untuk dijadikan

model dan para takmir Masjid al-Muhtadin menganggapnya biasa saja terhadap isu ini. Hasil dari usaha sistematis ini lahirlah usaha pemberian materi secara spesifik tentang kerukunan umat beragama yang akan diaplikasikan ke berbagai aktivitas masjid termasuk didalamnya adalah BMT.

Masjid al-Muhtadin dan usahanya menjaga kerukunan umat beragama adalah salah satu model peran komunitas Muslim dalam menjalankan kerukunan umat beragama. Model ini sebaiknya dapat ditularkan melalui forum-forum formal sepaerti FKUB di tingkat kecamatan maupun Kabupaten sebagai sebuah *a success story* yang dapat diduplikasikan di tempat lain.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

a) Masjid Al-Muhtadin sebagai institusi maupun individu para takmir dan jamaah tidak hanya menjaga hidup berdampingan secara rukun (ko-eksistensi damai). Komunitas ini telah melakukan usaha-usaha aktif dan dinamis dalam menjaga kerukunan. Hal ini ditunjukkan dengan mekanisme menjaga kerukunan dengan mengutamakan dialog dan musyawarah serta kerelaan untuk secara aktif bekerjasama dan berkolaborasi pada aktivitas-aktivitas muamalah. Tidak mengherankan jika keterbukaan, kepercayaan, dan kebersamaan sudah menjadi n ilai yang melekat pada semua masyarakat di Plumbon, dan masjid adalah salah satu pendukungnya.

b) Keberadaan organisasi masyarakat lintas iman

yaitu RT, RW, dan pedukuhan serta masyarakat *grassroot* adalah media jamaah masjid melakukan toleransi aktif. Keberadaan organisasi lintas agama ini sebagai media tileransi aktif dan kesadaran masyarakat menjadikan dialog untuk untuk menyelesaikan masalah adalah indikator tingginya integrasi sosial sebagai indikator adanya kerukunan umat beragama. Lebih jauh lagi, keterlibatan aktif masjid dan jamaahnya dalam menumbuhkan kepercayaan, pengakuan adanya peran semua pihak, serta kesetaraan hak pemeluk agama lain misalnya dalam urusan sosial dan hak memilih dan dipilih menjadi ketua RT/RW adalah bukti adanya kerukunan yang aktif antar pemeluk agama.

c) Usaha membangun keseimbangan dalam kehidupan sosial (*equilibirium*), berdasarkan teori struktural fungsional, telah dilakukan oleh komunitas Masjid al-Muhtadin dan jamaahnya. *Pertama*, masjid dan jamaahnya beradaptsi dengan baik dengan lingkungan yang plural dengan memiliki framework bahwa masjid berada dalam situasi plural dan menjadi kewajiban masjid untuk menjaga harmoni. *Kedua*, masjid dan jamaahnya sangat mementingkan kepentingan umum demi menjaga harmoni, misalnya pengajaran agama yang terkontrol, menghargai terpilihnya ketua RT non muslim, dan aktivitas sosial lainnya. Masjid dan jamaahnya juga menjaga hububangan bauk atau berintegrasi dengan penduduk yang plural. Mereka menjaga harmoni tanpa melakukan intervensi pada hal-hal yang sifatnya privasi

keagamaan. *Ketiga,* masjid dan jamaahnya juga tetap menjaga relasi baik dengan semua pemeluk agama di Plumbon dengan tetap menjaga keyaionan masing-masing atau *latent patient maintenance.*

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Pimpinan Kantor Kemenag Kabupaten Bantul dan instansi terkait, kiranya pengelolaan Masjid al-Muhtadin Plumbon dapat menjadi salah satu model bagi kelompok keagamaan Islam dalam skala kecil dalam upaya memelihara, menjaga dan memupuk kerukunan umat beragama secara aktif di tengah-tengah masyarakat yang plural dan tantangan modernisasi serta suburnya ideologi non moderat di Indonesia.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Irfan, Epilog: Masa Depan Masjid dan Pembangunan Perdamaian, dalam Al-

Al-Makassary, Ridwan, dan Amelia Fauzia, Masjid dan Pembangunan Perdamaian,: Studi Kasus

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. Keduabelas, Edisi Revisi V, 2002.

Doyle, Johnson Paul. Terj: Robert M. Z Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia, 1986.

Hodgson, Marshall GS., *The Venture of Islam, Conciensce and History in a World Civilization*, Chicago: University of Chicago Press, 1974.

Kasus Jakarta dan Solo, CSRC: Jakarta, 2010.

Makassary, Ridwan, dan Ahmad Gaus AF (ed), Benih-benih Islam Radikal di Masjid: Studi

Mandailing, Taufik, Merajut Kebersaman dalam Kebhinekaan, Yogyakarta: FP2K Idea Press, 2013

Pedersen, J. *Masjid, Encyclopedia of Islam*, online version, www.brill.nl. Perda Provinsi DIY No 4 Tahun 2011

———————

tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Poso, Ambon, Ternate, dan Jayapura, CSRC: Jakarta, 2011.

Pranawati, Rita, dan Irfan Abubakar, Modul Kebebasan Beragama dan Integrasi sosial, Jakarta: CSRC, 2011.

University, 2002.

Varshney, Asutosh, Ethic Conflict anc Civic Life: Hindu and Muslim in India, New Haven: Yale

Vredenbregt, J., *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat,* Jakarta, PT. Gramedia, 1983. Yewangoe, AA, Agama dan Kerukunan, Jakarta: Gunung Mulia, 2009.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

EPILOG
Memelihara Harmoni Dari Bawah
Peran Kelompok Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Oleh M Ridwan Lubis

Setelah melakukan pembahasan sebagai bagian dari prolog pada laporan penelitian ini maka tiba saatnya bagi penulis sesuai dengan permintaan Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan untuk melakukan refleksi terhadap semua laporan penelitian yang mencakup 8 lokasi yaitu Kupang, Pangkal Pinang, Badung, Tengerang, Bandar Lampung, Minahasa Utara, Bandung dan Bantul. Laporan hasil observasi dan wawancara tersebut memiliki nilai penting sebagai bagian dari upaya melakukan pemetaan sosial *(social mapping)* pola kehidupan umat beragama di berbagai daerah. Sebagai pemetaan sosial tentulah diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang adanya pertemuan sistim politik nasional dengan sistim politik kedaerahan atau lokal atau juga sikap kelompok-kelompok keagamaan dalam membangun kesadaran terhadap wawasan kebangsaan dan keberagamaan. Dalam arena-arena tersebut akan dapat terbaca tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan politik nasional tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan bagaimana masyarakat lokal menunjukkan kreasi serta inovasi mereka sebagai bagian dari wujud kedewasaan berbangsa. Selain dari itu juga, akan diperoleh informasi bagaimana masyarakat yang berbeda keyakinan memberikan respon antara satu dengan lainnya.

Pada masyarakat yang majemuk atau yang terdiri dari beberapa kebudayaan yang berlaku dimana aturan, nilai, norma dan pengetahuan yang harus dipahami oleh berbagai

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

suku bangsa yang menetap sebagai aturan kemasyarakatan yang satu tentulah dalam berbagai aksentuasi kehidupan sosial akan ditemukan berbagai perbedaan dalam konsep perwujudan relasi maupun pola komunikasi sosial antar kelompok keagamaan. Dari interaksi tersebut akan muncul berbagai *streotype, prejudice* maupun *stigma.* Tiga hal ini adalah merupakan hasil dari pengabaran seorang anggota masyarakat dengan berbekal pengalamannya berinteraksi dengan berbagai suku atau kelompok agama. Pengalaman tersebut apabila diperoleh secara berulang-ulang maka akan menciptakan stigma sosial yang menyebabkan satu golongan akan berhati-hati apabila berinteraksi dengan kelompok lainnya yang telah dilekatkan stigma itu.[3]

Terjadinya konflik antar umat beragama sering dipicu oleh factor yang sama sekali tidak berkaitan dengan aspek keagamaan akan tetapi kemudian berubah menjadi konflik bernuansa agama. Asal mula dari konflik berlangsung secara bertahap: potensi konflik, pemekaran konflik, pelembagaan konflik, penakaran konflik dan letupan konflik. Demikianlah terbentuknya suatu pola relasi yang saling bertentangan antara satu sama lain.

Pemerintah memang mempunyai peranan penting dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama setidaknya terdapat pada tiga hal yaitu merumuskan berbagai konsep yang berkenaan dengan regulasi kehidupan beragama di Indonesia. Penggalian konsep regulasi ini bukanlah hal yang mudah karena masyarakat sudah terlanjur memahami bahwa urusan keagamaan adalah masalah hak absolut pribadi yang tidak bisa dimasuki oleh institusi termasuk negara. Dalam kaitan ini

---

[3] Bambung Rudito dan Melia Famiola, *Social Mapping, Metode Pemetaan Sosial,* Bandung, Rekayasa Sains, 2008, hal. 23.

pemerintah hendaklah berupaya terus menerus mensosialisasikan bahwa tujuan regulasi adalah untuk menjamin tetap terpelihara kebebasan memahami dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Namun terkait dengan relasi sosial di antara umat beragama negara memiliki wewenang untuk mengaturnya karena untuk menjamin tetap terpeliharanya makna kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itulah kerukunan beragama menjadi bagian penting dari kerukunan nasional. Peranan kedua, adalah negara memberikan fasilitasi yang memadai agar umat beragama dapat dengan tekun memahami, menghayati serta mengamalkan ajaran agamanya. Karena hasil dari pengalaman keberagamaan *(religiositas)* pada akhirnya akan kembali ke negara yaitu lahirnya warga negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu menjadikan agama sebagai landasan etos kerja. Selanjutnya, negara berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi semua umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya. Maka dalam memberikan perlindunan ini tentunya negara juga harus sadar dimana batas-batasnya ia dapat melakukan proteksi.

Patut disadari bahwa negara masih belum sepenuhnya berhasil menjalankan tiga fungsi di atas. Oleh karena itu, dibutuhkan kreatifitas dan inovasi umat beragama ikut berpartisipasi memelihara kerukunan umat beragama. Bentuk partisipasi itu antara lain tumbuhnya kesadaran bahwa semua umat beragama sebagai warga negara adalah orang-orang yang sedang melakukan pengembaraan hidup di dunia untuk menuju kepada kehidupan ideal yang abadi. Sebagai sesama musafir dalam perjalanan *(fellow travel)* tentulah mereka harus menyadari bahwa mereka hidup dalam keadaan senasib dan sepenanggungan. Sehingan dengan demikian mereka harus diikat oleh solidaritas sebagai sesama anak bangsa.

Dalam buku laporan ini ditemukan berbagai temuan dari para peneliti berbagai kreatifitas dari anak-anak bangsa yang seharusnya dilestarikan. Akan tetapi, perlu disadari sekalipun para remaja dan orangtua telah berjaya menggagas berbagai bentuk kerjasama itu akan tetapi belum tentu dengan terbuka dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini disebabkan karena sudah terbentuknya persepsi tentang dimensi politis dari agama-agama. Sehingga apabila melihat kelompok sesuatu agama melakukan kegiatan yang mengajak partisipasi umat lain maka hal itu dipandang sebagai bagian dari strategi misi ataupun dakwah. Strategi itu pada akhirnya akan berujung kepada proselit yang akan dapat merubah peta regionalisasi agama dari pemahaman yang sudah diterima sebelumnya. Dalam kaitan itu, masing-masing kelompok keagamaan bisa jadi memilih sikap eksklusif ketika akan berkomunikasi dengan lainnya sehingga kurang terjalin semangat kerukunan. Selain dari itu, pandangan lain mungkin akan melihat bahwa interaksi dengan orang yang berbeda iman akan mendatangkan suasana yang tidak menguntungkan bagi semua agama yaitu *relativitas iman.*

Berbagai *streotype, prejudice* maupun *stigma* di atas hendaklah diusahakan untuk menghilangkannya. Peranan utama tentulah diharapkan partisipasi para pemuka agama terutama anggota FKUB untuk menggagas berbagai bentuk kegiatan dalam rangka sosialisasi kerukunan umat beragama melalui jalan pengembangan dialog, menampung aspirasi serta menyalurkannya dan terakhir adalah pemberdayaan umat beragama sehingga secara bertahap kesenjangan baik kasat mata *(tangible asset)* maupun tidak kasat mata *(intangible asset)* dapat dihilangkan dalam peta persepsi masyarakat. Selanjutnya, peran berikutnya adalah aparat Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk secara kreatif dan

inovatif menggagas berbagai kegiatan yang akan memperkuat semangat kerukunan umat beragama.

Dalam laporan penelitian ini yang terasa masih sangat kurang adalah kesungguhan peneliti untuk menggali berbagai fakta sosial. Sebagai bagian dari manifestasi kebudayaan maka kehidupan beragama itu memiliki tiga lapisan yaitu artefak, interpretasi dan asumsi. Artefak diperoleh melalui hasil pengamatan terhadap fakta sosial. Asumsi diperoleh melalui wawancara terhadap para pelaku gerakan sosial kerukunan sedang interpretasi adalah kemampuan para peneliti melakukan refleksi terhadap hasil dari wawancara tersebut. Dengan demikian, yang masih terasa kurang dilakukan oleh Tim Peneliti adalah membangun kesimpulan sebagai hasil refleksi berdasar hasil observasi dan wawancara. Sejalan dengan itu, Puslitbang Kehidupan Keagamaan adalah merupakan bagian dari institusi Kementerian Agama melakukan penelitian ini yang sifatnya adalah penelitian kebijakan. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian hendaklah memuat kebijakan apa yang harus segera dilakukan Kementerian Agama untuk memperkuat solidaritas kewargaan di kalangan umat beragama yang majemuk itu. Selain dari itu, hal lain yang perlu dicermati pada tulisan laporan ini adalah masih terdapat salah ketik sehingga dapat mengakibatkan salah pengertian di kalangan pembaca. Demikianlah beberapa butir yang ingin dikemukakan penulis. Selamat Membaca.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN PERAN KELOMPOK MUSLIM DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS MASJID AL-MUHTADIN PLUMBON BANGUNTAPAN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN
1.	Miftahul Khoir	Takmir Masjid
2.	Mahrul Afandi	Takmir Masjid
3.	Munawir	Ketua Takmir Maasjid
4.	Suparjo	Takmir bagian Rumah Tanga
5.	Budi Sanyoto	Ketua Pengempon Pura
6.	YA. Mulyowidodo	Pamong Katolik Plumbon
7.	Dyah S	Kepala PAUD Al-Muhtadin
8.	Bajuri	Bendahara Takmir Masjid
9.	Tri Sukmono	Sekretaris PHDI
10.	Suparjono	Ketua RT 11, warga hindu
11.	Sidik Pramono	Kepala Urais Kemenag Bantul
12.	H. Masharun	Ketua Yayasan Al-Muhtadin
13.	Yasmuri	Ketua FKUB Bantul
14.	Sri Harti	Ketua Pengajian Ibu-Ibu
15.	Aris Purnomo	Ketua Pedukuhan Plumbon
16.	Dimas Anggoro	RISMA Al-Muhtadin
17.	Surpriyanto	Kesbangpolinmas Bantul

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

LAMPIRAN 2

DAFTAR NAMA RESPONDEN FOCUS GROUP DISCUSSION PENELITIAN PERAN KELOMPOK MUSLIM DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS MASJID AL-MUHTADIN PLUMBON BANGUNTAPAN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN
1.	Iskak	Takmir Masjid Al-Muhtadin
2.	Anas Rifai	Takmir Masjid Al-Muhtadin
3.	YA. Mulyowidodo	Pamong Katolik Plumbon
4.	Tri Sukmono	Sekretaris PHDI
5.	Sidik Pramono	Kepala Urais Kemenag Bantul
6.	Nuraeni	Penyuluh Agama
7.	Latifah	Penyuluh Agama
8.	Maryadi	Penyuluh Agama
9.	Jumiran	Kecamatan Banguntapan
10.	Ridho Subkhi	Lembaga Studi Islam dan
11.	Sudarmaji	Kelurahan Banguntapan
12.	Rahmah Nur Fitriani	Litbang Kemenag
13.	Rita Pranawati	Litbang Kemenag
14.	Dede Dwi Kurniasih	Asisten riset
15.	Tri Rahmayanti	Asisten riset

LAMPIRAN 3

LAPORAN KEGIATAN TAKMIR MASJID AL-MUHTADIN TAHUN 2012 M

Kegiatan di Masjid Al-Muhtadin Plumbon meliputi empat macam yaitu :

A. Kegiatan Harian
B. Kegiatan Mingguan
C. Kegiatan Bulanan
D. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam

A. KEGIATAN HARIAN

1. *Sholat Wajib Berjama'ah*
   Dilaksanakan setiap waktu sholat wajib yakni Isya' , Subuh, Dzuhur, Asar, dan Maghrib.
2. *Belajar membaca Al-Qur'an*
   Dilaksanakan setiap hari sehabis sholat maghrib.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

B. KEGIATAN MINGGUAN

1. *Dzikir Rotibul Hadad*
   Dilaksanakan setiap hari Ahad ba'da maghrib.
2. *Kajian Kitab Muhtarul Ahadits*
   Dilaksanakan setiap hari Selasa ba'da maghrib.
3. *Kajian Kitab Bulughul Marom*
   Dilaksanakan setiap hari Rabu ba'da maghrib
4. *Yasinan dan Tahlilan*
   Dilaksanakan setiap hari Kamis ba'da maghrib.
5. *Jum'atan*
   Dilaksanakan setiap hari Jum'at sebagai pengganti Sholat Dzuhur.

6. *Pengajian Ahad Pagi*
   Dilaksanakan setiap hari Ahad jam 06.00 – 07.00 WIB, dengan kajian Tafsir Al-Qur'an.
7. *Pengajian Bapak-Bapak*
   Dilaksanakan setiap hari Senin ba'da Isya' dengan tuan rumah jama'ah anggota pengajian bapak-bapak secara bergilir.
8. *Pengajian Ibu-Ibu*
   Dilaksanakan setiap hari Kamis ba'da Isya' dengan tuan rumah jama'ah anggota pengajian ibu-ibu secara bergilir.
9. *Pengajian Remaja Islam Masjid (RISMA)*
   Dilaksanakan setiap hari Jum'at ba'da Isya' dengan tuan rumah jama'ah anggota RISMA secara bergilir. (setelah Idul Adha 1433 H, RISMA vakum)

C. KEGIATAN BULANAN

1. *Khataman Al-Qur'an*
   Dilaksanakan setiap Jum'at ke-2 setiap bulan masehi.
2. *Dzikir dan Do'a bersama*
   Dilaksanakan setiap malam sebelas bulan hijriyah.

D. KEGIATAN PERINGATAN HARI

Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
Maulid Nabi Muhammad	5 Februari 2012	Umum
Isra' Mi'raj	17 Juni 2012	Umum
Nisfu Sya'ban	05 Juli 2012	Umum
Bazar dan Pentas Seni	13 s/d 15 Juli 2012	Umum
Ramadhan	21 Juli s/d 18	Umum
Nuzulul Qur'an	06 Agustus 2012	Umum

Pengumpulan Pembagian	16,17,18 Agustus	Umum
Idul Fitri & Syawalan	19/20 Agustus	Umum
Idul Adha & Qurban	26 Oktober 2012	Umum
Bakti Sosial	28,29 Oktober 2012	Remaja
Tahun Baru Hijriyah 1434 H	15 November 2012	Umum

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

INDEKS

Adat, 64, 65, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 93
Agama, 3, 5, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 43, 48, 49, 52, 57, 58, 78, 84, 85, 89, 94, 95, 107, 112, 118, 123, 125, 126, 127, 152, 165, 166, 177, 178, 190, 197, 198, 202, 203, 210, 228, 233, 236, 246
Agamis, 183, 184, 186, 187, 192, 198
AGAP, 188, 195
Aktivitas, 46, 209, 216, 218
Aliran, 39, 41, 48, 246
Ambon, 24, 228
Analisis, 147, 191
Anggaran Dasar (AD), 135
Anggaran Rumah Tangga (ART), 135
Anggota, 26, 39, 132, 134, 135, 138, 185, 246
Antarumat, 139, 140, 143, 149, 161, 205
BAMAG, 164, 173
Banjar, 64, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 81, 82, 83, 88, 92, 93
Batavia, 18, 98, 104
Beragama, 8, 11, 22, 24, 26, 35, 48, 59, 60, 79, 81, 83, 88, 116, 139, 143, 161, 162, 164, 177, 178, 197, 205, 207, 212, 219, 222, 223, 228, 229, 246
BKSAUA, 155, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 175, 176
BMT, 210, 211, 213, 225
Budaya, 14, 40, 58, 95, 97, 101, 125, 126, 160, 165, 180, 197, 198, 199, 201, 228
Buddha, 9, 18, 19, 21, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 78, 79, 102, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 127, 130, 158, 162, 163, 183, 193
Cina, 98, 99, 107, 126, 163
Citra Maitreya, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 60
Conflict, 171, 178, 197, 228
CSRC, 207, 208, 228
DDII, 185, 208

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA

Demografi, 37, 61, 129
Desa Adat, 64, 65, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Faktor, 49, 56, 88, 89, 92, 111, 112, 144, 145, 175, 219, 220, 222
Fasum, 130
FGD, 6, 12, 129, 131, 138, 165
FKUB, 17, 23, 47, 48, 49, 57, 59, 60, 80, 120, 127, 130, 154, 155, 161, 162, 164, 165, 166, 171, 173, 175, 176, 177, 187, 191, 193, 196, 203, 205, 214, 216, 217, 221, 223, 225, 232, 235
FPI, 205
Framework, 214
FSOI, 179, 184, 185, 187, 191, 192, 194, 195, 196
Fungsi, 81, 82
Galungan, 211
GAM, 205
Geografi, 37, 61, 129
Gereja, 25, 27, 38, 59, 77, 102, 158, 164, 204, 211
Hindu, 8, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 47, 50, 53, 56, 60, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 102, 112, 116, 130, 158, 162, 163, 183, 187, 193, 202, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 223, 224, 228
HKBP, 189, 195
HTI, 54, 208, 220
Hukum, 60, 70, 81, 91
ICMI, 185
Idul Fitri, 140, 144
Interaksi, 218
Intoleransi, 202
IPM, 160
Islam, 8, 18, 19, 20, 21, 38, 42, 43, 47, 50, 53, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 86, 90, 95, 102, 116, 118, 119, 120, 124, 126, 127, 130, 131, 133, 135, 136, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 158, 162, 163, 167, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 200, 202, 205, 206, 208, 210, 218, 220, 223, 227, 228, 236, 237, 238
Jamaah, 206
Karakteristik, 185

PROPERTY OF KEMENTERIAN AG

Kasus, 23, 58, 95, 113, 122, 126, 177, 188, 195, 205, 227, 228
Katolik, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 47, 51, 53, 54, 60, 77, 78, 79, 102, 112, 116, 130, 150, 158, 162, 183, 187, 193, 202, 203, 204, 211, 218, 223, 224, 235, 236
Keagamaan, 3, 9, 10, 13, 17, 35, 38, 58, 77, 84, 86, 94, 102, 104, 105, 108, 113, 122, 124, 125, 127, 182, 197, 202, 205, 229, 233, 246
Kearifan lokal, 50, 54, 56, 182
Kelompok, 1, 2, 9, 10, 24, 26, 31, 38, 55, 57, 73, 161, 166, 181, 188, 190, 191, 192, 197, 202, 205, 210, 213, 215, 229
Kerukunan, 1, 8, 11, 22, 24, 26, 41, 48, 54, 59, 60, 80, 81, 83, 88, 111, 116, 132, 134, 135, 139, 143, 144, 153, 161, 177, 178, 197, 205, 207, 212, 218, 219, 222, 223, 228, 229, 246
Khonghucu, 8, 18, 38, 39, 47, 53, 60, 77, 112, 116, 117, 119, 121, 127, 158, 193
Klenteng, 77
Komunikasi, 58, 79, 180, 205, 219
Konflik, 23, 51, 58, 92, 113, 116, 123, 177, 189, 190, 191, 195
Kristen, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 38, 39, 42, 47, 51, 53, 77, 78, 79, 102, 112, 116, 117, 119, 124, 127, 130, 150, 158, 162, 167, 183, 187, 188, 190, 191, 193, 202, 221
KSU, 210, 213
KTP, 118, 120, 121
KUA, 89, 190, 191
Kultural, 179
Kumala Bodhi, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 59, 60
Lembaga, 2, 13, 14, 17, 36, 64, 76, 81, 84, 91, 93, 94, 95, 126, 193, 205
Lembaga Adat, 81
LSM, 1, 26, 120
Mapalus, 160
Masjid, 53, 72, 85, 90, 101, 136, 153, 204, 207, 209,

210, 211, 212, 214, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 235, 236, 237, 238
Masyarakat, 2, 13, 14, 22, 35, 36, 47, 58, 59, 67, 68, 89, 94, 95, 97, 101, 116, 117, 125, 126, 145, 160, 168, 178, 193, 201, 223, 228, 246
MDA, 213, 215
Melayu, 51, 52, 53, 55, 56, 180
Model, 225
Muda Mudi, 31
Muhammadiyah, 158, 192, 200, 206, 209
MUI, 53, 60, 89, 90, 117, 126, 127, 185
Multilayers, 170
Muslim, 65, 74, 77, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 108, 126, 131, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 148, 191, 213, 214, 220, 224, 225, 228
Natal Bersama, 27
NU, 39, 185, 187, 192, 206, 209, 216, 224
Nyepi, 53, 163, 211, 216, 218
OMK, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Organisasi, 2, 11, 14, 38, 64, 71, 95, 126, 168, 172
Ormas, 1, 2, 3, 5, 10, 11, 38, 184, 192, 194, 195
Pandangan, 4, 48, 55, 116, 120, 145, 146, 223, 246
Paroki, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Partisipasi, 48
PBM, 13, 35, 54, 56, 57, 94, 120, 125, 164, 165, 166, 174, 191, 203
Pelayanan, 142, 212
Pemberdayaan, 27, 216, 217
Pemeliharaan, 11, 24, 26, 41, 45, 81, 83, 88, 116, 139, 140, 143, 144, 161, 218, 219, 222, 223, 229
Pemerintah, 22, 23, 48, 57, 89, 93, 116, 120, 146, 151, 152, 162, 164, 165, 166, 172, 175, 199, 221, 223, 230, 232
Pengajian, 132, 134, 135, 136, 139, 153, 210, 235, 238
Penyiaran, 84
Peran, 9, 41, 45, 47, 48, 52, 55, 83, 84, 92, 143, 161, 166, 175, 177, 185, 212, 229
Peringatan, 136, 237

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Perkumpulan, 71, 72, 73, 102, 104, 105, 107, 108, 111, 116, 121, 122, 124, 125, 127
PHBI, 131, 136, 148
Populer, 126
Prioritas, 41
Profil, 4, 12, 39, 43, 177, 209
Program, 4, 12, 165, 186, 198, 246
PUI, 185
Pura, 69, 71, 76, 77, 81, 83, 102, 211, 212, 235
Puri, 65, 66, 67, 68
Ramadlan, 136
Regulasi, 214, 216
Resolusi, 58
Revitalisasi, 58, 68
Rukem, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Santa Maria, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
SARA, 54, 56, 79
Seni, 14, 27, 95, 126, 200, 238
Silaturrahim, 184, 194
Singkawang, 8
Sosial, 9, 14, 36, 40, 79, 94, 95, 102, 104, 105, 107, 108, 122, 124, 125, 126, 127, 138, 167, 178, 199, 205, 211, 230, 239
Subak, 73, 74, 81
Suni, 39, 40, 42, 60
Tantangan, 35, 58, 172
Tionghoa, 51, 52, 53, 55, 56, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 112, 113, 114, 116, 123, 125, 126
TNI, 38
Tokoh, 68, 112, 118, 123, 127
Toleransi, 178
Tradisi, 53, 56, 68, 218
Tri Hita Karana, 65, 70, 91
UAD, 200
UII, 200
UIN, 200, 207
Umat, 8, 11, 22, 24, 26, 44, 48, 59, 60, 79, 81, 83, 84, 88, 112, 116, 127, 143, 161, 162, 164, 177, 178, 197, 205, 207, 211, 212, 219, 222, 223, 229, 246
UNY, 200
Vihara, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 59, 60, 77, 102, 107, 117
Yayasan, 26, 39, 43, 44, 45, 58, 59, 95, 126, 211, 213, 235

IKHLAS BERAMAL
PERTY OF KEMEN

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

BIODATA EDITOR

Penulis memiliki nama lengkap Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si., lahir di Ponorogo pada tanggal 9 Mei 1950. Pendidikan formal yang pernah diikuti yakni Sekolah Rakyat (SR) di Ponorogo, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I di Ponorogo, Sekolah Persiapan (SP) IAIN di Ciputat, IAIN Jakarta di Ciputat. Pada pertengahan tahun 2000 mengikuti Program Pasca Sarjana Kajian Ketahanan Nasional (sekarang bernama Kajian Stratejik) di Universitas Indonesia, lulus pada awal tahun 2003.

Sejak tahun 1978 Penulis menjadi pegawai negri di Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI hingga sekarang. Pengalaman jabatan struktural/fungsional Penulis yakni Kepala Sub Bid. Sarana Tehnis, Kepala Sub Bag. TU, Kepala Bidang Bina Sarana. Kemudian sebagai Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan hingga sekarang, serta menjadi Anggota Dewan Redaksi Jurnal *"Harmoni"*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI (2007,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Penulis pernah menyusun karya tulis antara lain: *"Hisab Rukyat dan Perbedaannya"* (Editor), Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama (2004), *"Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaannya di Indonesia"* (Editor), Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2006), *"Direktori Aliran, Faham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia"* (Editor), Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2009), *"Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama"* (Editor), Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2010), serta beberapa karya tulis diterbitkan di

Jurnal Harmoni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, antara lain: *"Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung"* (2012) dan *"Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat"* (2012).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kelompok keagamaan – yang merupakan bagian dari kelompok sosial – sejatinya telah ada sejak lama, bahkan ada yang keberadaannya sejak sebelum kemerdekaan RI. Di antara kelompok keagamaan tersebut ada yang didirikan atas inisiatif pemerintah daerah, namun tidak sedikit yang didirikan atas inisiatif masyarakat sendiri dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka.

Kelompok keagamaan di delapan kabupaten/kota yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian "Peran Kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama" Tahun 2013, ternyata pada umumnya berperan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui berbagai bidang sesuai intensitas masing-masing. Ada beberapa faktor yang mendukung peran tersebut, diantaranya adalah budaya lokal yang masih eksis.

Kelompok keagamaan yang pada umumnya berupa organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut jumlahnya di Indonesia relatif banyak tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan data tahun 1995 s/d 2010 ormas yang telah mendaftarkan diri di Kementerian Dalam Negeri tercatat sebanyak 8.632 buah. Kelompok keagamaan yang memiliki peran sentral dalam kehidupan keagamaan tersebut secara kuantitas merupakan asset yang sangat berharga untuk diupayakan dalam ikutserta meningkatkan dan memelihara kerukunan umat beragama.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

ISBN 978-602-8739-25-2